

RENCANA STRATEGIS

BADAN POM



2025 -2029

BALAI BESAR POM DI JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
JAKARTA
NOMOR HK.02.02.7A.12.25.266 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
JAKARTA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI JAKARTA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Jakarta memuat visi, misi,

tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Jakarta dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 5 Desember 2025

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



SOFIYANI CHANDRAWATI ANWAR

PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Kondisi Umum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memberikan amanat bahwa perencanaan pembangunan disusun secara periodik meliputi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 berfokus pada Penguatan Fondasi Transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong. Badan POM mengemban fungsi strategis dalam system Kesehatan Nasional dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk di konsumsi masyarakat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri dari Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Balai Besar POM di Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan Balai Besar POM dengan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Provinsi Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

Selain pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya

produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1 Capaian Kinerja Renstra BPOM Tahun 2020– 2024

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN terkait Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

- (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan
- (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh Balai Besar POM di Jakarta

Tabel 1.1 Realisasi Indikator RPJMN Terkait BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Obat yang memenuhi syarat	T	86	80	81	82	87,50
	R	76,74	74,88	83,39	87,48	87,86

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
	%	89,23	93,60	102,95	106,68	100,41
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	T	78	95	95,50	96	96,50
	R	95,26	94,73	94,16	92,90	92,73
	%	122,13	99,72	98,60	96,77	96,09

Sumber: Laporan Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024

Capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 berfluktuasi yaitu:

- Realisasi 76,74 dengan capaian sebesar 89,23% di tahun 2020;
- Realisasi 74,78 dengan capaian sebesar 93,60% di tahun 2021;
- Realisasi 83,39 dengan capaian sebesar 102,95% di tahun 2022;
- Realisasi 87,48 dengan capaian sebesar 106,68% di tahun 2023;
- Realisasi 87,86 dengan capaian sebesar 100,41% di tahun 2024;

Tahun 2020-2021 target tidak tercapai dikarenakan terdapat penurunan capaian yang cukup signifikan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemilihan sarana tempat sampling terbatas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/penandaan). Kondisi ini terjadi karena metode sampling acak yang digunakan Balai Besar POM di Jakarta dapat menggambarkan kondisi real kualitas Obat beredar di masyarakat, sehingga probabilitas hasil pemeriksaan dan pengujian sampel TMS menjadi tinggi.

Capaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat dari tahun 2020-2024 berfluktuasi yaitu:

- Realisasi 95,26 dengan capaian sebesar 122,13% di tahun 2020;
- Realisasi 94,73 dengan capaian sebesar 99,72% di tahun 2021;
- Realisasi 94,16 dengan capaian sebesar 98,60% di tahun 2022;
- Realisasi 92,90 dengan capaian sebesar 96,77% di tahun 2023;
- Realisasi 92,73 dengan capaian sebesar 96,09% di tahun 2024;

Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat selama tahun 2021-2024 tidak mencapai target karena meningkatnya jumlah sampel makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) terutama sampel dengan kriteria TMS Uji Laboratorium. Namun demikian hal ini juga menunjukkan pengambilan sampel Balai Besar POM di Jakarta secara acak mampu menjangkau produk-produk yang tidak memenuhi syarat (palsu, rusak, kedaluwarsa, dll).

Beberapa upaya untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- a) Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu;
- b) Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, CPKB, CPPOB); Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.

Dalam kaitannya dengan implementasi pengarusutamaan gender, selama tahun 2020-2024, nilai anggaran yang diberi penandaan Anggaran Responsif Gender terus mengalami penguatan, yakni Rp 2.527.714.000 (dua milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) (2020); Rp 4.154.230.000 (empat milyar seratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) (2021); Rp 5.222.301.000 (lima milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) (2022); Rp 11.006.104.000 (sebelas milyar enam juta seartus empat ribu rupiah) (2023); dan Rp 12.093.678.000 (dua belas milyar sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) (2024). Komitmen implementasi terus dibangun seiring dengan penguatan kesadaran sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan.

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Jakarta Tahun 2020-2024²

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta															
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,00	76,74	89,23	80,00	74,88	93,60	81,00	83,39	102,95	82,00	87,48	106,68	87,50	87,86	100,41
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	95,26	122,13	95,00	94,73	99,72	95,50	94,16	98,60	96,00	92,90	96,77	96,50	92,73	96,09
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	71,12	82,70	80,00	58,74	73,43	81,00	75,00	92,59	82,00	78,34	95,54	83,00	84,24	101,49
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	80,75	103,53	81,00	94,93	117,20	83,00	88,00	106,02	84,00	92,45	110,06	92,50	86,10	93,08
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				88,00	81,67	92,81	89,00	76,80	86,29	90,00	80,59	89,54	85,00	90,55	106,53
SK 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	75,00	82,53	110,04	85,00	87,12	102,49	87,00	91,04	104,64	89,00	91,89	103,25	91,90	92,00	100,11

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)
SK 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta															
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82,00	85,53	104,30	86,60	86,70	100,12	87,70	95,10	108,44	88,80	97,40	109,68	95,20	97,94	102,88
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72,00	73,30	101,81	74,98	73,80	98,43	76,65	80,22	104,66	78,33	80,10	102,26	80,16	85,89	107,15
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,50	88,19	99,65	90,00	95,61	106,23	91,00	96,03	105,53	92,00	94,71	102,95	95,25	95,81	100,59
SK 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta															
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	85,24	97,98	89,00	92,19	103,58	90,00	102,83	114,26	91,00	91,85	100,93	93,00	95,23	102,40
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,50	75,49	136,02	75,00	78,02	104,03	79,00	79,93	101,18	82,00	90,87	110,82	90,90	91,02	100,13
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00	77,00	92,77	85,00	97,23	114,39	87,00	97,80	112,41	89,00	96,95	108,93	98,70	99,53	100,84

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	46,00	55,94	121,61	60,00	69,02	115,03	63,00	71,31	113,19	65,00	73,93	113,74	74,00	83,23	112,47
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	72,61	132,02	73,00	79,21	108,51	75,00	84,22	112,29	78,00	79,96	102,51	80,00	77,32	96,65
Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,00	113,96	4,20	4,54	108,10	4,30	4,72	109,77	4,40	4,84	110,00	4,90	4,94	100,82
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik							77,00	80,95	105,13	79,00	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota													95,00	100,00	105,26
SK 5: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta															
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,21	93,02	104,27	93,00	93,83	100,89	94,40	95,06	100,70	95,80	95,86	100,06	96,70	96,73	100,03
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16,00	16,00	100,00	40,00	40,00	100,00	65,00	65,00	100,00	88,00	88,00	100,00	115,00	116,00	100,87
Jumlah desa pangan aman	4,00	5,00	125,00	14,00	14,00	100,00	21,00	21,00	100,00	28,00	28,00	100,00	36,00	36,00	100,00

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	2,00	2,00	100,00	3,00	3,00	100,00	4,00	4,00	100,00	6,00	6,00	100,00
SK 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Jakarta															
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,00	99,29	110,32	100,00	90,85	90,85	100,00	99,52	99,52	100,00	100	100,00	100,00	120,00	120,00
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,00	81,03	91,04	100,00	96,42	96,42	100,00	99,83	99,83	100,00	98,51	98,51	100,00	120,00	120,00
SK 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta															
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	32,00	54,37	169,91	54,00	58,61	108,54	58,00	60,39	104,12	61,00	61,54	100,89	65,00	68,81	105,86
SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Jakarta yang optimal															
Indeks RB BBPOM di Jakarta	80,17	88,00	109,77	82,40	82,29	99,87	83,40	89,98	107,89	84,40	90,41	107,12	91,41	93,01	101,75
Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	78,08	81,00	103,74	79,10	79,85	100,95	80,00	80,34	100,43	81,00	82,34	101,65	83,66	83,02	99,23
Nilai Pengelolaan Kearsipan													93,42	95,49	102,22

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)	T	R	C (&)
SK 9: Terwujudnya SDM BBPOM di Jakarta yang berkinerja optimal															
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta	75,00	83,94	111,92	84,25	84,70	100,53	84,50	85,24	100,88	84,75	91,33	107,76	91,50	87,79	95,95
SK 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	74,70	91,10	77,00	80,50	104,55	82,00	85,27	103,99	87,00	86,28	99,17	88,00	91,24	103,68
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal	1,51	2,08	137,75	2,00	2,48	124,00	2,25	2,88	128,00	2,50	3,00	120,00	3,00	3,60	120,00
SK 11: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel															
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakarta	90,00	89,26	99,18	91,90	86,00	93,58	92,50	91,84	99,29	93,70	92,50	98,72	89,90	91,59	101,88
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													96,03	100,00	104,13
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													86,00	98,53	114,57
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri													60,00	68,68	114,47

(Sumber: Laporan Kinerja BPOM 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024)

Pada periode RPJMN 2020-2024, nilai kinerja BBPOM di Jakarta meningkat secara konsisten. Terlihat penurunan pada Tahun 2021 dikarenakan terdapat revaluasi renstra sehingga target Indikator Kinerja Utama berubah dengan mayoritas target meningkat. Hal ini menyebabkan capaian kinerja terlihat menurun walaupun nilai realisasi kinerja naik. Sejak ditetapkan target baru pada Tahun 2021, capaian kinerja BBPOM di Jakarta terus mengalami peningkatan sebesar 3.97 semula 103.07 pada Tahun 2021 menjadi 107.04 pada tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.2 Nilai Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2020 - 2024.

Pengukuran kinerja BBPOM di Jakarta mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Terdapat beberapa highlight pada pengukuran kinerja BBPOM di Jakarta yang selaras dengan kegiatan prioritas BPOM selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Perizinan merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Terdapat pertumbuhan jumlah permohonan izin edar produk obat dan makanan yang disetujui oleh Badan

POM dengan total 725.447 permohonan selama periode tahun 2020-triwulan III 2024. BBPOM di Jakarta berperan dalam memberikan rekomendasi pengajuan izin edar kepada Badan POM. Peningkatan ini merupakan dampak dari berbagai inovasi yang dilakukan BBPOM di Jakarta diantaranya simplifikasi dan percepatan *timeline* layanan, elektronisasi proses sertifikasi dan rekomendasi, pengembangan media digital untuk pelayanan konsultasi registrasi, integrasi aplikasi registrasi dengan OSS-RBA, dan intensifikasi penyelesaian CAPA untuk mempercepat rekomendasi.

2. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi sebesar 10.450 menunjukkan tren yang meningkat sesuai dengan pedoman sampling yang telah disusun oleh Badan POM
3. Implementasi *Grand Design* (GD) penguatan laboratorium yang terdiri dari tiga unsur strategis untuk membentuk Laboratorium POM yang tangguh yaitu (1) Laboratorium POM terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (*Integrated Laboratory Networking*); (2) Laboratorium didukung dengan konsep laboratorium digital (*Digitized Laboratory*); dan (3) Laboratorium menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan melalui konsep laboratorium hijau (*Green Laboratory*). Hal ini dituangkan BBPOM di Jakarta dengan berperan aktif sebagai anggota regionalisasi yang mendapat apresiasi sebagai Anggota Region Terbaik Kedua Tahun 2024. Selain itu, melalui program Agen Perubahan, inovasi laboratorium seperti pencatatan bahan persediaan secara digital serta penggunaan lembar catatan pengujian digital turut mendukung terselenggaranya *Digitized Laboratory*. Prinsip keberlanjutan di laboratorium dikembangkan melalui inovasi *Eco Office Lab* yang membawa BBPOM di Jakarta sebagai Juara Umum dan Juara Inovasi pada Lomba *Green Laboratory Nasional* yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Tahun 2025.
4. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BPOM berkolaborasi dengan

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi *e-commerce*, dalam hal ini idEA (*Indonesian E-commerce Association*). BBPOM di Jakarta secara aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai marketplace untuk mempermudah koordinasi pengawasan dan telah melakukan patroli dan melakukan takedown untuk akun yang melanggar ketentuan peredaran Obat dan Makanan.

5. BBPOM di Jakarta melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 475 UMKM yang menghasilkan 2.571 izin edar.
6. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BBPOM di Jakarta melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. Desember 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan total 72.834 orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
7. Revitalisasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial pada bidang Pengawasan Obat dan Makanan

BBPOM di Jakarta memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

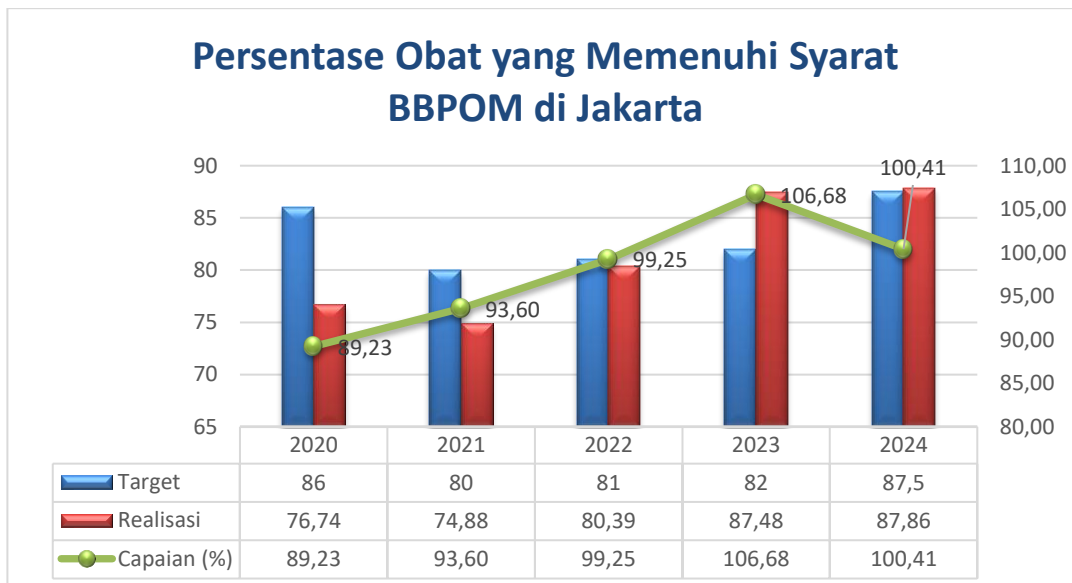
1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah di Jakarta

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. SS1 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 99,40% di tahun 2020; 95,60% di tahun 2021; 96,55% di tahun 2022; 99,72% di tahun 2023;

dan 99,52% di tahun 2024. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM DI Jakarta di Jakarta merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat
- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- 5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat



Gambar 1.2 Tren Persentase Obat yang Memenuhi syarat
Tahun 2020-2024

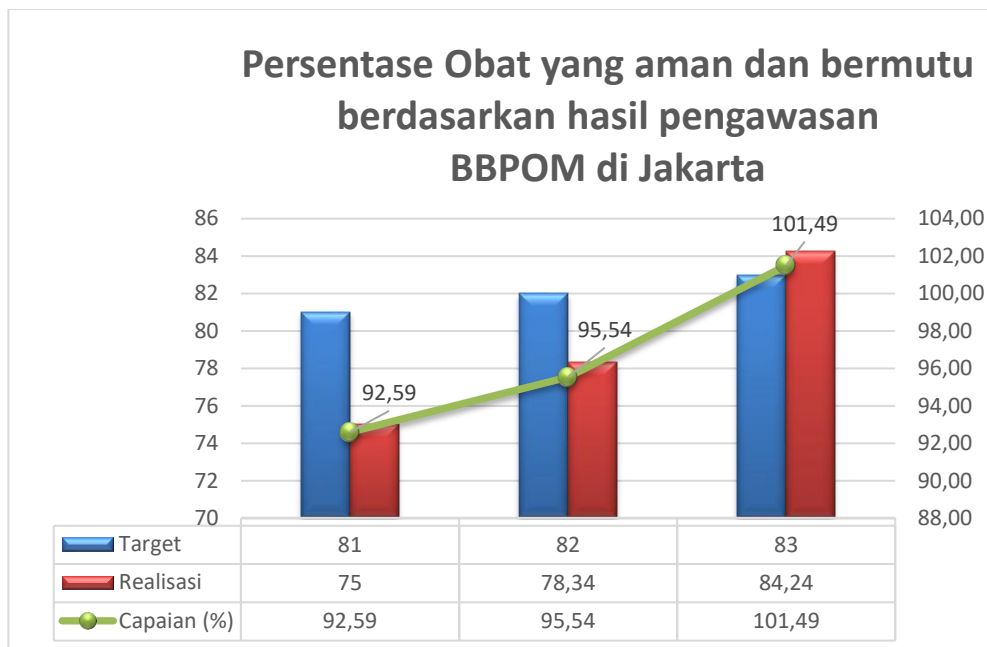
Target presentase obat yang memenuhi syarat mengalami beberapa perubahan pada Rencana Strategis. Pada awal RPJMN ditetapkan, target tahun 2024 ditetapkan cukup tinggi sebesar 90. Berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya, Balai Besar POM di Jakarta belum memenuhi target, maka target ini dinilai tidak mungkin dapat dicapai, sehingga dilakukan penyesuaian target pada reviu renstra tahun 2021 menjadi 83. Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024 target presentase obat yang memenuhi syarat dinaikkan menjadi 87,5. Perhitungan capaian perubahan target Tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023. Di

tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 6,27% dari tahun sebelumnya menjadi 100,41% Turunnya capaian persentase obat yang memenuhi syarat setiap tahunnya dari tahun 2020-2024 juga diiringi dengan semakin naiknya target yang ditetapkan dari tahun 2020-2024, terutama perubahan target di tahun.



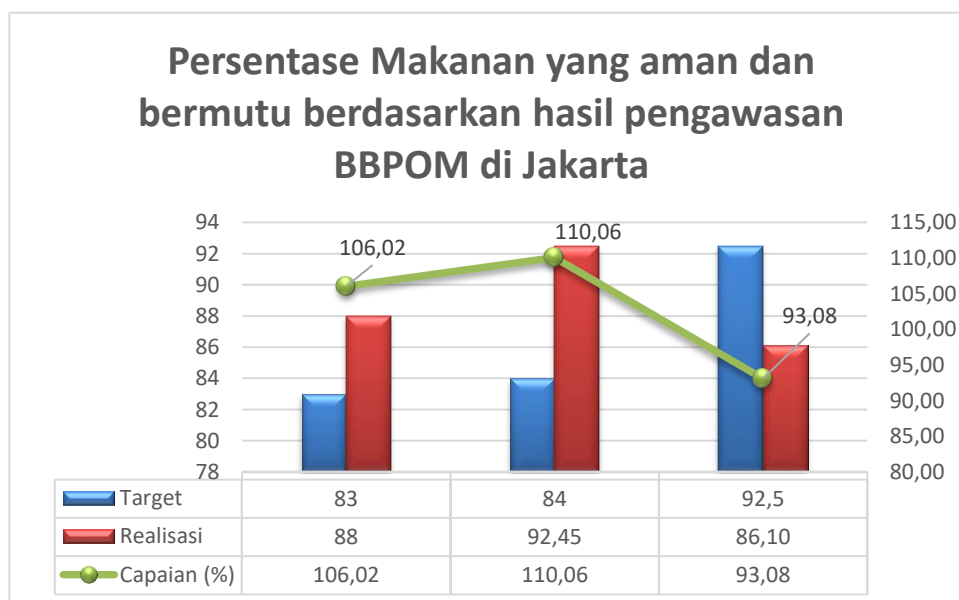
Gambar 1.3 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi syarat Tahun 2020-2024

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebesar 92,73% masih di bawah target jangka menengah 2024 yaitu 96,50% dan persentase capaian makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2024



Gambar 1.4 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Capaian presentase obat yang aman dan bermutu cukup fluktuatif, namun mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024

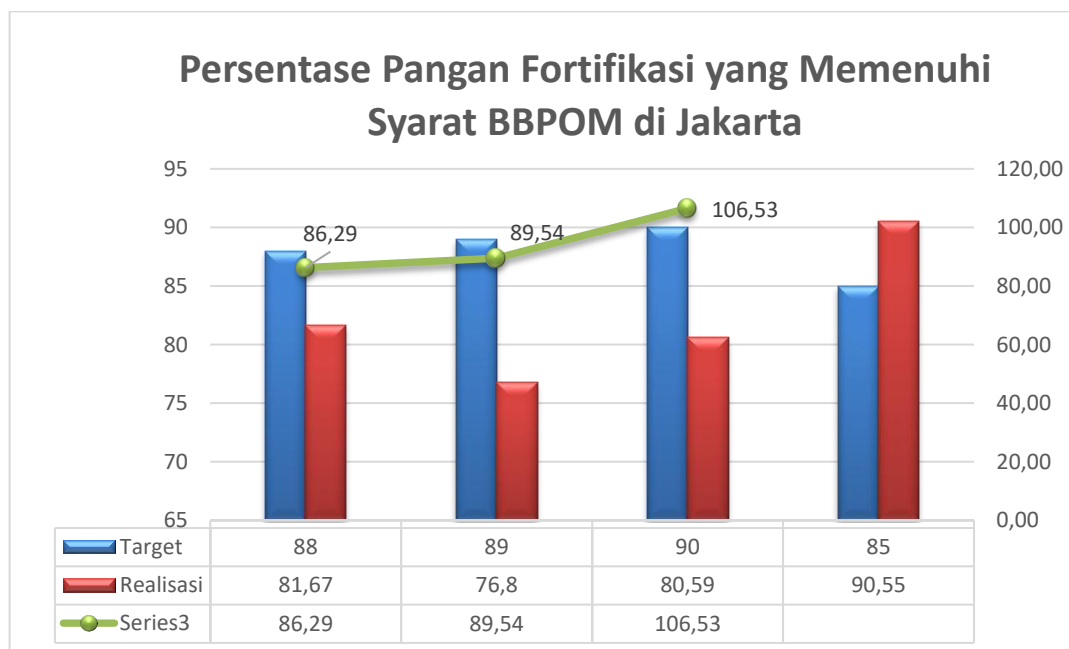


Gambar 1.5 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020-2024

Data realisasi tahun pertama penetapan IKU pada 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara *targeted*.

Capaian pada tahun 2020 sebesar 103,53% mengalami peningkatan menjadi 117,20% pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 dan 2023 mengalami fluktuasi masing-masing menjadi 106,02%;110,06. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 16,98% dari tahun sebelumnya menjadi 93,08% dengan kriteria **“cukup”**. Turunnya capaian makanan aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 ini juga diiringi dengan meningkatnya target tahunan secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya menjadi 92,5%. Realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebesar 86,10% masih dibawah target jangka menengah 2024 yaitu 92,50%.



Gambar 1.6 Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
Tahun 2020-2024

Mulai ditetapkan di tahun 2021 dan mempunyai target berbeda setiap tahunnya. Capaian indikator kinerja pada tahun 2024 sebesar 106,53% sudah melebihi target tahunan yang telah ditetapkan. Realisasi indikator kinerja tahun 2024 Balai Besar POM di Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2021-2024. Dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 85%, Balai besar POM di Jakarta sudah

melebihi target jangka menengah yang ditetapkan

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu:

- 1) Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk TMS di luar DKI Jakarta diharapkan dapat mengefektifkan proses pengawasan
- 3) BBPOM DI Jakarta di Jakarta berupaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja laboratorium BBPOM DI Jakarta di Jakarta di tahun mendatang, perlu dilakukan berbagai upaya strategis, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, pemeliharaan serta kalibrasi peralatan untuk memastikan akurasi hasil uji, serta penerapan sistem manajemen mutu sesuai standar internasional seperti ISO/IEC 17025

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Kegiatan ini terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan hasil meningkat (on the track) dikarenakan perkembangan kinerjanya cenderung meningkat dengan nilai perkembangan kinerjanya $\geq 100\%$. Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja dengan upaya sebagai berikut:



Gambar 1.7 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2020-2024

Realisasi indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020-2024 berturut-turut sebesar 82,53 pada tahun 2020; 87,12 pada tahun 2021; 91,04 pada tahun 2022; 91,89 pada tahun 2023; dan 92 pada tahun 2024. Selama tahun 2022-2023, nilai indeks ini merupakan tertinggi secara nasional.

Apabila dibandingkan dengan target, realisasi kinerja indeks kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020-2024 juga telah tercapai dan melampaui target secara berturut-turut sebesar 110,04%; 102,49%; 104,64%; 103,25%; dan 100,11%.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian SK2 yaitu:

- 1) Melaksanakan Lokus KIE Stunting di kabupaten yang belum pernah melaksanakan KIE secara luring ataupun daerah yang belum pernah di intervensi;
- 2) Menambah ragam KIE dan inisatif KIE serta pemanfaatan media sosial sebagai media publikasi yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau seluruh wilayah; dan 3) Melakukan revisi anggaran dan optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaan KIE dan publikasi sampai keseluruhan kabupaten /kota.

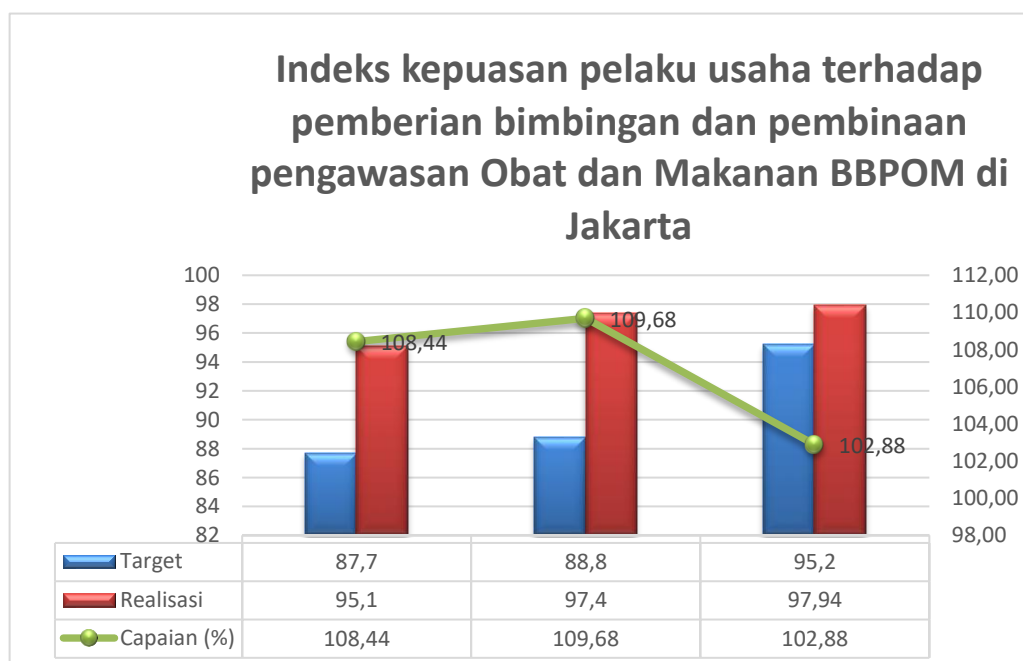
3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. SS3 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 101,92% di tahun 2020; 101,59% di tahun 2021; 106,21% di tahun 2022; 104,96% di tahun 2023; dan 103,54% di tahun 2024.

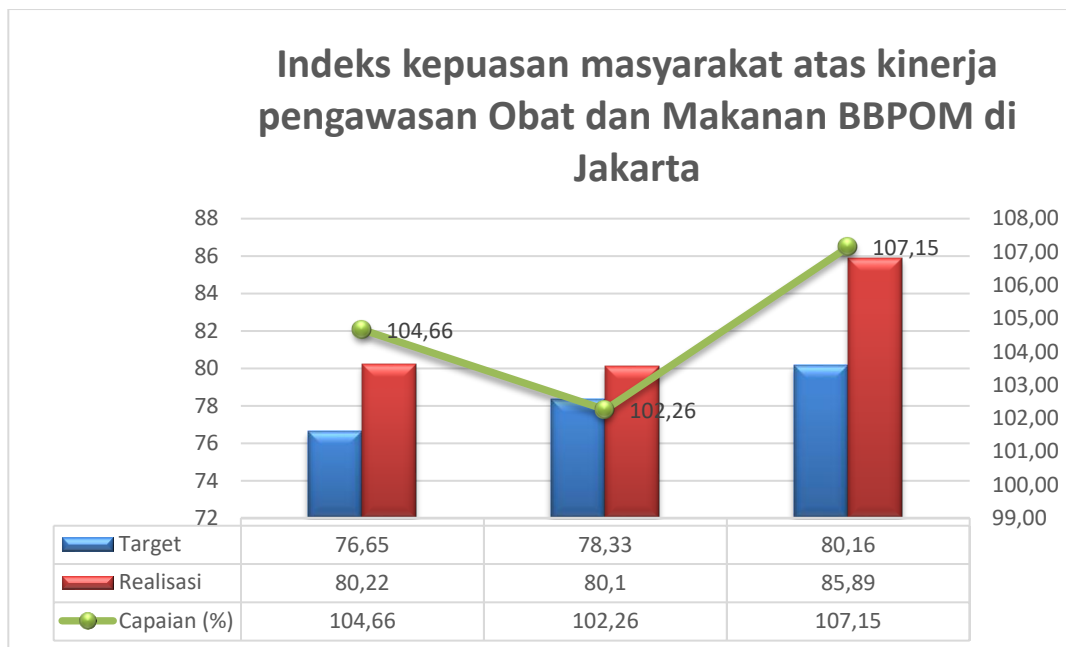
Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Jakarta



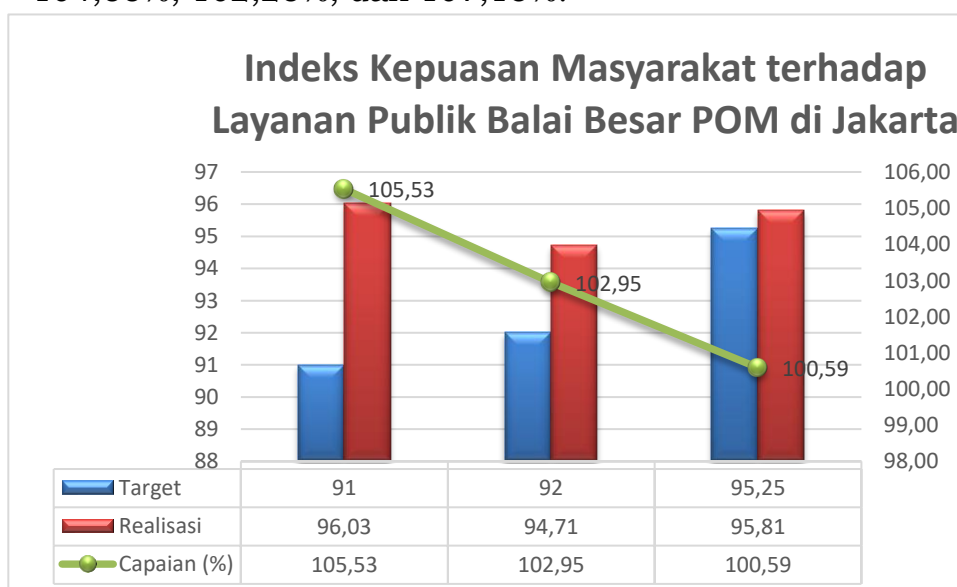
Gambar 1.8 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan. Capaian tahun 2021 sebesar 100,12 % jika dibanding dengan tahun 2020 sebesar 104,30% mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kenaikan target yang cukup signifikan yaitu dari 82 pada tahun 2020 menjadi 86,6 di tahun 2021 jika dibandingkan kenaikan target dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan tahun 2022 ke tahun 2023 yang naik sebesar 1,1. Namun realisasi dari tahun 2021 sebesar 86,70 mengalami kenaikan jika dibanding realisasi tahun 2020 sebesar 85,53. Demikian juga capaian tahun 2024 sebesar 102,88 % mengalami penurunan jika dibanding capaian tahun 2023 sebesar 109,68 %. Namun realisasi tahun 2024 sebesar 97,94 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 97,4, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan target dari tahun 2023 sebesar 88,8 menjadi 95,2 di tahun 2024. Target realisasai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 pada awal RPJMN ditetapkan sebesar 89,9 dan mengalami perubahan menjadi 95,2 karena dinilai capaian pada tahun 2023 cukup besar yaitu 109,68%, sehingga dengan kenaikan target tersebut realisasi tahun 2024 diharapkan tetap dapat tercapai.



Gambar 1.9 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sepanjang tahun 2020-2024 secara berturut-turut adalah 73,3 (Cukup Puas); 73,80 (Cukup Puas); 80,22 (Puas); 80,10 (Puas); dan 85,89 (Puas). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 memiliki nilai dan peningkatan tertinggi. Capaian kinerja yang diperoleh sepanjang tahun 2020-2024 secara berturut-turut 101,81%; 98,43%; 104,66%; 102,26%; dan 107,15%.



Gambar 1.10 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 secara berturut-turut sebesar 88,19 (Baik); 95,61 (Sangat Baik); 96,03 (Sangat Baik); 94,71 (Sangat Baik); dan 95,81 (Sangat Baik). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai indeks tahun 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Capaian kinerja indeks secara berturut-turut dari tahun 2020-2024 adalah 99,65%; 106,23%; 105,53%; 102,95%; dan 100,15

Berdasarkan hasil analisis BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan public relation dan publikasi berbagai aktifitas pengawasan obat dan makanan melalui berbagai media;
- 2) Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi;
- 3) Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial (bagi bagi komisi);
- 4) Terus melakukan sosialisasi melalui KIE dan media sosial untuk memberi informasi lebih luas kepada masyarakat terkait semua jenis layanan yang diberikan BBPOM di Jakarta , termasuk waktu pelayanan, persyaratan, dan biaya/tarif dari setiap layanan; dan
- 5) meningkatkan kompetensi petugas layanan untuk dapat melayani semua customer, termasuk kelompok rentan.

Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu melakukan percepatan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut:

Pengisian survey untuk peserta daring dan luring agar dibuat bersamaan setelah panitia memberikan arahan cara pengisian survey kepada seluruh peserta bimbingan agar memiliki persepsi yang sama terhadap pertanyaan survey.

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

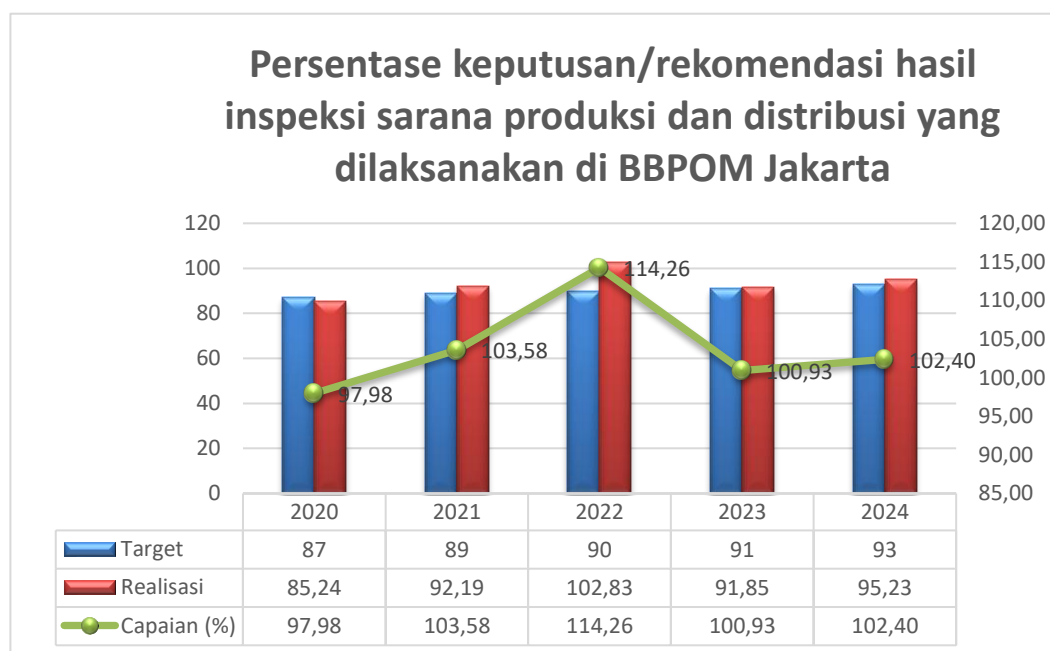
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah BBPOM di Jakarta

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di

Jakarta dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut:

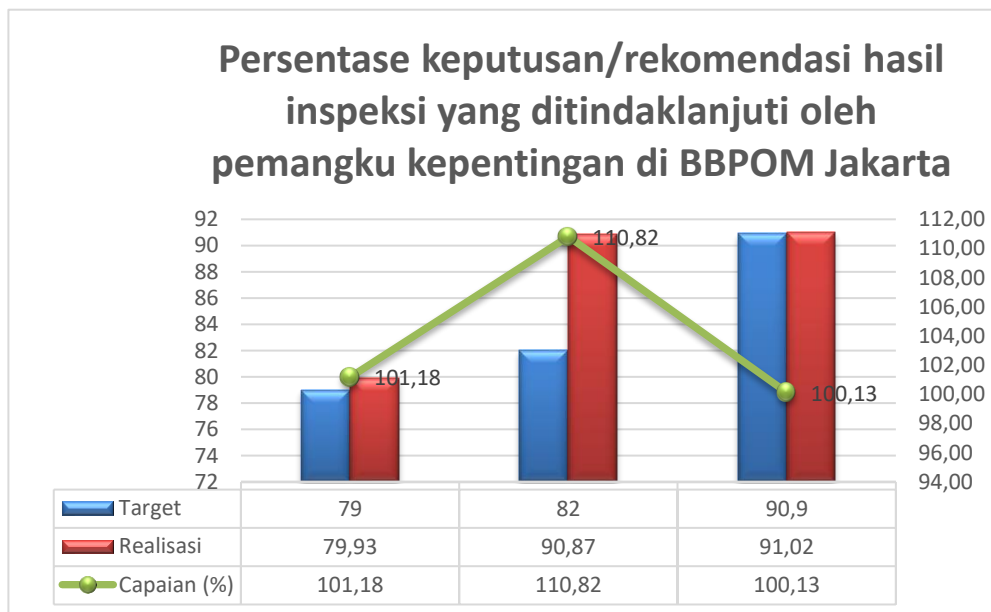
- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
- 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 6) Indeks Pelayanan Publik
- 7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
- 8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Sasaran Kegiatan ini terdiri dari 8 indikator kinerja yang dianalisis, untuk indikator Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota tidak dilakukan analisis dikarenakan indikator tersebut baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan realisasi kinerjanya dengan tahun periode renstra.



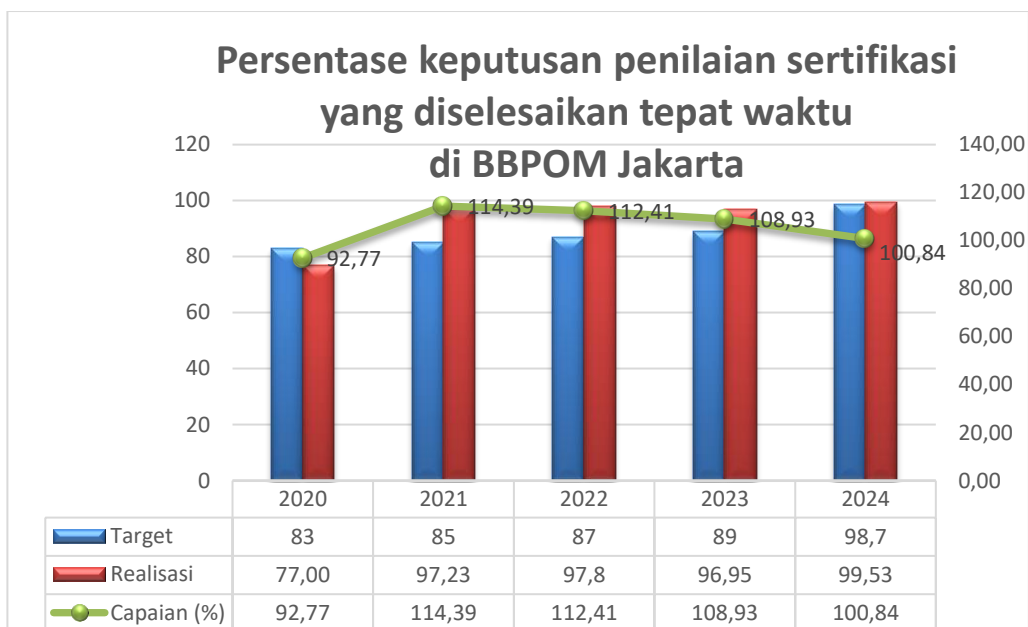
Gambar 1.11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020-2023 terjadi penurunan realisasi indikator, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2023 namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2024. Terjadi kenaikan target setiap tahun, namun BBPOM Jakarta selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.



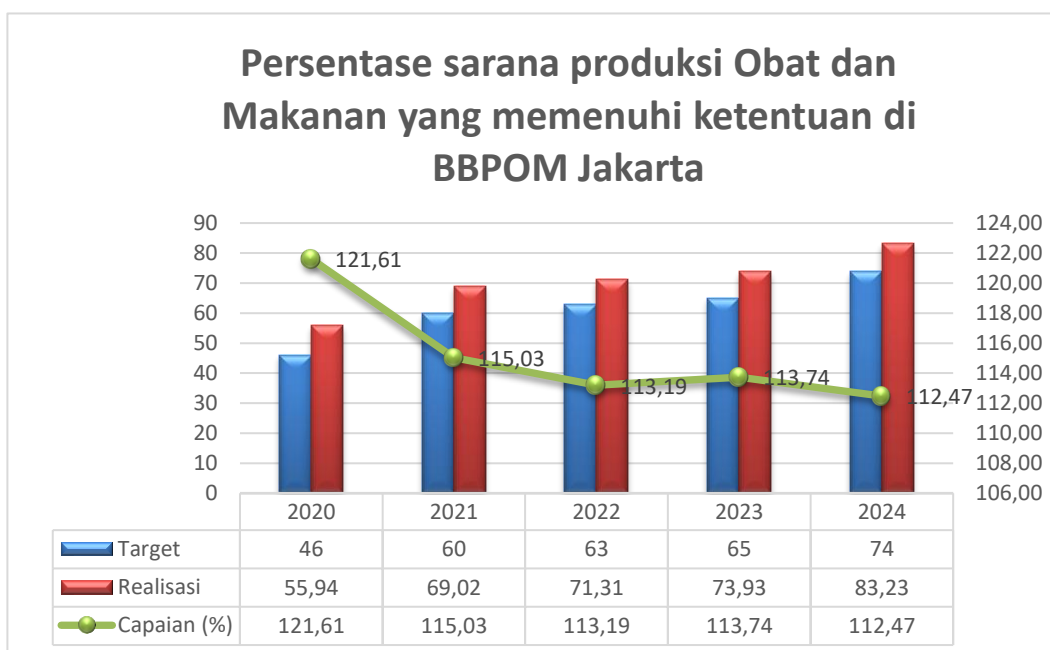
Gambar 1.12 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020-2023 terjadi penurunan realisasi indikator, kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2023 namun kembali terjadi penurunan pada tahun 2024. Terjadi kenaikan target setiap tahun, namun BBPOM Jakarta selalu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.



Gambar 1.13 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020-2024

Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu mengalami kenaikan, sedangkan capaian tahun 2020 ke 2021 mengalami kenaikan yang kemudian mengalami penurunan sampai pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kenaikan target setiap tahun dan pada tahun 2024 kenaikan target sangat signifikan.



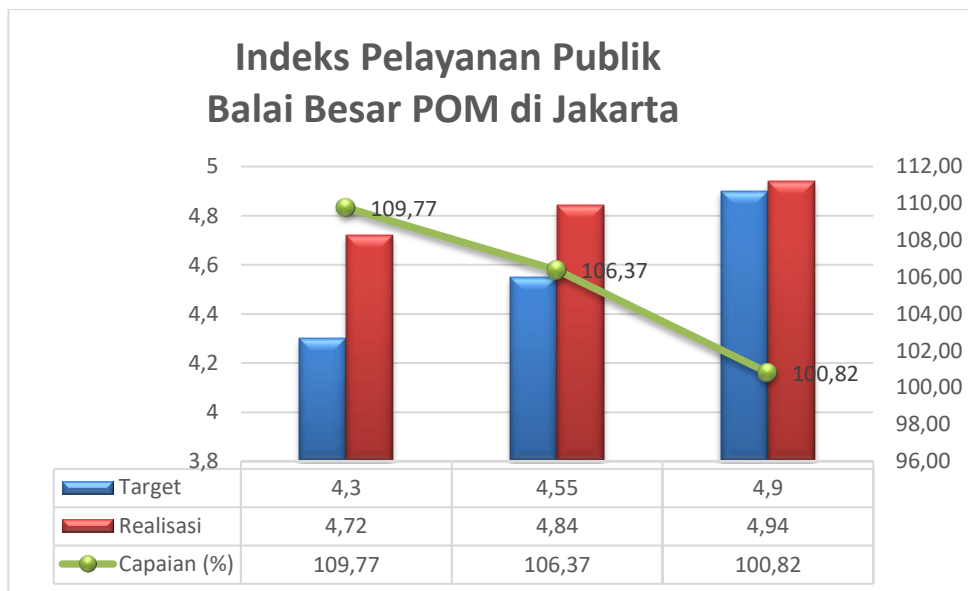
Gambar 1.14 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut, selama tahun 2020-2024 terjadi kenaikan target, namun demikian BBPOM Jakarta selalu berhasil melampaui target. Realisasi indikator meningkat dari tahun 2020-2024. Capaian cenderung menurun, namun hal ini tidak mencerminkan penurunan kinerja karena sebenarnya target meningkat dan realisasi juga meningkat



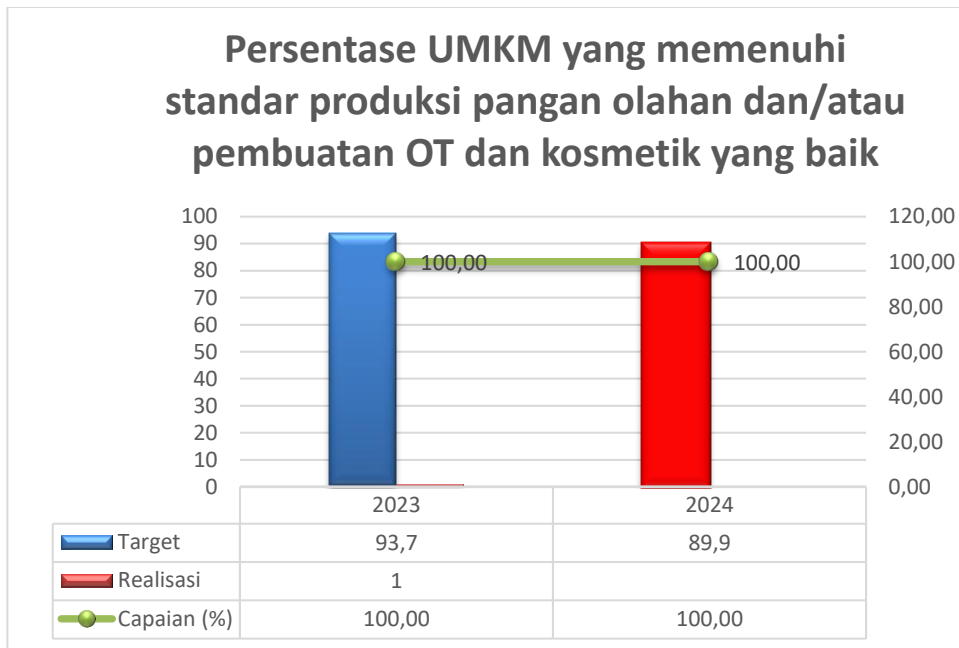
Gambar 1.15 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020-2024

Berdasarkan grafik tersebut, selama tahun 2020-2024 terjadi kenaikan target, namun demikian BBPOM Jakarta selalu berhasil melampaui target. Realisasi indikator meningkat dari tahun 2020-2024. Capaian cenderung menurun, namun hal ini tidak mencerminkan penurunan kinerja karena sebenarnya target meningkat dan realisasi juga meningkat



Gambar 1.16 Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta 2020-2024

Indeks pelayanan publik (IPP) di lingkup Balai Besar POM di Jakarta menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2020-2024. Tahun 2020, nilai IPP diperoleh sebesar 4,00 (Baik), kemudian meningkat menjadi 4,54 pada tahun 2021, 4,72 (Pelayanan Prima) pada tahun 2022, 4,84 pada tahun 2023, dan 4,94 pada tahun 2024. Predikat pelayanan prima telah diperoleh sejak tahun 2021-2024 dengan nilai indeks yang terus meningkat, sehingga pada periode akhir RPJMN 2024 diperoleh nilai indeks tertinggi. Apabila dibandingkan dengan target capaian indeks telah melampaui dari tahun 2020-2024 berturut-turut sebesar 113,96%, 108,10%, 109,77%, 106,37%, dan 100,82%.



Gambar 1.17 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik 2020-2024

Indikator kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik baru dinilai tahun 2022. Capaian tahun 2024 jika dibanding tahun 2022 mengalami penurunan dan jika dibanding tahun 2023 tetap. Hal tersebut terjadi karena tahun 2024 mengalami kenaikan target yang cukup signifikan yaitu dari 77% pada tahun 2022, 79% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024.



Gambar 1.18. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Capaian indikator ini belum bisa dibandingkan terhadap tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK4 yaitu:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Keterlibatan Tim Pembinaan pengawasan obat dan makanan
- 2) Implementasi inovasi pelayanan publik Jak Prima yang mengintegrasikan layanan publik seperti None Sisi, Laksa Betawi, Sultan Betawi, LAILA, Senayan, dan Kerling Jakarta. Dengan adanya inovasi ini, memudahkan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses pelayanan publik di Jakarta.
- 3) Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh di Jakarta kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke both di Jakarta yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan
- 4) Melakukan pelatihan untuk refreshing Jak-Officer sebagai perpanjangan tangan Balai Besar POM di Jakarta dalam pelayanan publik sehingga membantu Balai Besar POM di Jakarta menerangkan kepada pelaku usaha persyaratan perijinan BBPOM di Jakarta. Jak-Officer adalah tenaga

pendamping kewirausahaan, Yenada CRO PTSP dan AJIB (Antar Jemput Ijin Bermotor).

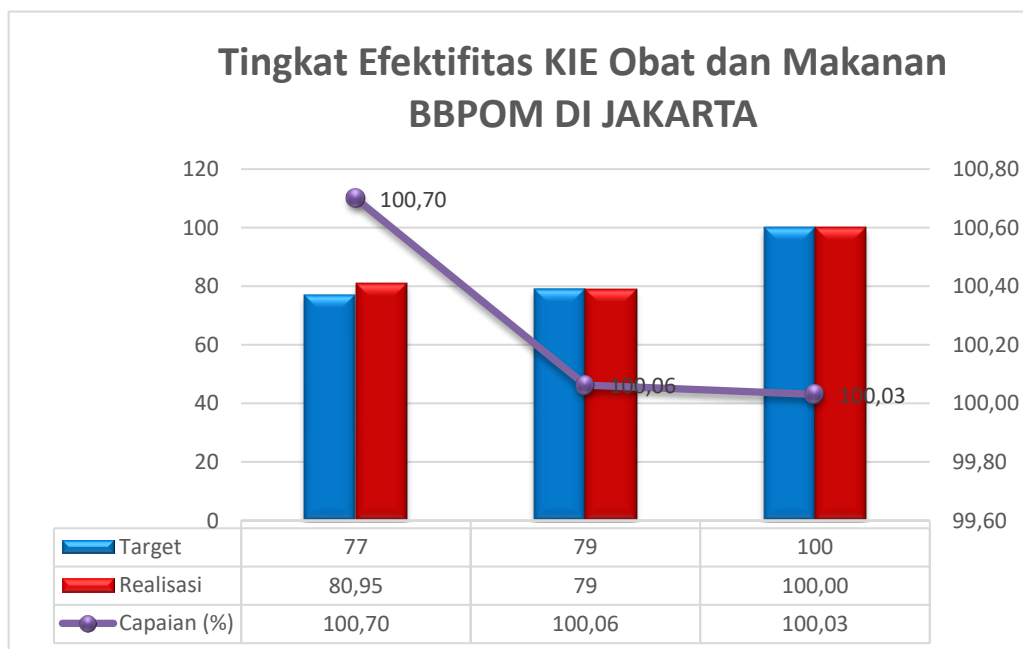
5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
- 2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- 3) Jumlah desa pangan aman
- 4) Jumlah pasar aman berbasis komunitas

SK5 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu % di tahun 2020; % di tahun 2021; % di tahun 2022; % di tahun 2023; dan % di tahun 2024.



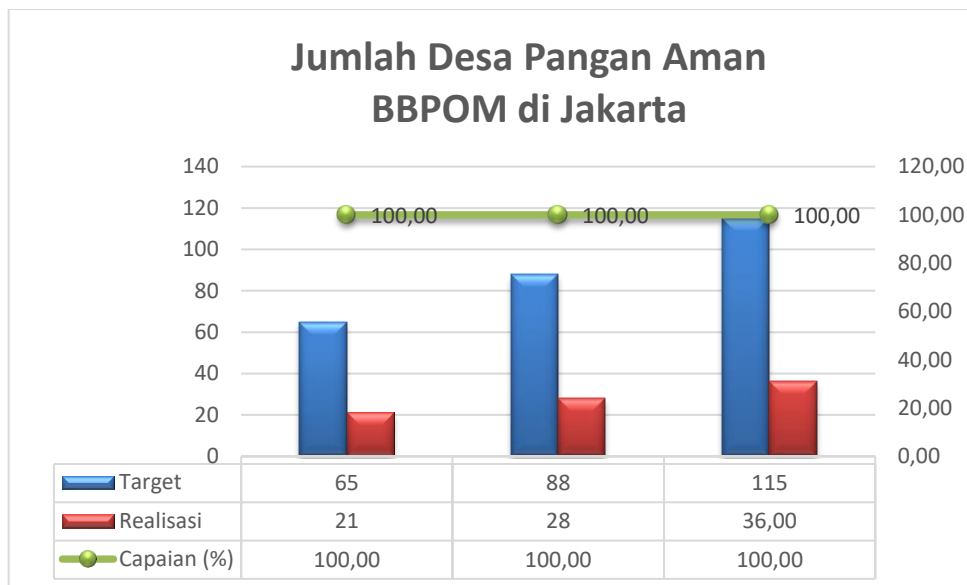
Gambar 1.19 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
Tahun 2020-2024

Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta terus meningkat pada periode tahun 2020-2024 secara berturut-turut sehingga pada akhir periode RPJMN, diperoleh indeks tertinggi.



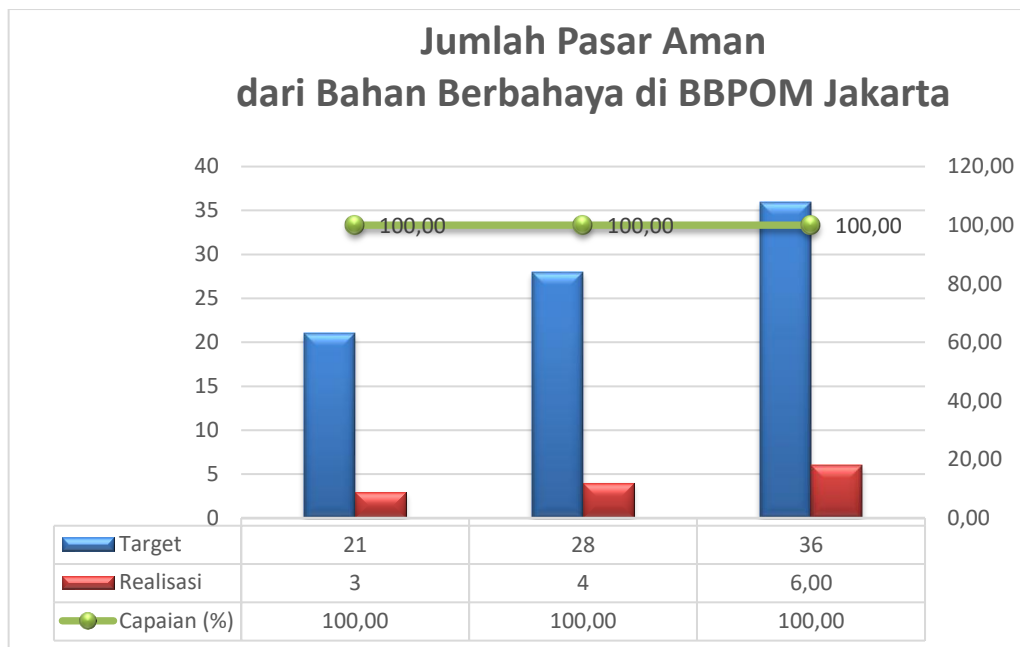
Gambar 1.20 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020-2024

PJAS aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 adalah sebanyak 115 sekolah. Pada tahun 2024 total capaian sekolah intervensi PJAS ama adalah 116 sekolah dengan rincian 12 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2020, kemudian bertambah 28 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga total 40 sekolah pada tahun 2021, bertambah sebanyak 25 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi 65 sekolah pada tahun 2022, bertambah 25 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi 88 sekolah pada tahun 2023, dan bertambah 26 sekolah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi 116 sekolah pada periode akhir RPJMN 2020-2024.



Gambar 1.21 Jumlah desa pangan aman Tahun 2020-2024

Desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 adalah sebanyak 36 kelurahan. Pada tahun 2020, capaian Desa Pangan Aman adalah sebanyak 5 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur, kemudian mengalami penambahan jumlah Desa pada tahun 2021 sebanyak 9 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga total 14 desa/kelurahan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi Desa Pangan Aman terhadap 7 desa/kelurahan lainnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga total pada 2022 ialah 21 kelurahan. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 7 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga total kelurahan intervensi adalah 28. Pada tahun 2024 dilakukan intervensi terhadap 8 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga total kelurahan intervensi 2020-2024 adalah 36 kelurahan. Dengan realisasi ini, diperoleh capaian kinerja sebesar 100.00%.



Gambar 1.22 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
Tahun 2020-2024

Pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pada renstra 2020-2024 ialah sebanyak 6 pasar. Pada tahun 2020, capaian Pasar Pangan Aman ialah sebanyak 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Timur, kemudian mengalami penambahan jumlah pasar pada tahun 2021 sebanyak 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga total 2 pasar pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dilakukan intervensi pasar terhadap 1 pasar lainnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan sehingga total pada 2022 ialah 3 pasar. Kemudian pada tahun 2023 telah dilakukan intervensi terhadap 1 pasar di Kota Administrasi Jakarta Utara sehingga total pasar intervensi sebanyak 4 pasar. Kemudian pada tahun 2024 dilakukan intervensi terhadap 2 pasar di Kota Administrasi Jakarta Barat sehingga total intervensi pasar 2020-2024 ialah 6 pasar

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait pengembangan kehumasan, publikasi informasi melalui media informasi kepada masyarakat dengan menciptakan konten yang relevan, bermanfaat, mudah dipahami, dan menarik minat Masyarakat.

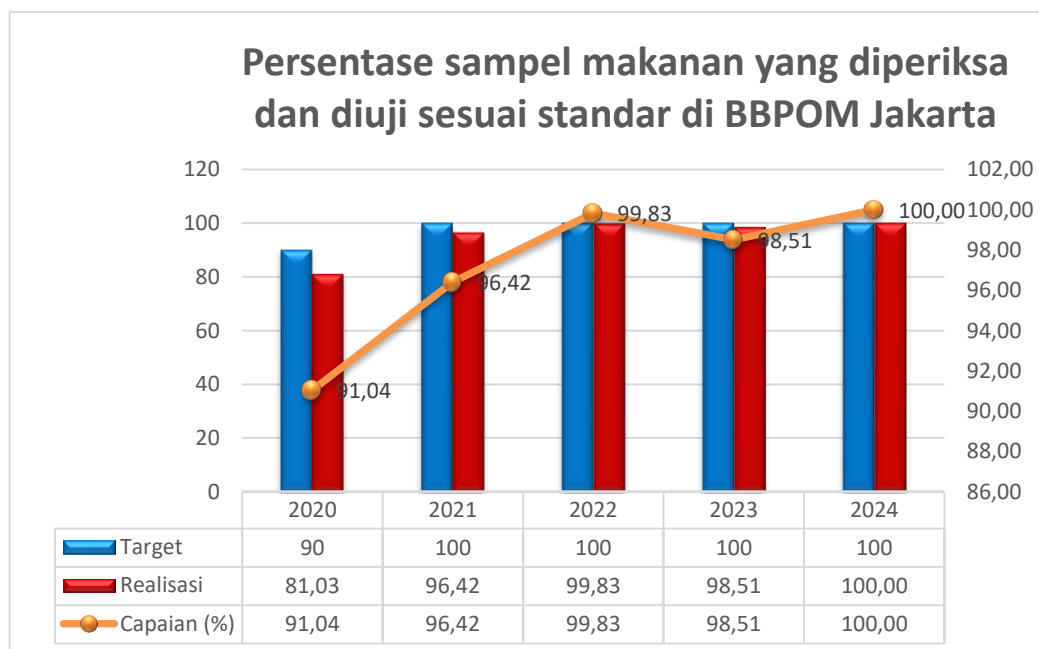
- 2) Optimalisasi pemanfaatan media sosial dan media digital dalam pemberian informasi dan KIE Obat dan Makanan serta implementasi inovasi Jak Konek.
- 3) Optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui forum komunikasi yang telah terbentuk sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah BBPOM di Jakarta

SK6 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 96,79% di tahun 2020; 93,64% di tahun 2021; 99,68% di tahun 2022; 99,26% di tahun 2023; dan 100% di tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini terdiri dari 2 indikator kinerja yang dianalisis, yaitu:

- 1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- 2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



Gambar 1.23 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020-2024

Capaian IKU Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standara pada tahun 2020 sebesar 91,04% (akan tercapai), tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 96,42%

(akan tercapai) dan tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 99,83% (akan tercapai). Peningkatan persentase capaian menunjukkan sampel yang sesuai standar semakin bertambah. Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 98,51% (akan tercapai). Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 120% dengan kriteria “sangat baik”.

Realisasi indikator kinerja tahun 2024 sebesar 120% sudah melebihi target jangka menengah 2024 yaitu 100%. Dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir tahun 2024 dalam periode tahun 2020-2024 sebesar 120% dengan kriteria sangat baik.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu:

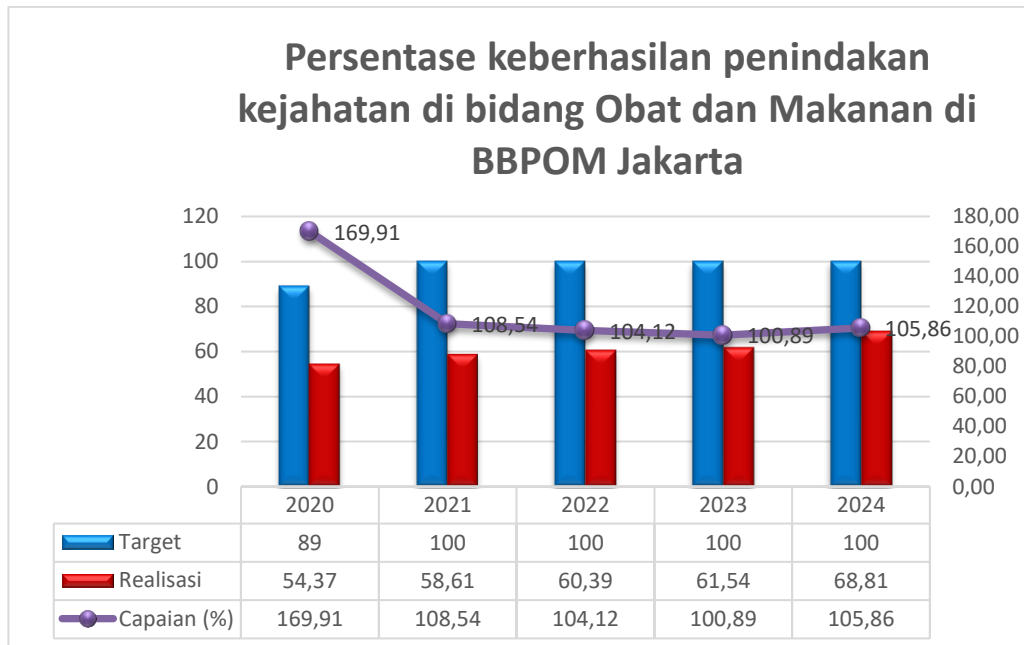
- 1) Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- 2) Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat, sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah. SK7 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian

kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 106,91% di tahun 2020; 108,54% di tahun 2021; 104,12% di tahun 2022; 100,89% di tahun 2023; dan 105,86% di tahun 2024.



Gambar 1.24 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibanding dengan tahun 2023.

Pencapaian kinerja dari tim kerja Penindakan ini terwujud sebagai hasil dari penyelesaian berkas perkara tunggakan dan penanganan perkara selama tahun 2020 hingga 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS6 yaitu:

- 1) Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara kepada UPT BBPOM DI Jakarta ;
- 2) Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti (i) FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor); (ii) Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; (iii) Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BBPOM di Jakarta ;

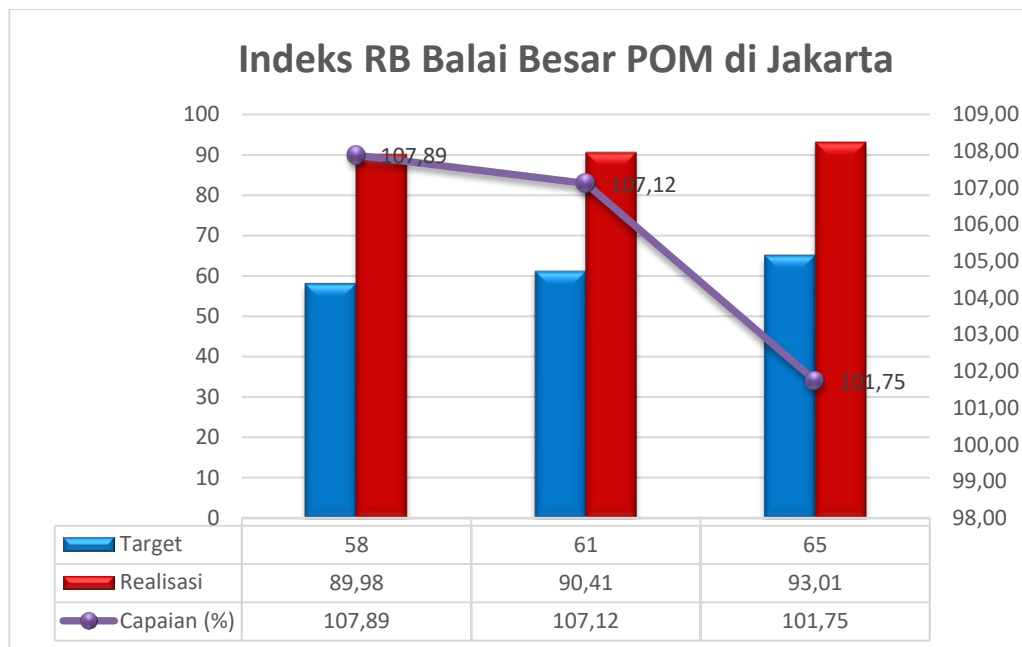
- 3) Penambahan jumlah PPNS BBPOM di Jakarta dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.
- 4) Penggalangan stakeholder sebagai upaya cegah tangkal menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya kejahatan obat dan makanan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penggalangan terhadap berbagai kalangan. Lintas sektor yang dapat dijadikan sasaran penggalangan antara lain K/L yang terkait kegiatan pengawasan BBPOM di Jakarta, pelaku usaha termasuk pelaku usaha daring, komunitas, dan organisasi profesi. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki BBPOM di Jakarta dapat diatasi dengan pelaksanaan penggalangan secara intensif.

8. Sasaran Kegiatan (SK 8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

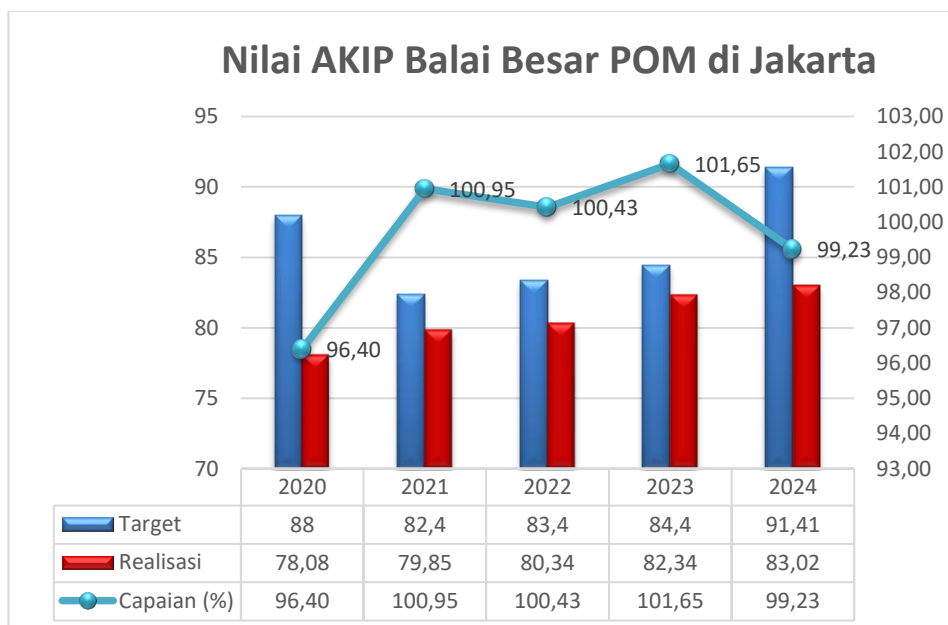
Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jakarta. SS8 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 93,75% di tahun 2020; 100,41% di tahun 2021; 104,16% di tahun 2022; 104,39% di tahun 2023; dan 101,07% di tahun 2024. Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator:

- 1) Nilai RB BBPOM di Jakarta;
- 2) Nilai AKIP BBPOM di Jakarta ; dan
- 3) Nilai Pengelolaan Kearsipan



Gambar 1.25 Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Jakarta selama kurun waktu lima tahun terakhir periode renstra tidak menunjukkan garis linier (fluktuatif) yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022 capaian kinerja naik, selanjutnya pada tahun 2022 sampai dengan 2024 capaian kinerja menurun. Pada capaian tahun 2020 dan tahun 2021 dengan capaian masih cukup. Pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian kinerja sangat baik, selanjutnya pada tahun 2024 capaian menurun dikarenakan meningkatnya target secara signifikan. Namun nilai realisasi meningkat sebesar 2.6 poin dengan Nilai Akhir pada kriteri sangat baik. Hal ini disebabkan pemenuhan dokumen dan persyaratan pembangunan ZI sebagai data dukung RB telah lebih optimal serta didukung inovasi yang mendukung Zona Integritas serta capaian kinerja.



Gambar 1.26 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Tren realisasi Nilai AKIP sejak awal RPJMN pada Tahun 2020 semakin meningkat secara signifikan semula 78.08 pada Tahun 2020 menjadi 83.02 pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen Balai Besar POM Jakarta untuk selalu meningkatkan kapabilitas AKIP dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja untuk mendukung Indikator AKIP Badan POM pada sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama Badan POM yang efektif”. Perbandingan capaian tahun 2020-2024 menunjukkan hasil adanya sedikit penurunan pada Tahun 2024 dengan ditetapkannya target yang cukup tinggi sebesar 83.66. Peningkatan target pada Tahun 2024 terjadi pada hampir semua Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan baseline capaian pada Tahun 2023.



Gambar 1.27 Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Jakarta
Tahun 2020-2024

Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 sebesar 95,49 dengan capaian 102,22 kategori Baik. Nilai tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan nilai pengelolaan kearsipan merupakan indikator kinerja utama baru di tahun 2024.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu:

- 1) Memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama;
- 2) Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada LHE SAKIP dari KemenPANRB;
- 3) Monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat;
- 4) Memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah;
- 5) Melakukan review dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional;
- 6) Penjajakan kerja sama dengan mitra kerja sama baru, implementasi kerja sama dengan mitra yang telah memiliki dokumen kerja sama, monitoring dan evaluasi kerja sama.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM BBPOM DI JAKARTA yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan dua indikator yaitu: Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jakarta. SS9 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 111,92% di tahun 2020; 100,53% di tahun 2021; 100,88% di tahun 2022; 107,28% di tahun 2023; dan 95,95% di tahun 2024.



Gambar 1.28 Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di
Jakarta
Tahun 2020- 2024

Target pada tahun 2024 adalah 91,5 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dari tahun 2020 hingga 2023, hal ini dikarenakan realisasi indeks profesionalitas ASN setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 dan pada tahun 2023 persentase capaian indeks profesionalitas mencapai 107,28%. Realisasi indeks profesionalitas ASN pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 87,79 dengan capaian 95,95%. Penurunan nilai ini dikarenakan perubahan perhitungan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, diantaranya :

1. Dimensi kualifikasi, dimana pada tahun tahun sebelumnya perhitungan kualifikasi didasarkan pada indikator jenjang Pendidikan formal yang dicapai PNS dengan bobot nilai sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S-3 memperoleh nilai maksimal yaitu 25.
 - b. Pendidikan S-2 memperoleh nilai 20.
 - c. Pendidikan S-1 memperoleh nilai 15.
 - d. Pendidikan D-3 memperoleh nilai 10.
 - e. Pendidikan D-1/SLTA memperoleh nilai 5.
 - f. Pendidikan dibawah SLTA memperoleh nilai 1.

Dalam hal ini apabila pegawai meningkatkan kualifikasi Pendidikan Formal setingkat lebih tinggi melalui tugas belajar maka dapat meningkatkan nilai pada Dimensi Kualifikasi.

Perubahan perhitungan dimensi kualifikasi tahun 2024, mempertimbangkan syarat jabatan yang saat ini diduduki oleh pegawai dengan rincian berikut:

- a. Nilai 25, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/diatas persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.
- b. Nilai 20, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.
- c. Nilai 10, apabila memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki.

Berdasarkan data perhitungan IP ASN Balai Besar POM di Jakarta, rata-rata nilai untuk dimensi kualifikasi pada tahun 2024 adalah 22,75. Belum maksimalnya nilai pada dimensi kualifikasi ini dikarenakan masih terdapat 1 (satu) orang pegawai yang Pendidikan terakhir saat ini di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki. Sebanyak 63 pegawai memperoleh nilai maksimal (25) pada dimensi kualifikasi ini dimana, Pendidikan formal terakhir yang diperoleh Nilai pada dimensi kualifikasi sebanyak lebih tinggi/diatas persyaratan jabatan yang diduduki dan sebanyak 48 orang yang memperoleh nilai 20, dimana ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki.

Perbedaan hasil perhitungan pada dimensi kualifikasi tahun 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 21,31 dan 22,75 mengalami peningkatan nilai.

2. Dimensi Kompetensi, dimana pada tahun sebelumnya perhitungan dimensi kompetensi didasarkan pada riwayat pengembangan kompetensi yaitu Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Ketercapaian Pengembangan Kompetensi 20 JP. Sedangkan Pada tahun 2024, dimensi kompetensi dengan bobot nilai 40 memperhitungkan hasil penilaian kinerja selain dari riwayat pengembangan kompetensi. Hasil penilaian kinerja yang dimasukkan dalam dimensi kompetensi memiliki bobot dasar sebagai berikut:
 - a. Predikat Kinerja Sangat Baik, memperoleh nilai 25
 - b. Predikat Kinerja Baik, memperoleh nilai 20
 - c. Predikat Kinerja Butuh Perbaikan, memperoleh nilai 15

d. Predikat Kinerja Kurang (Misconduct), memperoleh nilai 10

e. Predikat Kinerja Sangat Kurang, memperoleh nilai 5

Perhitungan komponen pengembangan kompetensi dengan menyumbang bobot maksimal 15 pada Dimensi Kompetensi adalah sebagai berikut:

- a. Bagi JPT/Administrator/Pengawas, Total Nilai 15, apabila telah lulus mengikuti diklat kepemimpinan mendapatkan nilai **10**, dan apabila telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setahun mendapatkan nilai **5**;
- b. Bagi Pejabat Fungsional, Total Nilai 15, apabila telah lulus mengikuti diklat fungsional mendapatkan nilai **10**, dan apabila telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setahun mendapatkan nilai **5**;
- c. Bagi Pejabat Fungsional, Total Nilai 15, apabila telah lulus mengikuti diklat fungsional mendapatkan nilai **10**, dan apabila telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JP setahun mendapatkan nilai **5**;

Berdasarkan data perhitungan IP ASN Balai Besar POM di Jakarta, rata-rata nilai untuk dimensi kompetensi pada tahun 2024 adalah 35,04. Belum maksimalnya nilai pada dimensi kompetensi ini disebabkan karena pada tahun 2024, nilai prestasi kinerja yang digunakan adalah nilai kinerja tahun 2023, dimana seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta mendapatkan predikat kinerja tahunan “Baik”, hal ini sangat berpengaruh pada realisasi nilai Dimensi Kompetensi tahun 2024.

Perbedaan hasil perhitungan pada dimensi kompetensi tahun 2023 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 39,61 dan 35,04 mengalami penurunan nilai sebesar 4,57. Perubahan cara perhitungan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024, dimana penilaian kinerja dimasukkan pada komponen perhitungan dimensi kompetensi dengan nilai 25 (lebih tinggi proporsinya dibandingkan dengan riwayat pengembangan kompetensi), sehingga aspek kinerja menjadi sangat penting dalam pencapaian profesionalisme ASN. Sebagai upaya dalam meningkatkan komponen penilaian kinerja, Pada tahun 2024, terdapat 21 pegawai mendapatkan predikat kinerja “Sangat Baik” dan sisanya sebanyak 95 orang mendapatkan predikat kinerja “Baik”. Hal ini sejalan dengan Nilai

Pencapaian Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Jakarta yang pada tahun 2024 mendapatkan predikat “Istimewa”, sehingga maksimal 20% pegawai dapat diberikan nilai predikat kinerja “Sangat Baik”.

3. Dimensi Kinerja, dengan perhitungan yang masih sama seperti tahun tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Predikat Kinerja Sangat Baik, memperoleh nilai 30
 - b. Predikat Kinerja Baik, memperoleh nilai 25
 - c. Predikat Kinerja Butuh Perbaikan, memperoleh nilai 20
 - d. Predikat Kinerja Kurang (Misconduct), memperoleh nilai 15
 - e. Predikat Kinerja Sangat Kurang, memperoleh nilai 10

Nilai predikat kinerja ini memberikan dampak pada perhitungan Dimensi Kinerja dan juga Dimensi Kompetensi. Dalam pencapaian nilai maksimal pada hasil kinerja diperlukan berbagai strategi dan upaya yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai supaya dapat mencapai nilai maksimal pada setiap Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jakarta. Data pada dimensi kinerja didapat dari e-kinerja BKN atau Integrasi laporan kinerja ke SIASN.

Dimensi Disiplin, dengan perhitungan yang masih sama seperti tahun tahun sebelumnya yaitu dihitung berdasarkan riwayat disiplin pegawai selama 1 (satu) tahun terakhir. Data pada dimensi disiplin diperoleh dari integrasi SIASN dengan bobot maksimal 5

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu:

- 1) Pengembangan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja;
- 2) Menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai;
- 3) Melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

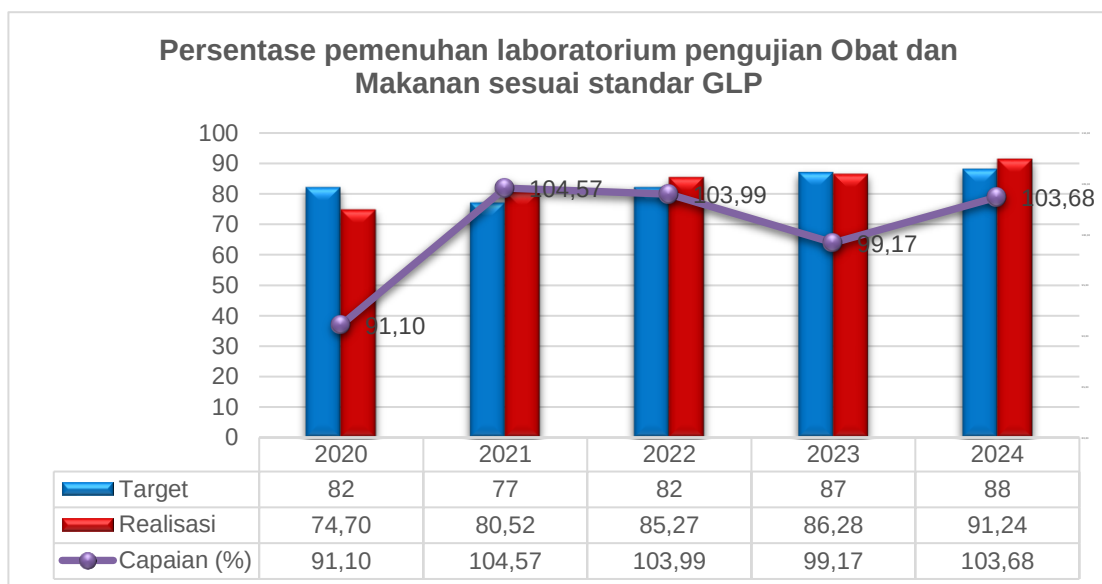
10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu :

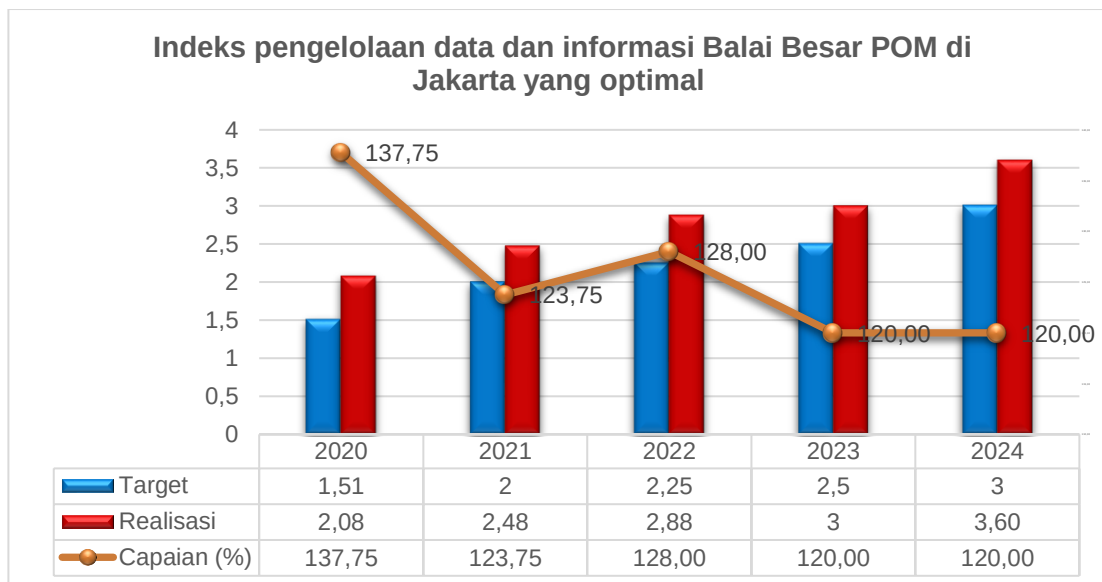
- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta yang optimal

SS11 memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 114,42% di tahun 2020; 114,16% di tahun 2021; 115,99% di tahun 2022; 109,59% di tahun 2023; dan 111,84% di tahun 2024.



Gambar 1.29 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020-2024

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.



Gambar 1.30 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal Tahun 2020-2024

Sejak ditetapkan pada tahun 2020, BBPOM di Jakarta secara konsisten melampaui target kinerja yang diberikan pada Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Target yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan tools untuk memastikan unit kerja dan ditetapkan target Unit Pelaksana Teknis pada kriteria 3.

Berdasarkan hasil analisis tren tersebut BBPOM di Jakarta perlu mempertahankan kinerja dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Laboratorium telah menyusun perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang mencakup perencanaan pemenuhan komponen Standar Ruang Lingkup, pemenuhan kompoinen Standar Kompetensi dan pemenuhan Standar Peralatan;
- 2) Target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium tahunan telah dibagi menjadi target per TW sehingga pengawalan terhadap pemenuhan capaiannya dapat lebih ketat;
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat silakukan secara berkala dengan batas waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya;
- 4) Terdapat penugasan PIC untuk masing- masing komponen Standar Kemampuan Laboratorium sehingga diharapkan dapat lebih terkawal;
- 5) Penambahan ruang lingkup pengujian dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing laboratorium disesuaikan

dengan ketersediaan alat, baku pembanding dan zat aktif dalam sediaan yang diuji;

- 6) Pengembangan kompetensi personil dilaksanakan melalui keikutsertaan pada kegiatan terpadu Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional maupun kegiatan mandiri yang diadakan di BBPOM di Jakarta.
- 7) Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Balai Besar POM di Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi;

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jakarta secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. SS.. memiliki tren penurunan dan kenaikan capaian kinerja dikarenakan target yang ditetapkan berbeda setiap tahunnya yaitu 99,18% di tahun 2020; 93,61% di tahun 2021; 99,29% di tahun 2022; 98,72% di tahun 2023; dan 108,75% di tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 4 (empat) indikator yaitu:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jakart
- 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
- 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- 4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri



Gambar 1.31 Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Terjadi penurunan target dibandingkan tahun 2020 sampai dengan 2023, karena terdapat perubahan formulasi perhitungan NKA. Secara umum realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2023, sedangkan terendah pada tahun 2021. Realisasi terendah di tahun 2021 selaras dengan capaian paling rendah pada periode renstra 2020-2024. Demikian pula realisasi tertinggi pada tahun 2024 telah sesuai capaian tertinggi nilai kinerja anggaran dalam periode renstra yang sama. Jika dianalisis, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibanding dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja tersebut terwujud sebagai hasil dari peningkatan Nilai IKPA pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA.



Gambar 1.32 Nilai kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama ini baru ditetapkan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 1.33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2020-
2024



Gambar 1.34 Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama ini baru ditetapkan pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS11 yaitu:

- 1) Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; Bimbingan Teknis Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di UPT POM.
- 2) Melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan.
- 3) Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran melalui pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- 4) Menggunakan aplikasi permintaan pengadaan barang/jasa melalui CCBMN untuk mempermudah penelusuran riwayat dan proses pengadaan barang sebelum diproses melalui e-purchasing maupun swakelola
- 5) Monitoring pelaksanaan kegiatan dalam menunjang dalam penggunaan produk dalam negeri.

1.1.1. Aspirasi Stakeholder

BBPOM di Jakarta memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas yang bersifat *agile*, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Jakarta dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BBPOM di Jakarta dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BBPOM di Jakarta dapat mengimplementasikan penyesuaian kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Oleh karenanya, BBPOM di Jakarta membuka berbagai kanal untuk seluruh elemen masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Jakarta 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia dapat menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta secara khusus.

Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subyek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan

Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM menjaring *feedback* dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM Tahun 2024. Responden survey adalah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, setiap tahunnya, BBPOM di Jakarta melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menjaring aspirasi perwakilan pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pengawas (Ombudsman), Instansi Pemerintah terkait, Pelaku Usaha, Akademisi, Organisasi Masyarakat.

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- 1.1.1.1. BBPOM di Jakarta meningkatkan peran bukan hanya sebagai pengawas namun juga sebagai mitra kolaborasi
- 1.1.1.2. BBPOM di Jakarta secara intensif memberikan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat dengan mengoptimalkan digitalisasi dan media sosial
- 1.1.1.3. BBPOM di Jakarta dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat sesuai kewenangan

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra BBPOM di Jakarta 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan

dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM di Jakarta dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM di Jakarta dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BBPOM di Jakarta diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM di Jakarta tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Jakarta periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Jakarta, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Jakarta, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga

esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi BBPOM di Jakarta di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

I.1.1 *Kekuatan (Strength)*

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan BPOM mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Kepala UPT BBPOM di Jakarta dipilih melalui seleksi terbuka yang bersifat adil, transparan dan obyektif berbasis manajemen talenta dengan tetap mengedepankan penilaian rekam jejak untuk memastikan integritas dan akuntabilitas. Kepala UPT BBPOM di Jakarta selama periode 2020-2024 telah berganti sebanyak 4 (empat kali). Namun hal ini tidak mengubah komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM untuk menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini terlihat dengan rapot kinerja yang secara konsisten terus meningkat, penyempurnaan sarana prasarana sesuai peraturan perundangan undangan terkini dengan tetap memperhatikan aspek kemudahan dan kenyamanan pelanggan, pengembangan Sumber Daya Manusia secara komprehensif, pengelolaan kinerja anggaran dan akuntabilitas yang semakin terukur serta implementasi nilai nilai Reformasi Birokrasi melalui pembentukan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BBPOM di Jakarta yang dibina sampai dengan 2024 mencakup *pentahelix* yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Akademisi (Universitas Pancasila), Pelaku Usaha dan Asosiasi (Ikatan Apoteker Indonesia), Kelompok Masyarakat (Kwartir Daerah Pramuka Provinsi DKI Jakarta) dan Media (Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta). Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi terlihat dengan digitalisasi pada tiap proses bisnis yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data BPOM. Kolaborasi yang baik ini secara nyata telah mampu mengefisienkan anggaran dan memberikan *outcome* langsung kepada masyarakat. Highlight kegiatan kolaborasi diantaranya penyediaan konten KIE Obat dan Makanan pada videotron di 14 (empat belas) titik strategis Kota Jakarta dan penayangan konten pada angkutan transportasi umum Busway dan MRT secara berkala. Apabila mengeluarkan anggaran, penayangan konten pada videotron dan transportasi umum dapat mencapai Rp. 5.000.000.000 per tahun, namun dengan advokasi pimpinan serta kolaborasi yang tersistem dengan baik, BBPOM di Jakarta dapat menayangkan konten secara lebih luas dan tanpa biaya.

Pemanfaatan teknologi informasi atau transformasi digitalisasi pada pelayanan publik senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan dalam berbagai inovasi pelayanan publik. Komitmen terhadap konsistensi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditunjukkan dengan perolehan berbagai penghargaan digitalisasi inovasi pelayanan publik antara lain :

- 1) Sipiket (layanan pengujian sampel pihak ke tiga) layanan ini pada tahun 2023 mendapat penghargaan karena telah direplikasi secara nasional sehingga menjadi aplikasi SIPT pihak ke tiga yang mulai diterapkan di bulan Januari 2024.
- 2) None Sisi (Konsultasi Sertifikasi Online), Senayan (Persetujuan Denah Layout Bangunan PBF Obat/ Bahan Obat) dan Laila24 (layanan Informasi dan Pengaduan melalui whatsapp) yang dikolaborasikan dengan layanan publik konvensional Sultan Betawi dan Kerling Jakarta diintegrasikan ke dalam satu wadah Jak Prima telah mendapat penghargaan TOP 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM 2024.
- 3) Laron Baja (Lartas Online Balai Besar POM di Jakarta), yaitu inovasi Layanan Verifikasi Pemasukan Obat dan Makanan Melalui

Jasa Pengangkutan untuk Keperluan Pribadi Melalui Kiriman Pos, yang merupakan sinergi pengawasan pemasukan obat dan makanan dengan Bea dan Cukai Pasar baru, yang dilakukan secara online. Inovasi ini telah mendapat penghargaan sebagai Inovasi Terbaik 2 pada Lomba Inovasi Pelayanan Publik BPOM Tahun 2021 dan telah direplikasi oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2023. Sampai dengan tahun 2024

- 4) Laila24 (layanan Informasi dan Pengaduan melalui whatsapp) berhasil meraih penghargaan TOP 22 KOIN BPOM 2025.

Beberapa penghargaan yang diperoleh BBPOM di Jakarta sebagai bukti nyata komitmen pimpinan untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2020 s.d sekarang
- b. Predikat Pelayanan Prima sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang
- c. Kategori Gold pada Raksa Nugraha Indonesian Consumer Protection Award Tahun 2021
- d. Badan publik dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan POM Tahun 2023 dan 2024
- e. Agen Perubahan Badan POM Terbaik 1 Tahun 2022 dan 2024
- f. Sertifikasi ISO 9001:2018 sejak tahun 2011
- g. Akreditasi SNI ISO IEC 17025 : 2017 sejak tahun 2003
- h. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang
- i. Berperan aktif mendukung Satu Dekade Opini WTP BPOM dikarenakan BBPOM di Jakarta merupakan lokus pemeriksaan BPK tiap tahunnya
- j. dan seterusnya

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

BBPOM di Jakarta dalam upaya memperkuat dan meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan, secara aktif menjalin berbagai kerja sama strategis melalui pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix antara lain :

- Pemerintah Prov DKI Jakarta : Nota Kesepakatan mengenai Sinergi Pengawasan Obat dan Makanan secara Terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Agustus 2024
- Ikatan Apoteker Indonesia (IAI DKI Jakarta) : PKS mengenai Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan melalui Dukungan

Profesi Apoteker, tanggal 6 Juli 2022

- FF Univ Pancasila : PKS mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di bidang OBA, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, tanggal 9 Juli 2024
- KPID Prov DKI Jakarta : PKS mengenai Pengawasan Isi Siaran Terhadap Iklan, Publikasi, dan Promosi Obat dan Makanan pada Lembaga Penyiaran di Prov DKI Jakarta, tanggal 12 September 2023
- Kwarda DKI Jakarta : PKS mengenai Pemberdayaan Gerakan Pramuka di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan di Prov DKI Jakarta, tanggal 26 Februari 2023

BBPOM di Jakarta telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, industri obat dan makanan, lembaga penelitian, serta kelompok masyarakat. Kerjasama ini memungkinkan percepatan pelaksanaan tugas fungsi, pertukaran informasi yang cepat dan akurat, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar yang berdampak langsung untuk melindungi masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, BBPOM di Jakarta dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan, tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal, memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Jaringan kerja sama yang solid dengan pemangku kepentingan dibuktikan melalui kegiatan kolaboratif yang bersifat dinamis pada setiap fungsi BBPOM di Jakarta yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelompok Substansi Pemeriksaan
 - a. Inovasi Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling) merupakan kegiatan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan iklim investasi. Hal ini dilakukan dengan membuka layanan pada titik strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kegiatan ini mampu meningkatkan jumlah layanan dan mempercepat waktu layanan. Program yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 ini, telah mendapat apresiasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas terkait
 - b. Inovasi Sultan Betawi (Konsultasi dan Layanan Informasi

Sertifikasi bersama BBPOM di Jakarta) diinisiasi pada tahun 2021 berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu dengan membuka loket layanan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta setiap hari Selasa. Kerjasama ini menjadi solusi dari kendala jauhnya lokasi kantor BBPOM di Jakarta.

- c. UMKM Jaw@ra (UMKM Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman) berkolaborasi sejak Tahun 2022 bersama Dinas PPKUKM telah membina 475 UMKM yang menghasilkan 2.571 izin edar. Jumlah ini jauh di atas target yang ditetapkan untuk BBPOM di Jakarta dan dilakukan tanpa adanya tambahan personil dan anggaran. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan telah menggunakan anggaran kolaborasi terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan membentuk JakOfficer yaitu SDM PemProv yang diberdayakan sebagai perpanjangan tangan petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan UMKM. Sebagai upaya keberlanjutan program, UMKM Jaw@ra bersama Dinas PPKUKM menghidupkan Rumah Produksi Bakso Bersama di Rumah Susun yang mendukung Astacita Ketiga Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Pengembangan Kewirausahaan.

2. Kelompok Substansi Penindakan

Kolaborasi fungsi penindakan dengan Kantor Bea Cukai Pos Pasar Baru melahirkan inovasi Laron Baja (Lartas Online BBPOM di Jakarta) yang didasarkan pada Komitmen Bersama antara BBPOM di Jakarta dengan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta pada tahun 2018. Sistem ini dibangun untuk mencegah masuknya produk impor ilegal melalui jalur barang kiriman pos kepada pribadi. Inovasi ini mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan di hulu, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan impor ilegal serta melindungi produk domestik dari persaingan yang tidak sehat dengan produk impor ilegal. Selain itu, Laron Baja memberikan jaminan bagi petugas Bea Cukai dalam memberikan keputusan tegah atau rilis. Selain itu, adanya pertukaran informasi terkait pemasukkan Obat dan Makanan ilegal ke wilayah Indonesia antara Bea dan Cukai dan BBPOM di Jakarta yang dapat ditindaklanjuti dengan penindakan bersama dan penyidikan *multidoor system*. Di tahun 2024, Laron Baja telah menghasilkan 805 rekomendasi rilis seluruhnya; 253 rekomendasi rilis sebagian; dan 17 rekomendasi tegah seluruhnya.

Kolaborasi penindakan Obat dan Makanan dengan skema *Criminal Justice System* dilaksanakan bersama Aparat Penegak Hukum dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, serta lembaga pengawasan sektoral lainnya seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Intelijen Daerah (BINDA), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Dalam penanganan peredaran Obat Obat Tertentu (OOT) yang sedang marak di wilayah Jakarta, BBPOM di Jakarta bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Satpol PP Provinsi hingga Kelurahan, Dinas/Suku Dinas Kesehatan, Dinas/Suku Dinas PPKUKM dalam bentuk rapat koordinasi dan penindakan bersama. Di tahun 2024, sebanyak 6 kali kegiatan rapat koordinasi dan penindakan bersama kasus OOT di berbagai wilayah Jakarta dengan target Toko Obat tanpa izin, Toko Kosmetik, serta pedagang kaki lima.

3. Kelompok Substansi Pengujian

Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta selalu berupaya meningkatkan kemampuan uji agar dapat berkontribusi maksimal dalam pengawasan obat dan makanan. Selain melaksanakan pengujian sampel pengawasan rutin, laboratorium Balai Besar POM di Jakarta juga berkontribusi dalam penanganan sampel kasus, termasuk sampel kasus KLB Keracunan Pangan.

Laboratorium BBPOM Jakarta juga mendukung program fasilitasi UMKM yang dicanangkan oleh Badan POM melalui pengujian gratis untuk peningkatan kualitas produk UMKM agar dapat bersaing di pasar internasional.

Salah satu bukti komitmen laboratorium BBPOM Jakarta dalam peningkatan kemampuan uji adalah pengembangan metode pengujian yang cepat dan valid melalui inovasi *Biomolecular Testing of Pathogenic Bacteria* (MONSTERA) yang mendapatkan penghargaan juara kedua dalam lomba Inovasi pengujian laboratorium BPOM. Inovasi ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan realtime PCR untuk deteksi cepat bakteri patogen. Sebagai bagian dari Region Semarang, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen kuat untuk menerapkan Regionalisasi Laboratorium dengan sebaik-baiknya melalui koordinasi yang baik dengan Balai / Balai Besar di Region Semarang, guna

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sampling dan pengujian obat dan makanan. Komitmen BBPOM di Jakarta sebagai anggota region ini dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan sebagai Anggota Region terbaik kedua pada tahun 2024.

Laboratorium Balai Besar POM Jakarta juga telah menerapkan konsep Green Laboratory, yaitu konsep operasional laboratorium yang mengutamakan praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui inovasi *Eco Office Lab*. Inovasi ini mendorong semua personil untuk berupaya melakukan efisiensi listrik, efisiensi air, efisiensi kertas dan penanganan limbah yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Komitmen BBPOM Jakarta dalam penerapan Green Lab ini telah menorehkan prestasi sebagai Juara satu dalam kategori Inovasi Green Laboratory dan Juara Umum pada lomba Penerapan Green Laboratorium Badan POM tahun 2025.

Sejalan dengan penerapan inovasi *Eco Office Lab*, secara bertahap Balai Besar POM di Jakarta juga mulai menerapkan digitalisasi dalam pencatatan (Ecclos, Simolat dan Gerak Pandai), digitalisasi penatausahaan BMN dan barang persediaan (CCBMN) serta digitalisasi dalam pembuatan laporan hasil pengujian (FLASH yang masih dalam proses pengembangan). Saat ini semua unit kerja di Badan POM telah menggunakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) untuk pelaporan hasil pengujian, baik untuk pengujian sampel rutin dalam rangka pengawasan maupun sampel pihak ketiga. Untuk pelaporan pengujian sampel pihak ketiga, BBPOM Jakarta berperan besar dalam pengembangan SIPT sampel pihak ketiga dengan dieskalasinya inovasi SiPiket (Sistem Informasi Sampel Pihak Ketiga) ke dalam SIPT. Semua sistem digitalisasi yang telah dibangun tersebut ke depannya diharapkan dapat dikembangkan menjadi sistem digitalisasi laboratorium yang terintegrasi (LIMS).

Dalam rangka unjuk kinerja laboratorium, meningkatkan jaminan mutu hasil pengujian dan ruang lingkup kemampuan uji laboratorium, laboratorium BBPOM di Jakarta telah menyelenggarakan uji banding antar laboratorium untuk laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profisiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal

seperti Badan Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional.

BBPOM di Jakarta juga berperan aktif pada kegiatan *Food Security* pada *event* internasional yang dihadiri VVIP dan tamu negara serta penyelenggaraan persidangan sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

Dalam program Makanan Bergizi Gratis yang merupakan Program Prioritas Presiden, laboratorium BBPOM di Jakarta turut mendukung melalui kontribusi sebagai narasumber untuk peningkatan kompetensi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan ditugaskan sebagai kepala SPPG, melakukan pengujian di SPPG dan pemastian penyebab keracunan melalui pengujian sampel, serta berkoordinasi dan melaporkan hasil pengujian kepada Deputy 3 Badan POM.

4. Kelompok Substansi Infokom

Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik melahirkan penanyangan konten pada videotron dan media luar ruang transportasi umum. Hal ini memberikan jangkauan penerima KIE yang lebih luas di Provinsi DKI Jakarta tanpa tambahan anggaran.

Selain itu kegiatan SAKA POM telah mampu membentuk 6 SAKA POM dengan jumlah anggota 243 yang akan berperan sebagai perpanjangan tangan BBPOM di Jakarta melalui Krida Informasi Obat dan Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan serta Krida Pengujian Sederhana Obat dan Makanan. BBPOM di Jakarta secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan pameran berskala nasional seperti Pekan Raya Jakarta, SMESCO dan Festival Urban Farming 2025. Kolaborasi dalam peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman antara lain KIE pencegahan stunting bersama FF Univ Pancasila di RPTRA Citra Betawi Kel Srengseng; Ngobrol bareng Berita Jakarta di Kel Baru Jakarta Timur; Kolabs bersama BI Perwakilan DKI Jakarta pada HUT TMII. Kolaborasi media sosial untuk memperluas jangkauan informasi yang cepat dan efektif meliputi Kolabs bersama Majalah Jakita Dinas Kominfotik Prov DKI Jakarta tema pengawasan takjil Benhil, serta Berita Jakarta terkait Cerdas Konsumsi Obat dan Makanan Aman di Kelurahan Baru Jakarta Timur.

Kolaborasi dan koordinasi yang baik telah terjalin antara BBPOM di Jakarta dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada program keamanan pangan terpadu, meliputi program Kelurahan Pangan Aman, Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan serta Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan pelaksanaan program tersebut di Kota/ Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan keamanan pangan di wilayah. Beberapa penghargaan yang diperoleh sebagai berikut :

- Kelurahan Pegangsaan Dua Jakarta Timur, juara 2 lomba Kelurahan Pangan Aman tingkat Nasional Regional Barat tahun 2023
- Pasar Mayestik Jakarta Selatan, juara 2 lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tingkat Nasional tahun 2022
- SMAN 32 Jakarta selatan, juara 1 lomba Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman tingkat Nasional Regional Barat Tahun 2023
- Dan beberapa sarana lainnya yang berhasil meraih nominator pada penilaian tingkat Nasional.

Sebagai anggota Tim Percepatan dan Pencegahan Penurunan Stunting (TPPS) DKI Jakarta, BBPOM di Jakarta berkomitmen dan berperan aktif dalam berbagai upaya pencegahan dan penurunan stunting di wilayah DKI Jakarta bersinergi dengan jajaran terkait di Pemerintah Kota/kabupaten administrasi DKI Jakarta. Pelaksanaan edukasi mengenai Keamanan Pangan dan Gizi kepada sasaran 3 B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita), kader posyandu, remaja putri dilakukan secara berkala. Diharapkan dengan pemahaman dan pengetahuan keamanan pangan yang meningkat, maka akan mencegah terjadinya kasus stunting di DKI Jakarta.

Dalam mendukung upaya pelaksanaan pengawalan keamanan pangan pada program Makan Begizi Gratis (MBG), BBPOM Jakarta berkolaborasi dengan BGN memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pihak yang terlibat langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah DKI Jakarta, dalam berbagai bentuk kegiatan antara lain Bimtek pada Penjamah Makanan di SPPG dan Sosialisasi Kebijakan Sistem dan Tatakelola program MBG terkait Keamanan Pangan pada Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan, forum koordinasi pelaksanaan program MBG di wilayah. Dengan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait,

diharapkan pelaksanaan program MBG berjalan dengan optimal untuk mewujudkan generasi sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.

Sejalan dengan pelaksanaan Keamanan Pangan oleh Kota/Kabupaten, maka perlu dilakukan pendampingan, monitoring dan pengawalan implementasinya secara berkala. Berkenaan dengan itu, BBPOM di Jakarta berkomitmen melakukan pendampingan dengan tujuan mendorong pemerintah daerah mempersiapkan dokumen pengawasan pangan secara komprehensif, mendorong pemerintah daerah melaksanakan keamanan pangan secara efektif dan efisien, mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan lingkup keamanan pangan serta mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM).

Beberapa penghargaan yang didapatkan dari kegiatan kolaborasi adalah :

1. Terbaik 2 Lomba Inovasi Layanan Publik BPOM Tahun 2021 untuk Laron Baja
2. Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024
3. Apresiasi Pemerintah Kota Administrasi serta Dinas terkait di Provinsi DKI Jakarta atas sinergi dan kolaborasi kegiatan

3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BBPOM di Jakarta

BBPOM di Jakarta dalam mengimplementasikan manajemen ASN berdasarkan pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 221 tahun 2022 tentang Pedoman Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi ASN Badan POM dengan menempatkan kualifikasi dan kapabilitas ASN sebagai aset untuk mendorong eksistensi dan meningkatkan kinerja organisasi dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

ASN BBPOM di Jakarta merupakan *Human Capital* yang memiliki peran utama dalam keberhasilan pengawasan obat dan makanan. Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, pegawai Balai Besar POM di Jakarta telah memiliki kompetensi kualifikasi pendidikan dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang spesifik diantaranya bidang pendidikan ilmu farmasi, biologi molekuler, teknologi pangan serta bidang ilmu intelijen yang

merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan.

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, telah mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang pengawasan obat dan makanan. Era transformasi digital menuntut pegawai Balai Besar POM di Jakarta untuk tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memanfaatkan data secara efektif dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis risiko. Transformasi ini menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh, baik dalam hal literasi digital, kemampuan analisis data, maupun adaptasi terhadap perubahan sistem kerja berbasis teknologi. Oleh karenanya, diperlukan program dan kegiatan pembelajaran kompetensi ASN dengan strategi yang tepat. Pengembangan kompetensi ASN BBPOM di Jakarta dilaksanakan dengan prinsip relevan (sesuai kebutuhan), mudah diaplikasikan (Applicable), memiliki dampak (impactfull) serta mudah diakses (Accesible). Sejak tahun 2022, kegiatan pengembangan kompetensi pegawai baik teknis maupun manajerial dilakukan dengan memanfaatkan platform IDEAS berbasis teknologi digital dari PPSDM yang dapat diakses secara online dengan mudah dan lebih efisien.

Beberapa bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan BBPOM di Jakarta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai diantaranya:

a. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal

Sejak tahun 2020 – 2024 sebanyak 13 orang pegawai telah selesai melaksanakan tugas belajar baik ke jenjang Sarjana (S1) maupun Pascasarjana (S2) dan sebanyak 14 pegawai lainnya masih melaksanakan tugas belajar dalam maupun luar negeri dengan pendanaan dari BPOM maupun Non BPOM. Program peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal diprioritaskan untuk Pejabat Fungsional Tertentu jenjang Keterampilan yang dituntut untuk menempuh Pendidikan ke jenjang lebih tinggi sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah lulus akan dialihkan pada jenjang Jabatan Fungsional Keahlian. BBPOM di Jakarta memiliki 14 pejabat fungsional PFM tingkat Keterampilan, 2 diantaranya akan purnabakti dalam waktu 7 tahun ke depan dan 12 pegawai lainnya sedang tugas belajar ke jenjang S1.

Pada tahun 2024, salah satu pegawai BBPOM di Jakarta a.n Retty Dwi Handayani, S.Farm, Apt, M.Si yang berhasil melaksanakan Tugas Belajar Non Degree *Hubert H. Humphrey Fellowship For Professional*

Study pada Emory University, USA dan merupakan satu satunya WNI yang lulus seleksi dalam program tersebut. Dan Retty Dwi Handayani, S.Farm, Apt, M.Si direncanakan pada tahun 2025 menempuh studi Doctoral (S3) dengan tema Public Health di University of Sheffield UK. Hal ini mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM BBPOM di Jakarta. Selain itu, pegawai yang bersangkutan pada tahun 2022 melaksanakan Short Course selama 3 bulan di Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgia dalam bidang Pharmaceutical Policies in Health System.

Pada Tahun 2024, terdapat 1 pegawai BBPOM di Jakarta yang telah lulus mengikuti Pendidikan Program Studi Magister Terapan Intelijen Medik pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Dan direncanakan di tahun 2025 BBPOM di Jakarta akan mendapatkan tambahan CPNS yang berasal dari program S1 STIN. Program ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di fungsi penindakan.

- b. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan, bimtek, workshop/seminar dan lain-lain.

Tahun 2020 – 2024, BBPOM di Jakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun setiap tahunnya. Perencanaan pengembangan kompetensi yang disusun didasarkan pada analisis kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas fungsi dan jabatan masing-masing.

Peningkatan kompetensi pegawai BBPOM di Jakarta tahun 2024 difokuskan pada penggunaan sistem digital dalam kegiatan pengawasan, pelaporan, dan analisis serta pemahaman prinsip dan pengambilan keputusan berbasis data (data-driven regulation), *data analytics*, serta *risk-based supervision*. *Upskilling dan Reskilling* pegawai BBPOM di Jakarta telah dilakukan dalam rangka memperkaya bidang keahlian pegawai diluar keterampilan yang telah dimiliki, diantaranya Pegawai Pengawas Farmasi dan Makanan dilatih untuk dapat mengoperasikan berbagai platform digital dalam analisis dan pelaporan data pengawasan serta terintegrasi dengan berbagai platform yang dimiliki oleh stakeholder terkait. Sebanyak 2 orang pegawai Balai Besar POM di Jakarta yang membidangi fungsi Teknologi informasi pada tahun 2024 telah diikutsertakan pada Pelatihan *Cyber Security For Web Hosting-Protecting cPanel Server* sesuai dengan kebutuhan sebagai bentuk pengamanan data dimana Balai besar POM di Jakarta telah mengembangkan portal digital secara mandiri untuk kemudahan melaksanakan tugas dan fungsi.

Khusus tim penindakan, guna mengantisipasi semakin marak dan

luasnya peredaran Obat dan Makanan ilegal, telah dilakukan bimtek / pelatihan terkait patroli siber dengan mendalami pengetahuan tentang *crawling* dan cara pelaporannya menggunakan aplikasi *inawebcrawler* dan Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Selain itu juga, tim patroli siber dilibatkan aktif dalam forum-forum Siber yang diinisiasi oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

Dalam tata kelola pemanfaatan teknologi informasi di BBPOM di Jakarta telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi layanan serta dukungan terhadap pengawasan. Pada tahun 2021, unit telah mengembangkan Sistem Penerimaan Sampel Pihak Ketiga (SiPiket) yang kemudian diadopsi secara nasional oleh BPOM dan menjadi bagian dari SIPT Pihak Ketiga. Hal ini menunjukkan kontribusi langsung BBPOM di Jakarta terhadap penguatan sistem pengawasan nasional berbasis digital.

Selain itu, BBPOM di Jakarta juga telah menggunakan sejumlah aplikasi internal dan eksternal berbasis hosting untuk mendukung operasional, antara lain:

- 1) CCBMN: untuk pengelolaan BMN, keluhan, peminjaman kendaraan, dan manajemen pengadaan.
- 2) Aplikasi Peminjaman Ruang Rapat (Meeting Room): untuk mendukung efisiensi penggunaan sarana kantor.
- 3) OQ-Jak: untuk pendaftaran konsultasi online.
- 4) MyAdventure: untuk manajemen praktik kerja lapangan (PKL) bagi siswa dan mahasiswa.

Saat ini sedang dikembangkan Aplikasi Satu Pintu (Single Sign-On/SSO) yang akan mengintegrasikan seluruh aplikasi internal agar dapat diakses melalui satu akun pengguna. Inisiatif ini juga membuka peluang pengembangan real-time dashboard dan AI-based alert system di masa depan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Meskipun pemanfaatan teknologi telah meluas, skala kontribusi sistem TI terhadap pengawasan dan kinerja belum terdokumentasi secara kuantitatif dan belum dilengkapi dengan mekanisme analisis berbasis data real-time. Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- Menyusun peta kontribusi dan indikator kinerja sistem TI dalam mendukung kegiatan pengawasan dan layanan publik.

- Mengembangkan dashboard monitoring real-time yang menampilkan data lintas aplikasi internal.
- Mendorong pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI-based alert) untuk mendeteksi anomali atau keterlambatan proses.
- Menyusun laporan pemanfaatan TI tahunan untuk memperjelas capaian dan arah pengembangan.

Sebagian besar aplikasi internal BBPOM di Jakarta saat ini masih berdiri sendiri (standalone) dan dihosting secara lokal, sehingga integrasi data lintas unit masih terbatas. Namun demikian, langkah strategis telah diambil melalui pengembangan proyek Single Sign-On (SSO) yang bertujuan menyatukan seluruh aplikasi internal — seperti CCBMN, Meeting Room, dan aplikasi lainnya — ke dalam satu portal akses terpadu.

Setelah pengembangan SSO selesai, BBPOM di Jakarta berencana untuk mengusulkan seluruh aplikasi agar diinstal di Pusat Data Nasional (PDN) dengan pengelolaan oleh Pusat Data dan Informasi BPOM, guna memastikan keamanan, keandalan, serta keterpaduan data secara nasional.

Permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum adanya integrasi sistem informasi lintas aplikasi secara penuh.
- 2) Data governance dan mekanisme pemulihan bencana (disaster recovery) belum diformalkan dalam kebijakan tertulis
- 3) Ketergantungan pada hosting lokal menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan dan keamanan data.

Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan implementasi Single Sign-On (SSO) untuk seluruh aplikasi internal.
- 2) Menyusun Data Governance Policy yang mengatur standar interoperabilitas, keamanan, dan alur pertukaran data antarunit.
- 3) Mengembangkan Disaster Recovery System (DRS) untuk memastikan kontinuitas layanan digital.
- 4) Mengusulkan migrasi seluruh aplikasi internal ke Pusat Data Nasional (PDN) agar pengelolaan dan keamanan data dilakukan secara terpusat oleh BPOM.
- 5) Melakukan integrasi sistem internal dengan sistem pusat (SIPT dan aplikasi nasional BPOM) guna mendukung sinergi data lintas unit.

Dalam implementasi pelayanan publik, BBPOM di Jakarta terus berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, inklusif, transparan, dan berintegritas, dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta peningkatan kinerja organisasi. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen mutu dan pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata terhadap efisiensi waktu pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Salah satu inovasi unggulan yang menjadi pembeda BBPOM di Jakarta dibandingkan UPT lainnya adalah LAILA24 (Layanan Informasi dan Pengaduan Melalui WhatsApp 24 Jam). Inovasi ini mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam sistem *chatbot* otomatis untuk merespons permintaan masyarakat dengan waktu respon rata-rata kurang dari 20 detik, sehingga meningkatkan jumlah layanan informasi dan pengaduan yang dapat dilayani dari 2.544 layanan pada tahun 2024 menjadi 3.724 layanan hingga Agustus 2025. Keunggulan LAILA24 antara lain: (1) Efisien, mengalokasikan 70% permintaan standar (informasi, dokumen, FAQ) kepada *chatbot* berbasis kecerdasan artifisial; (2) Integrasi kolaborasi strategis (**K**oneksi dengan hub Jak-Konek yang terhubung ke 23 kanal OPD DKI Jakarta); (3) Keamanan data pengguna dijamin melalui NDA; (4) Layanan *real time* (Integrasi *database real-time* dengan OSS, aplikasi sertifikasi CDOB / CPPOB CPOTB, data inspeksi, layanan pengujian, dan penjadwalan sertifikasi); (5) Kompetensi (Dukungan sistem SIKOKOM (knowledge sharing) dan BPOM Pusat memperkaya kapasitas layanan); (6) Canggih (Teknologi *AI-Human* yang beroperasi nonstop 24/7).

Selain LAILA24, BBPOM di Jakarta juga membangun ekosistem digital pelayanan publik melalui berbagai inovasi, antara lain: Jak Konek, Laron Baja (*Lartas Online Balai Besar POM di Jakarta*), None Sisi (*Konsultasi Sertifikasi Online*), Senayan (*Persetujuan Denah Layout Bangunan PBF*), JakDigital (*Jendela Akses Digital Data Library*), Selayar Jakarta (*Sosialisasi Edukasi Online untuk Masyarakat Jakarta*), LSC Jakarta (*Ruang Belajar Kader Keamanan Pangan*), OQ Jak (*Online Queuing System*), Aripin (*Asupan Rabuan Pintar*), Kosidah Jakarta (*Kilas Informasi Berfaedah*), dan Forkom.

Inovasi Jak Konek secara khusus menjadi pembeda strategis karena mengintegrasikan KIE digital dengan platform lintas sektor, melibatkan website kelurahan, sekolah, madrasah, RPTRA, universitas, serta berbagai OPD seperti Dinas PMPTSP, Dinas PPKUKM, dan Diskominfo DKI Jakarta, untuk memperluas jangkauan literasi obat dan makanan di seluruh wilayah Jakarta.

Dalam memperkuat akses layanan langsung kepada masyarakat, BBPOM di Jakarta juga melaksanakan inovasi Kerling Jakarta (Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling), Monas (Mobil Pengawasan Jajanan Anak Sekolah), serta Sultan Betawi (Konsultasi

dan Layanan Informasi Sertifikasi). Inovasi-inovasi ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional kegiatan pengawasan dan memperkuat kedekatan pelayanan publik dengan masyarakat.

Implementasi inovasi pelayanan publik tersebut berdampak pada peningkatan efisiensi operasional dan kinerja organisasi, dengan capaian sasaran kegiatan tahun 2024 menunjukkan hasil 100,11% (kategori Sangat Baik) untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan, serta 103,54% (kategori Sangat Baik) untuk kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja pengawasan.

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, BBPOM di Jakarta telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sejak September 2022 sebagai bentuk komitmen terhadap integritas layanan publik. Penguatan pengawasan integritas juga diwujudkan melalui inovasi SI_AGA KU (Survei Integritas Anti Gratifikasi Anti Korupsi) yang terintegrasi dalam portal JakDigital, untuk memantau kepatuhan terhadap prinsip anti gratifikasi, penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), pengelolaan Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan secara transparan dan akuntabel.

Melalui penerapan sistem manajemen mutu, inovasi pelayanan digital, serta komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas, BBPOM di Jakarta mampu mewujudkan pelayanan publik yang efisien, adaptif, dan berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi model praktik terbaik bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM lainnya.

BPOM telah mengadopsi teknologi terkini baik dalam pengujian obat dan makanan maupun dalam proses digitalisasi. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki oleh BBPOM di Jakarta antara lain: ICPMS (*Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy*), GCMS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*), RTi-PCR (*Real time - Polymerase Chain Reaction*) dan HPLC dengan detektor ELSD (*Evaporative Light Scattering Detector*). Terdapat beberapa peralatan canggih lain yang dimiliki laboratorium BBPOM di Jakarta seperti LCMS-MS (*Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry*) yang dipindahkan ke laboratorium UPT lain, yaitu BBPOM di Semarang (sebagai koordinator Region), dikarenakan kebijakan regionalisasi laboratorium.

Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat, memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk

yang berpotensi berbahaya.

Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BBPOM di Jakarta selaras dengan ekosistem digital Provinsi DKI Jakarta. Intervensi digital dipilih mengingat Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi pada Indeks Masyarakat Digital Indonesia Tahun 2023 (Kominfo 2023) sebesar 51.07 (<https://imdi.sdmdigital.id/home>) serta indeks literasi digital sebesar 3.59 yang lebih tinggi dari indeks literasi nasional sebesar 3.54. (

<https://survei.literasidigital.id/indeks-literasi-digital-provinsi>). Hal ini merupakan peluang yang harus ditangkap oleh BBPOM di Jakarta untuk menjalin sinergi pemanfaatan SPBE. Penggunaan aplikasi secara online mendukung Reformasi Birokrasi Tematik pada fokus Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Selain itu pemanfaatan media digital berperan penting dalam Pembangunan Ekonomi Hijau yang salah satunya akan nampak dari pengurangan media informasi secara fisik melalui *leaflet*, *pamflet* dan buku berbahan kertas.

Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi, penggunaan aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, komunikasi publik dengan konten media sosial yang menarik dan informatif, berperan besar untuk mewujudkan masyarakat cerdas yang mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, industri, dan masyarakat.

Untuk meminimalkan dan mencegah peredaran Obat dan Makanan ilegal secara daring : (1) Telah dibentuk tim patroli siber di fungsi Penindakan yang berselancar secara rutin untuk mendeteksi tautan Obat dan Makanan ilegal; (2) Melaporkan tautan Obat dan Makanan ilegal melalui satu aplikasi pelaporan yang kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan BPOM; (3) Pencantuman target patroli siber pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di fungsi Penindakan; (4) Pemanfaatan *AI-based detection system* untuk memudahkan dan meningkatkan hasil patroli siber sehingga pencarian tautan Obat dan Makanan ilegal menjadi lebih cepat; dan (5) Dilakukan koordinasi dengan platform e-commerce dalam hal *takedown* akun dan permohonan ahli guna

kelengkapan berkas perkara.

Guna keamanan aplikasi yang digunakan dari serangan *malware*, diterapkan dan diminta kepada seluruh pegawai melakukan penggantian *password* secara berkala atau menggunakan 2FA *Google Authenticator*. Dan untuk melindungi perangkat komputer / laptop dilakukan instalasi anti *virus* dan anti *malware* dengan *update* secara berkala oleh tim TI BBPOM di Jakarta.

BBPOM di Jakarta telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem internal dan partisipasi aktif dalam digitalisasi sistem nasional (SIPT Pihak Ketiga). Meskipun integrasi menyeluruh masih dalam proses, arah pengembangan telah jelas — menuju sistem informasi yang terpadu, aman, dan berbasis data melalui penerapan SSO, penguatan tata kelola data, serta migrasi ke infrastruktur nasional. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, efisiensi layanan, dan transparansi kinerja organisasi.

5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas

BBPOM di Jakarta merupakan bagian dari jaringan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap UPT dalam jaringan Lab POM dilengkapi dengan kemampuan pengujian yang beragam, memungkinkan untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek produk obat dan makanan, dengan pengujian mikrobiologi dan kimia. Kemampuan ini memastikan bahwa BPOM tidak hanya responsif terhadap isu keamanan yang muncul tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi masalah sebelum mereka berdampak pada kesehatan masyarakat. Melalui regionalisasi laboratorium, BPOM memperkuat jaringan pengawasan produk obat dan makanan di Indonesia, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pengawasan didasarkan pada data dan analisis ilmiah yang akurat serta mendukung komitmen BPOM dalam menjaga standar kesehatan masyarakat yang tinggi. Bekerjasama dengan laboratorium Badan POM dan laboratorium eksternal, BBPOM di Jakarta telah berperan sebagai *provider* uji banding metode analisa untuk unjuk kinerja laboratorium dan memperluas ruang lingkup kemampuan uji laboratorium. Selain itu, laboratorium turut berpartisipasi dalam uji profisiensi dan uji banding yang diselenggarakan BPOM dan laboratorium eksternal seperti Badan Uji Standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM), PT Sucofindo, Badan Standarisasi Nasional

6. Ekosistem edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha yang kuat

BBPOM di Jakarta berperan aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan. Dengan melaksanakan berbagai program dan kampanye edukasi yang terstruktur secara tatap muka dan daring / online serta media sosial, BBPOM di Jakarta berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BBPOM di Jakarta dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. Kemitraan strategis ini merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

Berbagai kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi telah dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta dalam berbagai jenis program dan media, meliputi :

KIE berdasarkan Jenis Program : KIE Bersama Tokoh Masyarakat, KIE Rutin dan KIE Tematik (Stunting)

KIE berdasarkan Media :

KIE Media Sosial (Instagram, facebook, X, Threads, Tiktok dan Youtube) dan KIE Non Media Sosial (Media cetak, elektronik, digital, online, luar ruang)

Adapun tema yang diberikan disesuaikan dengan target / sasaran peserta serta isu atau kebutuhan audiens seperti ibu rumah tangga, pelaku usaha, kelompok 3 B (ibu hamil, ibu menyusui, balita), kader, sekolah, pedagang pasar, lintas sektor dan lainnya. Dalam melakukan upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, BBPOM di Jakarta senantiasa berupaya melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan isu gender dan pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas (difabel). Masih adanya ketimpangan terhadap ke-2 isu tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pelaksanaan program. Oleh karena itu pendekatan terhadap integrasi perspektif gender dan disabilitas perlu terus dioptimalkan untuk memperkuat efektivitas program.

Sejalan dengan itu, sebagai upaya mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, berbagai inovasi dengan pendekatan partisipatif masyarakat telah di inisiasi oleh BBPOM di Jakarta secara tatap muka, online / daring dan media sosial antara lain :

- Jakkonek merupakan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) digital dan elektronik. Jak Konek dibangun dengan teknologi, edukasi dan kolaborasi yang terintegrasi dengan berbagai platform digital yang dimiliki oleh OPD Propinsi Jakarta mulai dari mall pelayanan publik, Jakpreneur, digital library dan website dari 26 sekolah dan madrasah wilayah Jakarta Barat, website Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, RPTRA di 8 kelurahan Jakarta Barat, Bea Cukai dan PT. Pos Pasar Baru
- Aripin (Asupan Rabuan Pintar): media informasi berupa infografis mengenai Obat dan Makanan yang diunggah melalui media sosial Instagram, Facebook, dan X BBPOM di Jakarta.
- Monas (Mobil Pengawasan Jajanan Anak Sekolah): Layanan kunjungan mobil laboratorium untuk pengawasan jajanan anak sekolah. Dengan semangat “Melindungi dan Melayani Anak Sekolah”, MONAS akan berkunjung ke sekolah memberikan edukasi keamanan pangan jajanan anak sekolah serta melakukan pengujian cepat (rapid test) terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang dicurigai mengandung 4 bahan berbahaya (Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow)
- Kosidah (Kilas Informasi Berfaedah BBPOM di Jakarta): inovasi penyebaran dan pemberian informasi berupa Tips-tips terkait Obat dan Makanan dengan tema menyesuaikan agenda setting Badan POM yang dikemas dalam bentuk infografis dan/ atau videografis untuk disosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial

BBPOM di Jakarta (Instagram, X, dan Facebook) serta portal Simponi BPOM setiap satu bulan sekali.

- Selayar Jakarta (Sosialisasi Edukasi Online Untuk Masyarakat Jakarta) merupakan bentuk kegiatan KIE dengan berbagai tema dilakukan secara daring dan berkala. Diharapkan melalui KIE Selayar maka kendala keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dapat diatasi sehingga dapat memperluas jangkauan publikasi informasi keamanan obat dan makanan kepada berbagai kelompok masyarakat
- (Learning Space For Cadres of BBPOM - LSC BBPOM merupakan wadah pengembangan kompetensi bagi kader keamanan pangan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas dalam keamanan pangan
- Dan lainnya.

Monitoring dan evaluasi secara berkala senantiasa dilakukan, untuk memastikan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan efektif dan berdampak positif kepada masyarakat, meliputi :

- a. Tingkat Efektifitas KIE yang menunjukkan pencapaian melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian 96,73 (kriteria sangat efektif sekali)
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat yang menunjukkan pencapaian yang meningkat dari tahun ke tahun (IKM tahun 2024 : 95,80 dan tahun 2025 : 97,97)

7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Pandemi Covid19 pada Tahun 2020 merupakan bencana global yang mampu dihadapi secara responsif oleh Badan POM. Pada era pandemi, BBPOM di Jakarta bergerak cepat dan berpartisipasi aktif sebagai salah satu laboratorium Badan POM yang mendapat sertifikat NAR untuk pengujian sampel Covid19. Berbagai inovasi muncul seperti audit dan konsultasi secara daring, pemanfaatan media digital dan media sosial sebagai sarana KIE, agar tugas fungsi tetap dapat dilaksanakan secara optimal ditengah berbagai hambatan dan keterbatasan. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Badan POM merupakan organisasi yang *agile* dan adaptif.

Selain itu, program prioritas Badan POM diimplementasikan dengan

optimal di BBPOM di Jakarta, seperti kemandirian sediaan farmasi nasional termasuk obat bahan, inovasi regulasi misalnya terkait stunting, *cosmetic refilling* (kosmetik isi ulang), pengembangan probiotik, kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) guna menekan faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah.

8. Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara

Sebagai unit pelaksana teknis yang berlokasi di episentrum pemerintahan dan ekonomi nasional, BBPOM di Jakarta memiliki akses strategis terhadap jejaring kebijakan, inovasi teknologi, dan pertukaran pengetahuan tingkat nasional maupun internasional. Posisi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk pengawasan di wilayah DKI Jakarta, tetapi telah berkembang menjadi pusat rujukan dan advisory bagi UPT BPOM lainnya.

Bukti Pengakuan Nasional sebagai Rujukan Teknis:

- Studi Tiru Implementasi Inovasi: BBPOM di Jakarta telah menjadi destinasi utama studi tiru bagi setidaknya 6 UPT, termasuk BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Jambi, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Pontianak, BBPOM di Kendari, dan BBPOM di Denpasar.
- Sharing Knowledge Teknis: Permintaan berkelanjutan untuk berbagi keahlian teknis dari UPT termasuk BBPOM di Aceh, BBPOM di Serang, dan BBPOM di Pontianak mencakup bidang pengawasan obat dan makanan, implementasi sistem digital, dan manajemen laboratorium.

Fungsi Advisory yang Telah Dijalankan:

- Konsultan Teknis Pengawasan Berbasis Risiko: BBPOM di Jakarta secara aktif menjadi konsultan teknis bagi UPT lain dalam menerapkan pengawasan berbasis risiko, dengan panduan praktis seperti penyusunan matriks penilaian risiko untuk penentuan prioritas inspeksi sarana, strategi pengambilan sampel berbasis parameter risiko produk, serta pemanfaatan dashboard real-time untuk identifikasi tren pelanggaran. Metodologi terstruktur ini telah terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan dan dapat langsung diadopsi oleh UPT mitra.
- Pendampingan Implementasi Inovasi Digital: Membimbing UPT lain dalam mereplikasi model inovasi seperti UMKM Jawa, LAILA24, Laron Baja, dan sistem terintegrasi lainnya.

- Pengembangan Kapasitas Laboratorium: BBPOM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian mutakhir yang tidak hanya terakreditasi secara nasional, tetapi juga terus berinovasi dalam penerapan praktik laboratorium yang berkelanjutan. Bukti nyata komitmen ini diwujudkan melalui inovasi Eco Office Lab - sebuah konsep operasional laboratorium yang mengutamakan praktik ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya melalui digitalisasi proses. Keberhasilan implementasi konsep ini telah diakui secara nasional dengan meraih penghargaan Green Laboratory Tahun 2024. Kapabilitas laboratorium BBPOM di Jakarta telah menjadikannya sebagai rujukan nasional bagi UPT BPOM lainnya. Setidaknya 6 UPT BPOM telah melakukan studi tiru dan permintaan sharing knowledge teknis terkait implementasi green laboratory

Dengan memanfaatkan posisi strategisnya, BBPOM di Jakarta tidak hanya menjadi pengawas di wilayah ibu kota, tetapi bertransformasi menjadi knowledge hub dan center of excellence yang memperkuat kapasitas seluruh jejaring BPOM secara nasional, sekaligus mendorong standarisasi dan sinergi pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional.

1.1.2 Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BBPOM di Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Keterbatasan jumlah dan keahlian sumber daya manusia (SDM)

Keterbatasan jumlah dan distribusi sumber daya manusia (SDM) berdampak langsung pada kemampuan untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta. Analisis Beban Kerja pegawai BBPOM di Jakarta

sampai dengan Desember 2024 sebesar 75.54%, dengan kekurangan jumlah pegawai sebanyak 42 orang. Dari persentase pemenuhan tersebut masih terdapat pegawai yang belum menduduki jabatan fungsional tertentu, sehingga perlu ditingkatkan karirnya.

Balai Besar POM di Jakarta menjalankan fungsi teknis pemeriksaan, pengujian, penindakan dan infokom. Rata - rata pemenuhan kebutuhan untuk jabatan teknis pengawas farmasi dan makanan pada fungsi fungsi tersebut sebesar 50 - 60%. Gap ini dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang ditempatkan pada fungsi teknis akan tetapi belum dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dikarenakan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan serta beberapa pegawai yang telah memasuki pensiun dan tidak ada pengadaan pegawai baru untuk BBPOM Jakarta.

Dengan kompleksitas penduduk serta jumlah sarana pengawasan yang besar, tidak memungkinkan untuk dilakukan pengawasan Obat dan Makanan ke tiap sarana serta pemberdayaan ke setiap penduduk secara keseluruhan. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas BBPOM di Jakarta untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Sampai dengan tahun 2024, fungsi Informasi dan Komunikasi di BBPOM di Jakarta hanya dilakukan oleh Pejabat Pengawas Farmasi Makanan (PFM) dalam jumlah terbatas. Dibutuhkan tenaga ahli lain seperti pranata humas yang memiliki tugas lebih spesifik dalam publikasi informasi. Selain itu, masih terdapat pegawai pada setiap fungsi juga mendapatkan penugasan tambahan di luar tugas pokok dan fungsi diantaranya terlibat dalam tim pengelolaan kearsipan, tim pelaporan kinerja dan lain-lain. Hal ini juga menghambat kemampuan BBPOM di Jakarta dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Pola mutasi atau rotasi antar fungsi di BBPOM di Jakarta masih belum

optimal. Penempatan pegawai telah mempertimbangkan kompetensi, potensi, dan kebutuhan jabatan, namun rotasi pegawai yang dilakukan pada awalnya dapat memberikan dampak negatif bagi fungsi penempatan baru, dimana kompetensi pegawai yang dimutasi tersebut menjadi belum terpenuhi pada fungsi penempatan baru. Hal ini dapat mempengaruhi gap kompetensi personil pada fungsi/bidang penempatan. Pelaksanaan mutasi dan rotasi internal antar fungsi BBPOM di Jakarta belum dilakukan secara periodik dan terencana, sehingga pembinaan karier pegawai dan pengalaman penempatan di berbagai fungsi masih sangat terbatas.

Pelaksanaan mutasi dan rotasi pegawai masih perlu ditingkatkan. Saat ini, mutasi/rotasi pegawai antar fungsi belum sepenuhnya berbasis pada analisis jabatan dan kebutuhan organisasi, melainkan lebih bersifat situasional. Akibatnya, kesempatan pengembangan kompetensi dan pemerataan beban kerja belum merata di seluruh unit. Beberapa pegawai dengan kualifikasi pendidikan tertentu hanya dapat ditempatkan pada fungsi yang sesuai dengan ketentuan, misalnya pegawai dengan pendidikan S1 Kriminolog dan atau S1 Hukum akan didorong kariernya untuk menjadi Expertis pada fungsi penindakan. Untuk mengoptimalkan pola mutasi/rotasi diperlukan beberapa langkah strategis diantaranya:

1. Pemetaan kompetensi pegawai secara menyeluruh, termasuk riwayat kompetensi di berbagai fungsi penempatan pegawai.
2. Sistem rotasi secara terencana dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pengembangan karir pegawai.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penempatan pegawai setelah dilakukannya mutasi/rotasi pegawai.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengawasan obat dan makanan, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, serta dinamika risiko pada produk obat dan makanan, kebutuhan akan tenaga profesional di bidang Teknologi Informasi (IT) dan Manajemen Risiko menjadi semakin mendesak. Hingga tahun 2024, Balai Besar POM di Jakarta baru memiliki pegawai dengan Jabatan Pranata Komputer selaku pengelola IT sebanyak 1 orang. Sedangkan kebutuhan untuk digitalisasi pelaporan semakin meningkat. Tenaga **IT** berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pengawasan, integrasi data lintas sektor, serta penerapan teknologi digital seperti big data, artificial intelligence, dan Internet of Things (IoT) untuk mendukung *data-driven regulation*. Dengan

dukungan IT yang andal, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Sementara itu, tenaga Manajemen Risiko dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi risiko pada setiap tahap proses pengawasan. Hingga tahun 2024, baru terdapat 2 orang pegawai yang telah lulus dan mengikuti diklat Ahli Manajemen Risiko. Pendekatan berbasis risiko memungkinkan sumber daya pengawasan difokuskan pada area yang memiliki potensi bahaya tertinggi bagi kesehatan masyarakat, sehingga kebijakan dan tindakan pengawasan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Keterbatasan jumlah dan keahlian sumber daya manusia (SDM) di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap kinerja dan efektivitas seperti halnya dengan jumlah SDM yang terbatas, pengawasan terhadap peredaran obat, makanan, kosmetik, dan produk lainnya di wilayah kerja BBPOM Jakarta bisa menjadi tidak optimal. Di sisi lain kegiatan pengawasan rutin ke industri, pasar, dan distribusi produk menjadi tidak merata atau tertunda. Jika sebagian besar SDM belum memiliki keahlian spesifik juga dapat inefisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi nya seperti halnya pengawasan terhadap produk-produk baru menjadi kurang efektif. serta proses verifikasi, pengujian laboratorium, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran bisa memakan waktu lebih lama karena tenaga ahli terbatas. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap ketegasan BBPOM Jakarta dalam melindungi masyarakat. Jika apabila melihat dari keterbatasan jumlah dan anggaran SDM menyebabkan kesempatan pelatihan atau sertifikasi menjadi terbatas maka berakibat kemampuan teknis dan manajerial tidak berkembang secara merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas SDM menjadi aspek strategis yang perlu diperhatikan untuk mendukung kinerja BBPOM Jakarta secara berkelanjutan.

2. Gap kompetensi pegawai pada kompetensi manajerial dan sosial kultural

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai di BBPOM di Jakarta menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas fungsi pengawasannya. Ketidakseimbangan ini menciptakan inefisiensi dalam alur kerja, di mana sebagian pegawai mungkin merasa kelebihan beban sementara lainnya kurang

dimanfaatkan. Situasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan di antara pegawai tetapi juga menurunkan kinerja keseluruhan, karena tugas-tugas kritis mungkin tidak diselesaikan dengan standar yang diperlukan atau dalam waktu yang tepat. Kesenjangan kemampuan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi prosedur pengawasan yang harus dijalankan dengan presisi. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan kompetensi antar pegawai dapat mengancam kemampuan BBPOM di Jakarta untuk menjaga standar keamanan obat dan makanan. Tugas-tugas pengawasan memerlukan pemahaman mendalam dan keahlian yang beragam di seluruh organisasi untuk memastikan bahwa semua regulasi dan standar dipatuhi dengan baik. Tanpa adanya level kompetensi yang setara di antara staf, BBPOM di Jakarta berisiko mengalami kerentanan dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan publik. Oleh karena itu, menjembatani kesenjangan kompetensi melalui pelatihan yang beragam dan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan keandalan dan integritas lembaga pengawas ini.

Dalam implementasi merit sistem di BPOM, aspek kompetensi SDM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian selain aspek kualifikasi dan kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kompetensi yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode 2020- 2024 capaian kompetensi SDM BBPOM di Jakarta saat ini sebanyak 30.91% telah memiliki kompetensi optimal, 44.55% Cukup Optimal dan 24.55% Kurang Optimal. Penyebab utama terjadinya gap kompetensi pegawai pada kompetensi manajerial dan sosial kultural salah satunya yaitu kurangnya pengalaman manajerial, mengelola tim kerja, kolaborasi lintas fungsi dan budaya kerja yang masih sektoral. Selain itu coaching dan mentoring internal pegawai belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebagian pegawai belum diberikan penugasan untuk memimpin tim kerja yang menyebabkan kemampuan dalam mengarahkan, mengambil keputusan, dan memotivasi anggota tim masih terbatas. Masih minimnya pelatihan manajerial secara berjenjang dan belum menyentuh semua level pegawai. Pelatihan yang ada lebih sering berfokus pada aspek teknis/substantif, bukan penguatan *soft skills* seperti komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi, sehingga berpengaruh pada gap kompetensi manajerial dan sosial kultural.

Berdasarkan hasil penilaian kompetensi diperoleh kesenjangan/gap kompetensi pada kompetensi manajerial terkait Pengembangan diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan yang memiliki gap

tertinggi pada kompetensi terkait Perekat Bangsa (sosiokultural). Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017. Adapun gap kompetensi menjadi salah satu acuan dalam program pengembangan kompetensi.

3. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi

Meningkatnya permintaan layanan perizinan di bidang Obat dan Makanan dari waktu ke waktu, telah membuat BPOM melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki kualitas dan kecepatan layanan. Namun demikian, masih dimungkinkan adanya ketidakpuasan dalam layanan ini.

Strategi yang signifikan mempengaruhi posisi lembaga dalam ekosistem kesehatan nasional dan internasional. Dari sudut pandang strategis, kelemahan ini menandakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali dan mereformasi proses internal, yang mungkin melibatkan audit sistematis dari alur kerja, penilaian terhadap kebijakan saat ini, dan investasi dalam teknologi baru. Penundaan dalam pemberian izin dapat menghambat inovasi dan memperlambat respon pasar terhadap produk kesehatan yang dibutuhkan, mengurangi daya saing industri dalam negeri di mata pasar global.

Layanan perizinan terkait langsung dengan beberapa instansi pemerintah yang membutuhkan peninjauan ulang peraturan dan segregasi wewenang. Hal ini didasari dengan beberapa peraturan yang tidak sinergi serta pembagian fungsi kewenangan yang tumpang tindih. Strategi untuk mengatasi kelemahan ini perlu menyasar pada peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan stakeholders untuk memastikan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan perannya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memajukan kesehatan masyarakat dan inovasi di bidang obat dan makanan.

4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPOM, infrastruktur pelayanan publik disediakan guna menunjang pengawasan obat dan makanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Infrastruktur pelayanan publik BBPOM di Jakarta meliputi gedung kantor serta sarana prasarana pendukungnya. Saat ini

BBPOM di Jakarta terus berupaya memenuhi kriteria sarana prasarana layanan publik seperti area parkir, lobby layanan, area bermain anak, laktasi, area disabilitas dan seterusnya. Namun keterbatasan luasan area kantor BBPOM di Jakarta menyebabkan belum optimalnya pemenuhan sarana layanan publik terutama pada sisi luasan sesuai kriteria yang ditetapkan pada *Grand Design Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan* pada tahun 2021 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 227 Tahun 2024. Selain itu masih terdapat sarana yang belum dimiliki oleh BBPOM di Jakarta yaitu rumah dinas pimpinan, fasilitas perkantoran termasuk meubelair yang modern, serta media informasi digital yang representatif dan canggih.

5. Kesenjangan Kapasitas Laboratorium

Dengan terbitnya kebijakan regionalisasi, terdapat kesenjangan kapabilitas Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan (Lab POM) yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam kualitas pengujian dan pengawasan obat dan makanan. Perbedaan ini mencakup variasi dalam kualitas dan kuantitas instrumen laboratorium, ruang lingkup pengujian yang dapat dilakukan, serta tingkat kompetensi penguji. Keterbatasan luasan BBPOM di Jakarta berpengaruh besar terhadap pemenuhan standar peralatan yang berdampak pada terbatasnya kemampuan uji dan kompetensi personil. Sehingga apabila terdapat kasus khusus seperti Kasus KLB tidak dapat direspon cepat.

6. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BPOM dalam memahami pola, tren, dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung proaktifitas lembaga dalam regulasi dan pengawasan.

Kelemahan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data akan menghambat kemampuan BPOM untuk memanfaatkannya secara efektif. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini

membatasi potensi BPOM untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar keselamatan yang tinggi.

BBPOM di Jakarta terus memperkuat kemitraan dengan stakeholder / lintas sektor dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala sebagai upaya memastikan efektifitas terhadap kolaborasi dan kerjasama yang ada. Kelemahan pada tataran ini adalah belum optimalnya skema monitoring evaluasi yang terintegrasi, dimana saat ini monitoring evaluasi program atau kegiatan masih dilakukan secara parsial dengan masing-masing indikator keberhasilan program. Untuk itu selanjutnya akan disusun mekanisme monitoring evaluasi sinergi atau kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi dan secara berkala melibatkan pihak terkait tingkat provinsi, kota/kabupaten dan pusat paling sedikit setahun sekali.

7. Implementasi Pengarusutamaan Gender Belum optimal

Data terpilah/ data gender merupakan salah satu prasyarat dalam pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender. Data tersebut merupakan salah satu data pembuka wawasan yang menjadi landasan untuk menggali kesenjangan gender dalam analisis gender. Dengan belum memadainya ketersediaan data terpilah baik pada populasi, pelaksana kegiatan maupun sasaran kegiatan (pelaku usaha, masyarakat, mitra kerja), maka pelaksanaan analisis gender belum dapat dilakukan secara komprehensif.

I.1.3 Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan untuk memposisikan diri sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa BBPOM di Jakarta telah sejalan dengan program pengawasan keamanan obat dan makanan Nasional. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan yang memutar roda ekonomi secara domestik, nasional bahkan global. Dengan jumlah penduduk sebesar 11 juta jiwa, Provinsi DKI Jakarta merupakan pasar produk obat dan makanan yang potensial dan tengah berkembang. Hal ini mempresentasikan sebuah peluang bagi BBPOM di Jakarta untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BBPOM di Jakarta berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BBPOM di Jakarta kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BBPOM di Jakarta dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

BBPOM di Jakarta memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dari Provinsi menuju pasar nasional dan pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti *Good Manufacturing Practice* (GMP), BBPOM di Jakarta dapat mendorong industri dalam negeri untuk tidak hanya memenuhi tetapi melebihi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan terstruktur, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen dalam negeri agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, BBPOM di Jakarta tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka

untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya BPOM di Jakarta dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah.

Indonesia memiliki potensi besar dalam industri kreatif dan industri kecil-menengah (IKM), terutama di sektor makanan, minuman, kosmetik, dan produk herbal. Namun, banyak pelaku usaha kreatif yang menghadapi kendala dalam:

1. Memahami standar keamanan dan mutu produk,
2. Mengurus izin edar dari BPOM,
3. Mengakses fasilitas produksi yang memenuhi standar industri, serta
4. Mengembangkan kemasan dan branding yang sesuai dengan regulasi.

Untuk mengatasi kendala ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan:

1. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), yang kini menjadi bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan
2. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meluncurkan Program Inkubasi Produk Aman.

Program ini dirancang untuk:

1. Meningkatkan kapasitas pelaku industri kreatif agar memahami pentingnya keamanan dan mutu produk.
2. Mendorong daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.
3. Mempercepat proses legalitas usaha, khususnya dalam memperoleh izin edar dari BPOM.
4. Membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan, di mana

pelaku industri kecil didampingi hingga siap memproduksi sesuai standar.

5. Meningkatkan literasi regulasi di kalangan wirausahawan kreatif, sehingga mereka dapat berinovasi tanpa melanggar ketentuan keamanan pangan atau kosmetik.

Kemitraan strategis antara BPOM, BEKRAF, dan Kemenperin melalui Program Inkubasi Produk Aman merupakan langkah penting dalam membangun industri kreatif yang aman, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Program ini tidak hanya membantu pelaku usaha memahami regulasi, tetapi juga memperkuat posisi produk lokal di pasar global dengan standar mutu yang terjamin.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Adaptasi BPOM terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BBPOM di Jakarta untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BBPOM di Jakarta dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BBPOM di Jakarta untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat

BBPOM di Jakarta menggunakan integrasi aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi. Dalam pelaksanaan teknisnya, BBPOM di Jakarta mengembangkan layanan digital untuk memudahkan petugas dan masyarakat pengguna layanan seperti layanan konsultasi, informasi dan pengaduan online 24 jam, nomor antrian online, pengajuan persetujuan denah PBF online. Selain itu, BBPOM di Jakarta bekerjasama bersama *stakeholder* terkait untuk memperluas layanan melalui strategi KIE online JakKonek yang terintegrasi pada *website stakeholder*.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. BBPOM di Jakarta siap mengimplementasikan semua kebijakan yang ditetapkan oleh Badan POM dengan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

dengan arah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Program ini didukung oleh berbagai kebijakan nasional, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong transformasi digital di seluruh instansi pemerintah.
2. Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRB) 2020–2025, yang menekankan pada peningkatan kinerja, akuntabilitas, serta inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. RPJMN 2020–2024, yang menempatkan digitalisasi pemerintahan sebagai strategi utama dalam peningkatan daya saing dan efisiensi pelayanan publik.

Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kemudahan layanan publik melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.

Langkah Integrasi:

1. Fokus pada Dampak: Ubah orientasi sasaran Renstra dari *output-based* menjadi *outcome-based* yang mendukung peningkatan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sinkronisasi Program Reformasi: Pastikan setiap program dan kegiatan dalam Renstra mendukung tema RB Tematik (misalnya: kemudahan akses layanan, pelayanan cepat, integrasi lintas instansi).
3. Inovasi Layanan Publik: Dorong digitalisasi layanan melalui platform SPBE sebagai bagian dari strategi RB Tematik.
4. Penguatan SDM dan Budaya Kerja: Sertakan strategi peningkatan kompetensi ASN di bidang pelayanan publik dan teknologi digital.
5. Pemantauan dan Evaluasi Terpadu: Gunakan indikator seperti:
 - a. Indeks RB Tematik Pelayanan Publik
 - b. Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)
 - c. Jumlah inovasi pelayanan publik terimplementasi

3. Kolaborasi dengan *stakeholders*

Sebagaimana salah satu Asta Cita Presiden RI, yaitu “Mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau dan biru serta hilirisasi industri berbasis riset dan inovasi”, dalam konteks pengawasan Obat dan Makanan terdapat ruang integrasi antara sistem pengawasan dengan ekosistem inovasi nasional, termasuk perguruan tinggi serta industri kecil dan menengah. Peluang BBPOM di Jakarta untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik

terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BBPOM di Jakarta dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas seperti yang saat ini telah dibangun antara BBPOM di Jakarta dan Universitas Pancasila, dapat diperluas menjadi fasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan serta hilirisasi hasil penelitian *civitas academica* untuk pengembangan/diversifikasi produk baru. BBPOM di Jakarta merupakan lokus visitasi dalam kegiatan kolaborasi dengan lembaga internasional yang bermanfaat untuk mendapatkan gambaran keselarasan regulasi dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

BBPOM di Jakarta secara aktif membangun kolaborasi strategis dengan dunia akademik dan penelitian dalam mendukung pengawasan berbasis bukti dan inovasi regulasi. Implementasi nyata telah dilakukan melalui publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional serta fasilitasi akses data pengawasan melalui PPID untuk mendukung riset mahasiswa. Kolaborasi strategis telah dijalin dengan Universitas Pancasila, Institut Tarumanegara, dan Poltekkes Kemenkes Jakarta yang tidak hanya mencakup riset pengembangan obat dan makanan, tetapi juga program hilirisasi hasil riset yang ditransfer langsung kepada pelaku usaha UMKM untuk pengembangan produk inovatif. Ke depan, melalui skema kerja sama yang telah terbangun, akan diadakan kolaborasi riset lebih lanjut antara BBPOM di Jakarta dengan lembaga pendidikan tersebut untuk memperkuat ekosistem inovasi. Sebagai tindak lanjut, BBPOM di Jakarta menginisiasi Forum Riset dan Kebijakan Obat dan Makanan Jakarta Raya serta mengembangkan regulatory sandbox sebagai wadah uji coba inovasi produk hasil riset bersama universitas

Pemendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan diimplementasikan oleh BBPOM di Jakarta melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 330 Tahun 2024. Tindak lanjut dari pembentukan TKPPOM adalah kolaborasi kegiatan yang lebih intensif bersama pemangku kepentingan. Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar sinergi program, tetapi mengarah pada pembentukan aliansi

dan jejaring yang dapat mendukung pencapaian asta cita selaras dengan inisiatif kebijakan BPOM.

Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat membantu BPOM untuk memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru.

4. Tingginya antusiasme peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, BBPOM di Jakarta memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BBPOM di Jakarta dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Indikator keberhasilan edukasi publik salah satunya dilakukan melalui pengukuran Indeks efektivitas KIE. Sejak ditetapkan pada tahun 2020, Indeks efektivitas KIE BBPOM di Jakarta terus meningkat semula 93,02 menjadi 96.73 pada tahun 2024 (berada pada kategori Sangat Efektif).

BBPOM di Jakarta memiliki inovasi JakKonek sebagai Strategi Digitalisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dalam Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendukung Ekosistem Digital di Provinsi DKI Jakarta. Strategi ini meningkatkan pengetahuan dan interaksi dengan masyarakat melalui berbagai media, baik berupa media luar ruang, media sosial maupun penggunaan *Augmented Reality* untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya secara interaktif.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BBPOM di Jakarta dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan

masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BBPOM di Jakarta untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

5. Kebijakan kesehatan global dan perdagangan bebas

Inisiatif & kampanye utama BBPOM di Jakarta:

1. Kampanye **Cek KLIK** (Cek Kemasan, Label, Izin edar, Kedaluwarsa)

Diluncurkan untuk mengajak masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dan berdaya dengan mengecek empat aspek penting produk sebelum membeli.

2. Sebagai bagian dari kampanye ini, BPOM menyediakan aplikasi BPOM Mobile yang memungkinkan pengecekan izin edar produk & pelaporan produk bermasalah secara daring.
3. Literasi digital-kesehatan & kampanye generasi milenial. BPOM menyadari bahwa masyarakat sekarang banyak berinteraksi di ranah digital dan media sosial, sehingga perlu strategi edukasi yang berbasis digital. Sebagai contoh: program Gemilang Indonesia Emas
4. Dalam program tersebut, BPOM melibatkan penjual daring (seller), influencer, content creator dan platform marketplace untuk menyebarkan konten literasi kesehatan digital
5. Pengawasan dan regulasi promosi daring
Mengingat banyak promosi produk obat, makanan, kosmetik yang dilakukan lewat media sosial dan daring, BPOM melakukan sosialisasi/pembatasan terhadap klaim iklan yang tidak berdasar.
6. Laporan kinerja 2024 menyebutkan bahwa BPOM melakukan banyak kegiatan KIE melalui media sosial resmi, WhatsApp blast, aplikasi, booth pameran media digital, video layanan masyarakat.

BBPOM di Jakarta senantiasa berkomitmen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman melalui berbagai program inovasi. Salah satu strategi yang terus dikembangkan adalah intensifikasi pemanfaatan berbagai media, seperti media sosial, media digital, media elektronik, dan media luar

ruang, dalam penyebaran informasi serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Untuk memperkuat upaya ini, telah dibentuk Tim Pengelola Media BBPOM di Jakarta yang berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi strategi komunikasi digital secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Inovasi Mindset Jakarta (Manajemen Informasi dan *Social Engagement & Timeline* BBPOM di Jakarta) merupakan inovasi pengelolaan informasi yang sistematis dan terintegrasi melalui platform digital dan media sosial. Melalui pendekatan ini, seluruh informasi yang disampaikan oleh BBPOM Jakarta menjadi lebih terorganisir, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Informasi yang dibagikan mencakup pengawasan Obat dan Makanan, materi edukasi Obat dan Makanan baik untuk masyarakat secara umum, *stakeholders* maupun UMKM di bidang obat dan makanan, informasi pelayanan publik, trivia, publikasi kinerja dan kegiatan strategis BBPOM di Jakarta serta konten kuis interaktif.

Sebagai tindak lanjut dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, BBPOM di Jakarta akan mengembangkan “Kampanye Cerdas Konsumen Digital” berbasis media sosial. Kampanye ini dirancang untuk memperkuat literasi masyarakat melalui penyampaian pesan edukatif yang menarik, interaktif, dan mudah dipahami, dengan mengedepankan pendekatan visual, *storytelling* serta kolaborasi dengan komunitas dan *influencer* relevan. Selain itu, akan diluncurkan pula program edukasi interaktif dengan elemen gamifikasi, seperti kuis dan tantangan daring untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami dan menerapkan praktik keamanan obat dan makanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui sinergi strategi komunikasi digital yang kreatif dan inovatif tersebut, diharapkan kesadaran serta perilaku masyarakat terhadap pentingnya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat semakin meningkat, sekaligus memperkuat posisi BBPOM di Jakarta sebagai otoritas yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik yang modern.

Di era globalisasi dan meningkatnya integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas, BPOM menghadapi peluang signifikan untuk meningkatkan peran dan pengaruhnya di dunia internasional. Harmonisasi regulasi dengan standar internasional merupakan langkah strategis yang memungkinkan BPOM tidak hanya

memastikan keamanan, efikasi, dan kualitas produk pangan dan obat yang beredar di dalam negeri tetapi juga memperkuat posisi produk dalam negeri dalam persaingan global. Dengan mengadopsi dan menerapkan standar internasional, seperti *Codex Alimentarius* untuk pangan dan *Good Manufacturing Practice* (GMP) untuk obat, BPOM dapat memfasilitasi akses produk dalam negeri ke pasar global lebih luas. Ini menuntut upaya kolaboratif dengan berbagai stakeholder, termasuk industri, asosiasi perdagangan, dan lembaga internasional, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang diakui secara global.

Dari sudut pandang strategis, kebijakan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen di dalam negeri. Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

6. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

7. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta mengembangkan One Stop Service for Product Consultation, yaitu layanan terpadu satu pintu yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan konsultasi terkait produk obat, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan, dan suplemen kesehatan.

Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat memperoleh informasi dan bimbingan teknis secara cepat dan terintegrasi, mulai dari persyaratan registrasi, aspek keamanan dan mutu produk, hingga pendampingan dalam proses perizinan.

Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, transparansi proses, serta daya saing industri melalui pendampingan yang profesional dan berbasis data. Dengan adanya One Stop Service ini, BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha dalam mewujudkan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan

penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Peluang ini juga memungkinkan BPOM untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi industri

kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, BPOM tidak hanya memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru tetapi juga membuka jalan bagi ekspor produk kesehatan Indonesia yang memenuhi standar internasional. Hal ini secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci di pasar kesehatan global, mempromosikan keunggulan ilmiah dan inovasi nasional. Dengan demikian, fokus pada pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif tidak hanya menguntungkan kesehatan publik tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan profil internasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan inovasi.

BBPOM di Jakarta telah mengimplementasikan dukungan penuh untuk kualitas hilirisasi pengembangan obat bahan alam dan kosmetik hasil suatu penelitian menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka serta kosmetik baru. Hal ini terlihat dari inisiasi kerjasama dengan Universitas Pancasila.

Selain itu, BPOM juga melakukan kegiatan fasilitasi standardisasi keamanan, mutu, dan manfaat produk inovasi pangan olahan, yang bertujuan untuk mendukung hilirisasi dan komersialisasi hasil riset di bidang pangan agar produk-produk inovatif dari kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Kegiatan fasilitasi berupa pengkajian dan penyusunan standar dan regulasi bahan alam sebagai bahan tambahan pangan (BTP), bahan penolong, dan bahan baku pangan baru.

I.1.4 Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM Jakarta) sedang mengadopsi teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) serta aktif menjalin koordinasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan pengawasan produk obat dan makanan. BBPOM bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji pemanfaatan AI dalam pengawasan produk pangan olahan pra-pasar (pre-market) untuk mendeteksi potensi pelanggaran mutu dan keamanan. Walaupun ada kemajuan, BBPOM/BRIN menyebut bahwa kesiapan adopsi AI masih berada pada “level potensial” untuk beberapa aspek, artinya masih perlu transformasi lebih lanjut dari sisi infrastruktur, SDM, regulasi dan etika AI. Pengawasan produk yang dijual lewat e-commerce sangat kompleks karena volume besar, lintas wilayah, platform berbeda, serta metode pengiriman yang sulit dilacak. Sehingga kolaborasi dengan platform e-commerce dan mekanisme teknologi menjadi sangat penting.

BBPOM Jakarta melaporkan melalui pengawasan daring bahwa ribuan produk ilegal (obat tanpa izin edar) dijual melalui e-commerce di wilayah Jakarta Barat. Contohnya: BBPOM menyita lebih dari 9.000 kemasan sediaan farmasi ilegal dari pedagang online.

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi

kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

2. Dinamika pasar yang cepat

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta membentuk Regulatory Foresight Unit, sebuah unit khusus yang berfungsi untuk mengantisipasi dan mempersiapkan perubahan regulasi di masa depan. Unit ini akan berperan dalam melakukan

kajian strategis, analisis tren global, serta identifikasi potensi risiko dan peluang di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan adanya unit ini, BBPOM di Jakarta berharap dapat lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan nasional dan internasional, sehingga pengawasan obat dan makanan tetap efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memastikan kebijakan tetap efektif dan relevan, BBPOM di Jakarta secara berkala melaksanakan quick policy review guna mengevaluasi dampak penerapan kebijakan terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

BBPOM di Jakarta sebagai pelaksana teknis pada garda terdepan, melakukan interaksi langsung dengan masyarakat pengguna layanan. Kondisi koordinasi antar lembaga yang belum sinergis, merupakan tantangan dalam sinkronisasi kebijakan dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit.

Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan tahun 2023, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 23 pada tingkat Provinsi (67,55%) dan 214 pada tingkat Kabupaten/Kota (41,63%). Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman ini, perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Sebagai UPT, BBPOM di Jakarta harus mampu menghadapi tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang tepat agar kebijakan yang telah diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri dikelola dengan baik agar tidak menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

Untuk mengatasi tantangan sistem pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Jakarta perlu terus mengembangkan strategi komunikasi publik yang proaktif, konsisten, dan berbasis data. Mengembangkan strategi komunikasi risiko untuk penyampaian hasil pengawasan Obat dan Makanan, pemanfaatan platform daring resmi untuk melakukan kampanye publik, klarifikasi isu Obat dan Makanan dan lainnya. Selain itu dibutuhkan transparansi data untuk membangun

kepercayaan publik yang dapat diakses oleh publik mengacu pada keterbukaan informasi publik antara lain penyediaan portal satu data (open source), penyampaian laporan kinerja secara berkala, mengembangkan mekanisme umpan balik yang partisipatif dari masyarakat.

5. Krisis kesehatan global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta

kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membangun

kolaborasi dengan sektor swasta. Tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sumber pendanaan, tetapi juga memperkuat tanggung jawab sosial dunia usaha (*corporate social responsibility* / CSR) untuk berperan aktif dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Bentuk kolaborasi yang dapat digunakan antara lain kampanye edukatif, pelatihan, kampanye edukasi digital, kemitraan riset dan inovasi dan lainnya.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Isu lingkungan dan keberlanjutan menjadi semakin strategis dalam dinamika pasar saat ini, mendorong tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perubahan ini menciptakan tantangan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menyesuaikan kerangka regulasi dan pengawasan untuk memenuhi ekspektasi baru tersebut. Kesadaran masyarakat yang meningkat

terhadap isu

lingkungan berdampak pada preferensi konsumsi, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk yang tidak hanya aman dan efektif tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang minimal. Tantangan ini bukan hanya terletak pada penilaian keamanan dan kualitas produk dari perspektif kesehatan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari produksi, distribusi, dan disposisi produk tersebut.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran cepat dalam standar industri yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan, serta tantangan dalam mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses regulasi dan pengawasan yang ada. BPOM harus menghadapi kesulitan dalam memastikan bahwa regulasi tidak hanya mendukung inovasi dan keamanan produk tetapi juga memperhitungkan praktik berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan. Selain itu, ada risiko reputasi jika BPOM dianggap tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengatasi isu lingkungan, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga. Meningkatnya tuntutan terhadap keberlanjutan juga bisa memicu kebutuhan untuk pengawasan baru terhadap klaim lingkungan produk, menambah kompleksitas tugas BPOM dalam menjaga integritas pasar obat dan makanan. Tantangan ini menunjukkan perlunya BPOM untuk mengadaptasi pendekatan regulasi yang lebih holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek kesehatan tetapi juga pertimbangan lingkungan dalam evaluasi dan pengawasan produk. Meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengubah dinamika pasar dan memerlukan penyesuaian dalam regulasi dan pengawasan oleh BPOM.

Sebagai bagian dari upaya *Global Initiative on Food Loss and Waste Reduction* yang bertujuan mengurangi pemborosan dan kerugian pangan secara global dan sejalan dengan standar internasional, BPOM mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan *food loss and food waste*. Kebijakan yang disusun antara lain mengenai kemasan pangan. Kemasan pangan olahan harus dirancang sehingga selain mampu memberikan fungsi perlindungan, wadah, penanganan, dan komunikasi, juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi/lingkungan dan sosial. Aspek ekologi yang penting adalah bagaimana kemasan pangan mampu mengurangi jumlah *food loss and food waste*.

8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Ancaman dari kontaminasi dan falsifikasi ini semakin diperumit oleh kompleksitas rantai pasok global, di mana produk dan bahan baku melewati berbagai tahapan produksi dan

distribusi. Ketidakjelasan dalam rantai pasok ini meningkatkan kesulitan dalam melacak sumber kontaminasi atau asal-usul produk palsu. Selain itu, kemajuan teknologi juga memudahkan pelaku untuk memalsukan produk dengan cara yang semakin canggih, membuat deteksi oleh pihak pengawas menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, risiko kontaminasi dan falsifikasi produk menuntut vigilansi yang terus menerus dan pengawasan yang lebih ketat oleh BPOM untuk menjaga keamanan produk dan melindungi kesehatan masyarakat.

Tabel 1.2 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Pengalaman dan kompetensi teknis SDM BPOM 4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi 5. Jaringan Laboratorium Pengujian yang Luas 6. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat 7. Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini 8. Kedudukan BBPOM di Jakarta di Ibukota Negara	Weakness 1. Keterbatasan jumlah dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Gap kompetensi pegawai terutama pada kompetensi manajerial dan sosialkultural 3. Keterbatasan Ketersediaan Sistem Layanan Perizinan yang Responsif, Terintegrasi, dan Adaptif terhadap Perkembangan Regulasi 4. Infrastruktur Pelayanan Publik yang belum memadai 5. Kesenjangan kapabilitas laboratorium 6. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki 7. Implementasi pengarusutamaan gender belum optimal
Opportunities 1. Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Kolaborasi dengan stakeholders 4. Peningkatan kesadaran masyarakat 5. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau 6. Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan	Threats 1. <i>E-commerce</i> dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan. 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antarlembaga 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis Kesehatan Global 6. Akselerasi perkembangan teknologi 7. Isu lingkungan dan keberlanjutan 8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BBPOM DI JAKARTA

2.1 Visi BBPOM di Jakarta 2025 – 2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, Badan POM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029 yang diacu BBPOM di Jakarta. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan, BBPOM di Jakarta dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BBPOM di Jakarta berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BBPOM di Jakarta untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BBPOM di Jakarta dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BBPOM di Jakarta. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BBPOM di Jakarta berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini

mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BBPOM di Jakarta mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat:** Tujuan akhir dari semua upaya BBPOM di Jakarta adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BBPOM di Jakarta menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BBPOM di Jakarta berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Rumusan visi BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BBPOM di Jakarta dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2 Misi BBPOM di Jakarta 2025 – 2029

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dibidang sediaan farmasi dan pangan olahan

Dalam menjalankan visi tersebut BBPOM di Jakarta menerapkan budaya ASN BERAKHLAK dan budaya kerja PIKKIR yang dimaknai sebagai berikut:

1. **Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. **Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. **Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. **Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. **Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. **Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.3 Tujuan Balai Besar POM di Jakarta:

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap

pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Balai Besar POM di Jakarta sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna

melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian

Kabupaten/Kota Pangan Aman

p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian

dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang

memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Tabel 2.1 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
1. Meningkatkan efektifitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi	1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu di wilayah kerja BBPOM di	1. Meningkatnya efektifitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	Jakarta		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
			5. Persentase sampel PIRT berisiko
			6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
			7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
			11. Persentase iklan sediaan farmasi dan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
			pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
			12. Persentase Label Produk Tembakau dan/ Rokok Elektronik yang diawasi Sesuai Standar
			13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta
			14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
			15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
			16. Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	2. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		3. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Jakarta
		4. Terlaksananya kegiatan deteksi	19. Persentase Laporan Analisis Kejahatan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
		kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	20. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	4. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	6. Meningkatnya efektivitas KIE	21. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 22. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 23. Jumlah desa pangan aman 24. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan	5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	7. Layanan Publik UPT yang prima 8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25. Indeks Pelayanan Publik UPT 26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 27. Nilai AKIP UPT BPOM

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan			
			28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
			29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
1	01-Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan secara kimia sesuai standar	Kesehatan pendengaran penguji terganggu karena kebisingan	1. Meminimalkan penggunaan sonikasi 2. Penggunaan ear muff saat alat digunakan	Ketua Tim Pengujian
2		Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan secara mikrobiologi sesuai standar	Personel uji terpapar virus/bakteri, reagen/bahan kimia	Penggunaan alat pelindung diri yang lengkap	Ketua Tim Pengujian
3		Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan secara kimia sesuai standar	Ketidaktepatan Hasil Pengujian	1. Pengujian yang dilakukan mengacu pada PS atau standard yang berlaku 2. Melaksanakan pemantauan baku pembanding tidak lebih dari 3 tahun sejak dibuka dan disimpan sesuai petunjuk penyimpanan 3. Pelatihan dan pelaksanaan uji banding 4. Dilakukan verifikasi secara rutin, kalibrasi alat, dan maintenance secara berkala 5. Melaksanakan Verifikasi Metode Analisa	Ketua Tim Pengujian
4		Pengujian Sediaan Farmasi secara mikrobiologi sesuai standar	Penyelesaian sampel mikrobiologi melewati batas akhir waktu pengujian	Menyiapkan media sebelum sampel datang, membuat jadwal pengujian dan pembagian alat gelas di laboratorium	Ketua Tim Pengujian
5		Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan secara kimia dan mikrobiologi sesuai standar	Terlambat mengajukan permohonan kalibrasi alat	Inovasi Simolat (sistem monitoring alat), riwayat kalibrasi alat: sebagai jadwal pengingat kalibrasi alat	Ketua Tim Pengujian
6		Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan secara kimia dan	Keterlambatan pelaporan atau input data di SIPT	Mengatur jadwal pemakaian alat/instrumen, dan melakukan pemeliharaan alat rutin	Ketua Tim Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
		mikrobiologi sesuai standar			
7		Pengadaan Barang dan Jasa	Peralatan Laboratorium ber TKDN yang dibeli kualitasnya tidak sebaik peralatan laboratorium impor	Menjalin komunikasi yang baik dengan teknisi peralatan dan menyediakan anggaran perawatan alat yang memadai	Ketua Tim Pengujian
8		Sampling regionalisasi untuk UPT lain	Kerusakan sampel selama dalam perjalanan pengiriman ke laboratorium regional	SOP Pengelolaan Contoh Internal yang memuat Proses pengiriman memperhatikan jenis sediaan yang dikirim, untuk sediaan cair dengan perlakuan khusus	Tata Usaha
9		Sampling Rutin	Waktu sampling obat yang semakin lama di sarana dan ketersediaan item dan jumlah obat	1. Membuat resume risk based 2. Membuat jadwal sampling Obat pada periode yang lebih awal 3. Menugaskan lebih banyak petugas untuk sampling Obat	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Distribusi
10		Pelaporan KTD/ESO oleh sarana pelayanan kesehatan kepada BPOM	sarana pelayanan kesehatan tidak melaporkan kejadian tidak diinginkan dari penggunaan obat (MESO) kepada BPOM	optimalisasi bimtek terkait pelaporan PV	Ketua Tim Indeks Pelayanan Publik dan Pelaporan ESO
11		Kegiatan surveilan keamanan pangan Makan Bergizi Gratis	Terjadi Keracunan pada program Makan Bergizi Gratis	1. Melakukan koordinasi dengan Kepala PPG / Kepala regional / Koordinator wilayah / Kepala SPPG di DKI Jakarta secara kontinu 2. Melakukan Kitchen inspection 3. Melakukan Sampling makanan yang menyebabkan keracunan 4. Melakukan KIE Edukasi penjamah pangan	Ketua Tim Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi, Ketua Tim Pengujian, Ketua Tim Efektivitas KIE

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
12		Pengujian sampel Pihak ke-3	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapkan hasil pengujian sesuai keinginan	1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 3. Pakta Integritas 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Pengujian, Tata Usaha
13		Pengujian sampel Pihak ke-3	Adanya pemberian gratifikasi karena telah mendapatkan hasil serta layanan pengujian yang baik dan tepat waktu	1. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan Pengaduan 2. Identifikasi Benturan Kepentingan secara berkala 3. Pakta Integritas 4. Survey SIAGAKU	Ketua Tim Pengujian, Tata Usaha
14		Sampling Rutin	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapkan produk yang disampling sesuai keinginan	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas pegawai dan rekan bisnis 5. Pengadaan dilakukan melalui e procurement	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Distribusi
15		Penetapan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	Penyusunan surat tindak lanjut dan input pada sistem SIPT untuk hasil pemeriksaan sarana melebihi time line yang telah ditetapkan	Telah disusun sistem pemantauan/monitoring untuk kegiatan pemeriksaan yang dilakukan, pelaksanaan penyusunan surat tindak lanjut dan input ke dalam sistem SIPT	Ketua Tim Pengujian, Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Distribusi

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
16		01. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pada saat melakukan inspeksi ada kemungkinan pelaku usaha melakukan tindakan gratifikasi kepada petugas sehingga petugas memberikan keringanan tindak lanjut hasil pemeriksaan	1. Menyampaikan adanya larangan pemberian gratifikasi pada pelaku usaha setiap akan dimulainya inspeksi 2. Menyampaikan Survey Integritas Anti Gratifikasi Anti Korupsi	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi
17		Penerbitan Surat Rekomendasi	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapkan Penerbitan Surat Rekomendasi tanpa prosedur yang sesuai	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Pakta Integritas Pegawai 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey SIAGAKU	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi, Ketua Tim Fasilitas UMKM dan Rekomendasi Hasil Pengawasan
18		Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan	Adanya sarana produksi yang seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) melainkan harus ke sarana produksi pangan dalam negeri (MD) karena sarana sudah tidak sesuai ketentuan [produksi bukan di dapur rumah tinggal, menggunakan mesin otomatis]	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta agar pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi,

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
19		Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik	Pengajuan rekomendasi notifikasi kosmetik, sebagian masih menggunakan jasa konsultan. PJT tidak memahami alur proses karena kualifikasi pendidikannya hanya untuk memenuhi persyaratan penerbitan rekomendasi. Dokumen yang dilampirkan merupakan "template" dari konsultan dan tidak menggambarkan aktivitas aktual dari sarana distribusi	Melakukan pemeriksaan dengan lebih teliti pda dokumen dan wawancara yang lebih intensif dengan PJT	Ketua Tim Fasilitas UMKM dan Rekomendasi Hasil Pengawasan
20		Penyusunan Renlak Pengawasan Sarana Distribusi	Renlak pengawasan sarana distribusi tidak akurat	Mengajukan permohonan bank data kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan data yang lebih valid	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Distribusi
21		Pemeriksaan Sarana Rutin	1. Petugas yang memiliki hubungan afiliasi dengan sarana menghalangi inspektur yang ditugaskan mengawas 2. Adanya intervensi agar hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas pegawai dan rekan bisnis 5. Pengadaan dilakukan melalui e procurement	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi,

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
22		Pemeriksaan Sarana Rutin	Adanya pemberian gratifikasi selama proses pemeriksaan sarana	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas 5. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi,
23		Pemeriksaan Sarana Rutin	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapkan hasil pemeriksaan sesuai keinginan	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas 5. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi,
24		Pengujian Sampel Rutin	Adanya kebocoran informasi produk TMS dari penguji laboratorium kepada pelaku usaha	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Pakta Integritas Pegawai 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey SIAGAKU	Ketua Tim Pengujian
25		Pengujian Obat dan Makanan	Adanya benturan kepentingan antara personel laboratorium dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan laboratorium	1. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 2. Pakta Integritas 3. Membuat laporan benturan kepentingan melalui Sang integritas	Ketua Tim Pengujian, Tata Usaha

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
26		fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa	Persetujuan denah PBF membutuhkan beberapa kali konsultasi, konsultasi secara manual (tatap muka) dan data konsultasi belum terrekapitulasi dalam satu sistem	Membuat sistem SENAYAN (Persetujuan Denah Lay Out Bangunan)	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi
27		Pemenuhan target Standar Ruang Lingkup Obat	Pemenuhan target Standar Ruang Lingkup Obat tidak tercapai	1. Penyusunan rencana pemenuhan Standar Ruang Lingkup dilakukan per triwulan dan sejalan dengan penetapan target tahunan; 2. Monev pemenuhan Standar Ruang Lingkup dilakukan tiap triwulan; 3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan tim sampling obat agar jenis sampel yang diperlukan untuk peningkatan capaian SRL dapat tersampling	Ketua Tim Pemenuhan SKL
28		Pemenuhan target Standar Ruang Lingkup Obat	Metode analisis yang digunakan dalam pengujian sampel obat regionalisasi belum diverifikasi	1. Penyusunan rencana verifikasi metode analisis tahunan; 2. Monev pemenuhan Standar Ruang Lingkup (metode analisis terverifikasi) dilakukan tiap triwulan	Ketua Tim Pemenuhan SKL, Ketua Tim Pengujian
29		Persentase Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	1. Petugas yang memiliki hubungan afiliasi dengan pemilik produk tidak mengawasi rokok dan atau rokok elektronik sesuai standar 2. Adanya intervensi agar hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas pegawai dan rekan bisnis 5. Pengadaan dilakukan melalui e procurement	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Produksi,

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
30		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Jakarta	Jumlah sarana yang dilakukan sosialisasi pengendalian AMR dibandingkan total jumlah sarana Apotek belum optimal	Melakukan kerjasama dengan IAI dan Suku Dinas Kesehatan 6 wilayah untuk kroscek data sarana dan pelaksanaan sosialisasi	Katim Pengendalian AMR
31		Persentase Kabupaten / Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman			
32		Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			
33	02-Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Cakupan sarana produksi pangan fortifikasi	Tepung Terigu beda betas saat di sampling	Melakukan double crosscheck dengan cara melihat betas pada dus dan kemasan primer	Ketua Tim Pemeriksaan Sarana Distribusi
34	03-Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kolaborasi bersama lintas sektor terkait	Implementasi Perjanjian Kerja Sama tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada ruang lingkup	Monitoring dan Evaluasi setiap Triwulan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	Ketua Tim Efektivitas KIE

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
35		Pelaksanaan KIE kepada masyarakat	Kendala sosial budaya : Adanya norma, tradisi, atau kebiasaan tertentu di masyarakat yang bertentangan dengan prinsip keamanan obat dan makanan sehingga masyarakat agak sulit menerima informasi KIE dari petugas Infokom	Menyesuaikan materi edukasi dengan norma budaya setempat, menggunakan contoh yang relevan untuk mengubah kebiasaan	Ketua Tim Efektivitas KIE
36		Pelaksanaan KIE kepada masyarakat	Kesalahan informasi yang diberikan kepada customer baik melalui layanan whatsapp maupun layanan langsung	Diadakan pelatihan dan sharing informasi terupdate setiap bulannya	Ketua Tim Indeks Pelayanan Publik dan Pelaporan ESO
37		Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Adanya pemberian gratifikasi karena telah mendapatkan informasi serta layanan yang baik dan tepat waktu	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas 5. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Efektivitas KIE
38		Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Adanya potensi penawaran imbalan untuk menindaklanjuti pengaduan yang menguntungkan pihak tertentu	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Identifikasi Benturan kepentingan 5. Pakta Integritas 6. Survey Kepuasan Masyarakat 7. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Efektivitas KIE

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
39		Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Adanya potensi penawaran imbalan untuk memberikan informasi yang dikecualikan (data internal yang rawan disalahgunakan) agar menguntungkan pihak tertentu	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas 5. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Efektivitas KIE
40		Pelaporan Kasus Keracunan Obat dan Makanan	Kurangnya konsistensi RS dalam melaporkan kasus keracunan obat dan makanan	1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi 2. Melakukan sosialisasi/refreshment materi terhadap PIC di Rumah Sakit	Ketua Tim Indeks Pelayanan Publik dan Pelaporan ESO
41	04-Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pendampingan UMKM	Sarana produksi UMKM yang sudah diterbitkan sertifikat IPCPOB tidak melakukan renovasi	Pendampingan penerbitan IP CPPOB dan registrasi produk	Ketua Tim Fasilitas UMKM dan Rekomendasi Hasil Pengawasan
42		Pendampingan UMKM	Pelaku UMKM enggan mengurus izin edar produk karena perijinan UMKM lama, rumit dan melibatkan banyak pihak (BBPOM Jakarta, Dinas PPKUKM, Dinas PMPTSP)	Pendampingan UMKM terintegrasi melalui program bersama lintas sektor dengan inovasi UMKM Jaw@ra (Jakarta Wujudkan Obat dan Makanan Aman Bermutu Untuk Melindungi Masyarakat Jakarta)	Ketua Tim Fasilitas UMKM dan Rekomendasi Hasil Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
43	05- Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Adanya risiko praperadilan	Melakukan verifikasi berjenjang untuk memastikan berkas perkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhindar dari risiko tersebut	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM
44		Operasi Penindakan	Adanya potensi penghilangan barang bukti hasil operasi penindakan yang disimpan di gudang barang bukti dikarenakan adanya kerjasama dengan internal BBPOM di Jakarta	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas 5. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM
45			Risiko keamanan dan keselamatan petugas saat melakukan upaya paksa dalam penindakan.	Berhati-hati dalam melakukan upaya paksa saat penindakan, sebelum melaksanakan upaya paksa disampaikan kepada terlapor/terduga/pelanggar/tersangka dengan kalimat persuasif.	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM
46		Penerbitan Surat Rekomendasi	Adanya pemberian gratifikasi karena telah mendapatkan hasil Surat Rekomendasi serta layanan yang baik dan tepat waktu	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Pakta Integritas Pegawai 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey SIAGAKU	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
47		Penerbitan Surat Rekomendasi	Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dalam proses penerbitan Surat Rekomendasi	1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 3. Pakta Integritas 4. Larangan Praktek KKN di Surat Tugas	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM
48		Operasi Penindakan	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 mengharapkan penghentian proses penindakan dan penyidikan	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas pegawai dan rekan bisnis 5. Pengadaan dilakukan melalui e procurement	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM
49		PenindakanKejahatan Obat dan Makanan	Penyidik PNS menerima gratifikasi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak kejahatan obat dan makanan	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Pakta Integritas Pegawai dan Pelaku Usaha 4. Survey Kepuasan Masyarakat 5. Survey SIAGAKU	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM
50	06- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	Petugas dicurigai sebagai penjahat "maling dsb" saat melakukan Pulbaket (Pengumpulan Bahan dan Keterangan) oleh masyarakat sekitar.	Pelatihan Dasar Intelijen petugas di Lemdiklat Intelkam Polri	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
51	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pengumpulan Bahan Keterangan	Terungkapnya identitas petugas saat melaksanakan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket / intel) dugaan adanya tindak pidana	Penugasan investigasi dilaksanakan setiap minggu	Ketua Tim Penyidikan, Ketua Tim Pelaporan Analisis Kejahatan OM
52	07-Layanan Publik UPT yang prima	Pembangunan sarana prasarana kelompok rentan	Tidak terpenuhinya sarana prasarana layanan kelompok rentan sesuai standar	Penggunaan ruang multifungsi agar dapat memenuhi standar	Tata Usaha
53	08 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pengembangan kompetensi pegawai	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai tidak terlaksana sesuai perencanaan	- Data spreadsheet monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai - SK tim RB pokja Manajemen SDM sebagai penunjukan PIC pada setiap kelompok fungsi untuk mengupdate data pengembangan kompetensi	Tata Usaha
54		Nilai AKIP UPT BPOM	Jika terdapat perbedaan data berupa target atau realisasi capaian kinerja akan berdampak pada nilai AKIP	Pemutakhiran SOP pengelolaan data kinerja	Ketua Tim Pengelolaan SDM dan Kearsipan
55		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Revisi DIPA di Kualitas Perencanaan Anggaran pada Indikator Pelaksanaan Anggaran < 100	1. Membuat memo dinas jadwal revisi anggaran 2. Menyiapkan link pengumpulan usulan revisi	Ketua Tim Pengelolaan SDM dan Kearsipan
56		Penyusunan dokumen manajemen risiko	Terdapat risiko terkait pelaksanaan tugas fungsi yang belum diidentifikasi	Mengumpulkan identifikasi risiko dari seluruh pegawai setiap tahunnya	Ketua Tim Pengelolaan Nilai Kinerja Anggaran

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
57		Pengelolaan Barang dan Jasa	Penyusunan kepada petugas keuangan/pengadaan barang dan jasa	1. Pemberian penyuluhan integritas secara berkala 2. Petugas menandatangani surat pakta integritas setiap tahun 3. Menyusun Instruksi Kerja petugas pengujian tidak berhubungan langsung dengan pelanggan dan sampel diterima terlebih dahulu di Tempat Penerima Sampel (tata usaha) ;	Ketua Tim Pengelolaan Manajemen Risiko
58		Pengelolaan barang persediaan	Barang persediaan ATK dan ART yang hilang	1. PPNS menandatangani pakta integritas setiap tahun 2. Pengawasan melekat dari Pimpinan kepada PPNS terkait penanganan suatu perkara 3. Awareness SMAP ISO 37001 secara berkala	Tata Usaha
59		Pengelolaan Sistem Aplikasi Internal maupun pelayanan publik di BBPOM Jakarta	Seluruh aplikasi yang terdapat pada Pusat Data Nasional mengalami down dan tidak dapat diakses (SIASN, SIPT, email corporate, epresensi, Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) SRIKANDI, dll)	1. Membuat strategi digitalisasi KIE 2. Mensosialisasikan secara berkala di semua media digital terkait informasi keamanan obat dan makanan	Tata Usaha
60		Pengelolaan jaringan di kantor BBPOM Jakarta	Jaringan Internet lambat untuk diakses seluruh pegawai	1. Penilaian Kode Etik Pegawai 2. Pakta Integritas 3. Survey Kepuasan Masyarakat 4. Survey SIAGAKU	seluruh fungsi

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
61		Pengelolaan Sistem Aplikasi Internal maupun pelayanan publik di BBPOM Jakarta	Seluruh aplikasi yang terdapat pada Pusat Data Nasional mengalami down dan tidak dapat diakses (SIASN, SIPT, email corporate, epresensi, Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP) SRIKANDI, dll)	1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan Pengaduan 3. Pakta Integritas 4. Survey Kepuasan Masyarakat	Tata Usaha
62		Pengujian Obat dan Makanan	Petugas menerima gratifikasi terkait tugas pengujian produk	1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 2. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan Pengaduan 3. Pakta Integritas 4. Survey Kepuasan Masyarakat	seluruh fungsi
63		Pengadaan Barang dan Jasa	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 sebagai vendor untuk Pengadaan Langsung	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas pegawai dan rekan bisnis 5. Pengadaan dilakukan melalui e procurement	Ketua Tim Pengujian

No.	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan
64		Pengadaan Barang dan Jasa	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 agar ditunjuk sebagai Pemenang Lelang	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas pegawai dan rekan bisnis 5. Pengadaan dilakukan melalui e procurement	Pejabat pengadaan, PPK, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan
65		Pengadaan Barang dan Jasa	Adanya pemberian gratifikasi oleh pihak ke-3 karena telah ditunjuk sebagai Penyedia	1. Kode Etik Pegawai 2. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 3. Menyediakan berbagai Saluran Whistle blowing system dan pengaduan 4. Pakta Integritas pegawai dan rekan bisnis 5. Pengadaan dilakukan melalui e procurement	Pejabat pengadaan, PPK, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan
66		Pengelolaan Keuangan	Pemblokiran Mandiri dalam rangka efisiensi anggaran APBN	1. Melakukan efisiensi Sumber Daya untuk menghemat biaya operasional seperti Listrik dan telepon serta kebutuhan tersier lain 2. Memberlakukan penyesuaian sistem kerja WFH - WFO	Pejabat pengadaan, PPK, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

- 1. Penguatan Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak

sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.** Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:** BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan

produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.

6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat dan makanan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk

peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan /deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Jakarta

Balai Besar POM di Jakarta mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan /deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Balai Besar POM di Jakarta dalam menyusun strategi pelaksanaan arah kebijakan tersebut melalui analisis SWOT untuk memastikan keselarasan antara potensi internal dan tantangan eksternal. Dalam menavigasi landscape yang terus berubah, Balai Besar POM di Jakarta mengakui pentingnya membangun fondasi yang kuat berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kapasitas

internalnya. Analisis SWOT yang telah dilakukan memberikan pemahaman mengenai kekuatan Balai Besar POM di Jakarta, seperti SDM yang berdedikasi dan kompeten, kepemimpinan yang visioner, kualitas pelayanan publik yang prima serta infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, dengan mengidentifikasi kelemahan seperti keterbatasan dalam meningkatkan sistem TI, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan langkah-langkah konkret untuk perbaikan internal. Melalui evaluasi ini, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk mengatasi hambatan internal sambil mempertahankan dan meningkatkan aspek yang telah menjadi kekuatan utamanya.

Lebih lanjut, analisis terhadap peluang dan ancaman eksternal memberi Balai Besar POM di Jakarta perspektif yang diperlukan untuk memperkuat strategi adaptasi dan inovasinya. Di era digital saat ini, kesempatan untuk mengintegrasikan teknologi canggih dalam operasional menjadi titik fokus, memberikan peluang Balai Besar POM di Jakarta untuk mempercepat proses pengawasan dan peningkatan layanan. Sementara itu, ancaman seperti masih banyaknya pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan, serta situasi atau kondisi lingkungan strategis yang mengalami gejala atau volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, serta ambiguitas yang membutuhkan pengawasan dan respon yang lebih dinamis. Dengan mengadopsi strategi yang proaktif dan berbasis data, Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan global tetapi juga menjadi pemimpin dalam inovasi dan keamanan produk kesehatan.

Ringkasan yang ditampilkan pada matriks SWOT berikut ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Jakarta, serta strategi yang ditujukan untuk memperkuat posisi organisasi dalam jangka panjang. Setiap aspek dari analisis SWOT telah diintegrasikan ke dalam rencana strategis untuk mengoptimalkan sumber daya internal, meningkatkan respon terhadap perubahan eksternal, dan menjamin bahwa Balai Besar POM di Jakarta dapat terus menjalankan perannya secara efektif dalam memastikan keamanan Obat dan Makanan di Indonesia

3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Jakarta

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI BALAI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan yang komprehensif (full spectrum) mencakup pre-market dan post market yang berbasis risiko termasuk Program Makan Bergizi Gratis
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Optimalisasi informasi dan edukasi masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kolaborasi dengan Lintas Sektor dalam Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Optimalisasi pengelolaan SDM sumber daya manusia kompeten, 122rofessional, gesit dan adaptatif yang akan berkontribusi pada pengembangan birokrasi yang <i>terpadu</i>
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta termasuk peningkatan pelayanan publik 2. Pengelolaan sarana prasana /infrastruktur, laboratorium, serta

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implemetasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Jakarta juga dilaksanakan secara responsive gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan Kegiatan . Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Sarana Prasarana BPOM.

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta mencakup pengawasan *pre* dan *post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM."

a. Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

1. Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan Penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan adalah tugas yang penting dalam menjaga keamanan dan kualitas obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Perencanaan dan pengumpulan bahan keterangan dalam rangka penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilakukan melalui (1) Penentuan tujuan dan lingkup utama analisis; (2) Pembentukan tim yang terdiri dari ahli di bidang Obat dan Makanan, ahli hukum, serta personel penegak hukum; (3) Memastikan sumber daya yang diperlukan; (4) Membuat rencana operasional; (5) Pengumpulan Sumber Data; (6) Pemantauan secara berkala untuk mendeteksi tren dan pola yang mencurigakan, seperti peningkatan penjualan produk tertentu yang dicurigai berbahaya; (7) Penyelidikan lapangan untuk mengumpulkan bukti fisik atau sampel produk yang mencurigakan. Analisis kejahatan Obat dan Makanan merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini memerlukan kerja sama antara BPOM, penegak hukum, dan berbagai pihak terkait untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak kejahatan yang terkait dengan produk tersebut.

2. **Penjejak Digital Kejahatan Obat dan Makanan**
Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan adalah dua komponen yang penting dalam upaya untuk mengidentifikasi dan melawan kejahatan terkait Obat dan Makanan di dunia maya atau dalam jaringan. Patroli Siber adalah kegiatan pemantauan, analisis, dan intervensi terhadap kegiatan yang terkait dengan dunia maya dan internet yang berkaitan dengan produk Obat dan Makanan. Profiling kejahatan obat dan makanan adalah proses menganalisis data dan informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi pola atau karakteristik pelaku kejahatan dalam industri Obat dan Makanan, Langkah selanjutnya adalah verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan adalah tahap penting dalam menjaga integritas dan akurasi informasi yang digunakan dalam penindakan dan pencegahan kejahatan terkait Obat dan Makanan serta Evaluasi kegiatan patroli siber dan profiling kejahatan Obat dan Makanan
3. **Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan**
Upaya peningkatan komunikasi dan persamaan persepsi antara PPNS dan Petugas BBPOM di Jakarta dengan Criminal Justice System dan stakeholder yang berada di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Dengan dilaksanakannya koordinasi secara konsisten, diharapkan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara optimal. Keberhasilan penyelesaian kasus di bidang obat dan makanan sangat tergantung aturan dan kebijakan institusi. Agar ada kesamaan dalam penerapan aturan perlu adanya kesamaan pemahaman terhadap aturan atau kebijakan yang ada. Penyamaan persepsi ini tidak hanya di tingkat manajemen tetapi juga sampai ke level individu yang langsung menangani sehingga diperlukan juga peningkatan kompetensi petugas.

b. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan

1. Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi Kegiatan strategis pemeriksaan dalam rangka sertifikasi yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta diantaranya melalui kegiatan (1) **Pelayanan prima, bimtek e gistrasi dan pendaftaran Obat dan Makanan** yang berkolaborasi Direktorat Pangan Olahan. Registrasi pangan olahan merupakan awal dari kegiatan pengawasan keamanan pangan sebelum pangan olahan

tersebut diedarkan di wilayah Indonesia sehingga diperlukan sosialisasi dan bimbingan berkelanjutan bagi pelaku usaha agar selalu terupdate dengan perkembangan terbaru. Selain sosialisasi juga dilakukan desk konsultasi bagi pelaku usaha yang sedang dalam proses registrasi; (2) **Pendampingan Inovasi UMKM Lokal Spesifik Unggulan Daerah.** Usaha Mikro, Menengah dan Kecil merupakan pondasi yang mendukung ekonomi makro masyarakat yang saat ini menjadi salah satu fokus Program Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan. Untuk mendukung program tersebut, Balai Besar POM di Jakarta membuat program untuk membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan standar produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Menengah dan Kecil di wilayah Jakarta sehingga makin tumbuh dan berkembang serta memiliki daya saing baik di pasar nasional maupun global; (3) **Peningkatan kompetensi petugas. Seiring dengan peningkatan daya saing UMKM,** diperlukan peran fasilitator dalam hal ini petugas pelayanan publik sertifikasi yang akan mendampingi UMKM dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan Obat dan Makanan. Untuk itu diperlukan tenaga yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM tersebut sehingga pelayanan publik semakin meningkat dan senantiasa memberikan pelayanan publik prima yang menerapkan prinsip efektif, efisien, inovatif dan komitmen mutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2. Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik
Kegiatan strategis yang dilakukan adalah (1) **Audit Pre-sertifikasi dalam rangka penerbitan izin penerapan CPPOB/CPOTB/CDOB/CPKB sertifikasi;** Kegiatan ini dilakukan untuk mendampingi pelaku usaha dalam melakukan proses sertifikasi, selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sebelum beredar produk yang akan didaftarkan sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan; (2) **Pendampingan dalam rangka monitoring sertifikasi sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan,** kegiatan bertujuan untuk memastikan bahwa sebelum beredar produk yang akan didaftarkan sudah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu untuk mempermudah pemahaman masyarakat terkait tata

cara sertifikasi dan registrasi CPPOB/CPOTB/CPKB/CDOB, pendampingan juga dilakukan dengan memberikan informasi yang menggunakan brosur, leaflet serta banner yang dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha; **(3) Pelatihan Fasilitator Penyuluh Keamanan Pangan Dalam Rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM**, diperlukan peran fasilitator dalam hal ini petugas pelayanan publik sertifikasi yang akan mendampingi UMKM dalam pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan Obat dan Makanan. Untuk itu diperlukan tenaga yang kompeten dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM tersebut sehingga pelayanan publik semakin meningkat dan senantiasa memberikan pelayanan publik prima yang menerapkan prinsip efektif, efisien, inovatif dan komitmen mutu yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

c. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Program KIE Badan POM bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat agar dapat melindungi dirinya dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan dengan mendorong peningkatan upaya promotive dan preventif, dengan mengedukasi Masyarakat umum dan pembentukan kader atau duta pengawasan Obat dan Makanan, serta memberdayakan Masyarakat dengan peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi terdiri dari **(1) KIE bersama Tokoh Masyarakat; (2) Penyebaran Informasi Obat dan Makanan Umum**. Penerima manfaat Sosialisasi/Penyebaran Informasi Produk Obat dan Makanan Responsif Gender yaitu semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan.
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah **(1) Koordinasi Kegiatan Infokom dengan Lintas Sektor /Pemantauan Toksikovigilance**, Kegiatan koordinasi kegiatan infokom dengan lintas sektor dalam hal ini termasuk didalamnya adalah koordinasi dengan pemerintah daerah terkait Surat Edaran Kemendagri Nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu koordinasi juga bisa dilaksanakan dalam hal pemantauan/monitoring toksikovigilance di wilayah Provinsi Jakarta **(2) Peningkatan**

Kompetensi SDM, Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan mendukung pengembangan karier PNS dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan telah diperolehnya predikat pelayanan prima, dan perkembangan teknologi, tantangan internal maupun eksternal dan semakin tingginya harapan masyarakat pengguna layanan menyebabkan pelatihan bagi petugas layanan publik menjadi sangat penting; (3) **Pemantauan Obat dan Makanan dengan Operasional Mobil Laboratorium Keliling**, sebagai salah satu bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dengan melakukan pengawasan/pengujian *on the spot* di kab/kota catchment area Balai Besar POM Jakarta menggunakan rapid test kit.

d. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar/Balai POM sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien maka obat dan makanan yang beredar di masyarakat dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutunya. Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Pusat dan BB/Balai POM dilakukan pertemuan dengan pimpinan, kegiatan workshop, seminar atau kegiatan lainnya berupa advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor baik yang telah direncanakan ataupun kegiatan yang bersifat mendesak, sehingga perlu dilakukan penganggaran untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut. Secara internal petugas/pegawai Balai Besar POM di Jakarta di dominasi oleh Perempuan, sehingga kemungkinan terjadi kesenjangan pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tupoksi sehingga diperlukan proporsi yang seimbang dalam kepersertaan kegiatan, kegiatan-kegiatan ini juga merupakan kegiatan penunjang bidang lain terkait dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk Obat dan Makanan.

1. Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan strategis yang dilaksanakan adalah (1) meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan, pusat dalam hal ini unit kerja terkait di pusat perlu menyamakan persepsi dengan balai, membimbing dan mengawal balai di daerah dalam

melaksanakan suatu kegiatan sehingga kinerja balai meningkat; (2) kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dalam bentuk kegiatan sosialisasi maupun publikasi secara internal maupun eksternal sebagai stimulant kegiatan dalam rangka meningkatkan indeks RB Tahun 2025 menuju WBK/WBBM; (3) Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (4) Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta yang terintegrasi dengan SPIP – Manajemen Risiko dan pengawalan implementasi RB untuk meningkatkan kualitas aparatur yang berintegritas dan berkinerja; (5) Kegiatan-kegiatan terpadu yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian aparatur penyelenggara negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi dan akuntabilitas, demi terciptanya *good governance* dan *clean government*; (6) Kegiatan pemutakhiran data BMN untuk menyamakan data antara satker dengan data pusat serta data yang tercatat pada aplikasi Kementerian Keuangan.

2. Pelaksanaan Koordinasi

Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah (1) meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai Balai Besar POM di Jakarta di catchment area Balai Besar POM di Jakarta melalui kunjungan kerja, advokasi maupun koordinasi dengan lintas sektor/ pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) kegiatan yang mengikutsertakan seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan-peraturan terbaru terkait kepegawaian yang berlaku di lingkungan Badan POM ataupun dengan adanya perkembangan teknologi informasi seperti Pelatihan Ahli K3 Umum, Bimtek Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K); Bimtek dan Diklat Perpajakan; Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pelatihan IT pendukung pengembangan aplikasi dan website; (3) Kegiatan-kegiatan terpadu yang diharapkan dapat meningkatkan kepedulian aparatur penyelenggara negara untuk melaksanakan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi dan akuntabilitas, demi

terciptanya *good governance* dan *clean government* (4) Kegiatan Rakernas, sebagai forum perencanaan BPOM tahun n+1 bersama seluruh Unit Kerja BPOM serta melibatkan stakeholder BPOM; (5) Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan POM terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta UMK; (6) menyeragamkan pelaksanaan audit internal sistem manajemen mutu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan sertifikasi kepada para auditor khususnya lead Auditor untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan calon lead auditor dalam merencanakan dan melaksanakan audit Sistem Manajemen Mutu baik internal maupun eksternal sesuai ISO 9001:2015; (7) Program anti korupsi Badan POM merupakan salah satu tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sehingga perlu penguatan anti korupsi diadakan untuk meningkatkan pemahaman terkait upaya dalam penguatan anti korupsi dan mengembangkan budaya organisasi anti korupsi.

e. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

Dengan semakin berkembangnya komunitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat, harus diimbangi pula dengan informasi tentang keamanan obat dan makanan yang beredar. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Instansi pelaksana teknis penanggung jawab terhadap keamanan obat dan makanan khususnya di wilayah Jakarta dipandang perlu untuk sering dilakukan dialog interactive dan penyampaian informasi kepada media massa atas perkembangan pengawasan Obat dan Makanan dan diharapkan komunikasi tersebut menyentuh kepada masyarakat melalui sarana media cetak maupun elektronik.

1. Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat
Kegiatan strategis yang dilakukan adalah melaksanakan publikasi Obat dan Makanan dengan penerima manfaat layanan publikasi obat dan makanan yaitu semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dengan adanya keseimbangan antara laki-laki dan Perempuan.

f. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Kegiatan strategis yang dilakukan untuk menunjang program Badan POM dalam fungsi pengawasannya, Balai Besar POM di Jakarta berusaha melakukan upaya terus-menerus melalui perencanaan yang lebih baik untuk melengkapi sarana dan prasarana di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta. Pada Tahun 2025 Balai Besar POM di Jakarta akan mengadakan AC, meja kerja dan set sofa. Peralatan - peralatan tersebut diperlukan untuk mengganti peralatan yang sudah lama dan sudah rusak.

g. Perangkat pengolah data dan komunikasi

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Salah satu upaya untuk mencapai good government adalah akuntabilitas kinerja suatu institusi, yang diantaranya dapat dicapai dengan melakukan tertib administrasi. Penyediaan alat pengolah data menjadi hal yang penting sebagai salah satu prasarana yang dibutuhkan untuk maksud tersebut. Suatu kegiatan akan dikatakan telah selesai dilaksanakan dan mempunyai makna apabila telah dilakukan pelaporan yang benar dan tepat waktu, sehingga hasil kegiatan tersebut dapat dievaluasi ataupun dilakukan tindak lanjut. Untuk pemenuhan standar sarana dan prasarana serta mengganti peralatan yang telah rusak, maka akan diadakan laptop, PC, scanner, proyektor, acces point, dan printer.

h. Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan

1. Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang beredar di Jakarta. Balai Besar POM di Jakarta menggunakan reagen kimia dan media mikrobiologi untuk melakukan pengujian. Penggunaan reagen kimia dan media mikrobiologi tersebut menghasilkan limbah yang sebagian kecil terbuang pada saat pencucian alat-alat laboratorium. Limbah yang terbuang tersebut, tidak bisa dibuang langsung ke lingkungan. Netralisasi limbah sangat diperlukan dalam rangka menjaga masyarakat dan lingkungan sekitar Balai Besar POM di Jakarta dari limbah yang dihasilkan. Oleh sebab itu, dirasa perlu untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang

kompatibel dengan sisa limbah buangan Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta. Dua komponen utama yang diperlukan adalah mesin IPAL dan konstruksi IPAL yang keduanya saling terkait. Diharapkan bahwa IPAL yang dibangun tidak hanya memiliki fungsi pengelolaan limbah, namun juga fungsi estetika.

i. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

1. Peningkatan ruang lingkup pengujian

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP). Kegiatan strategis dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian. Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta juga mengacu pada system Regionalisasi Laboratorium sebagai Region yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih unggul sebagai Laboratorium Regional yang melakukan pengujian spesifik.

2. Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu (1) **Evaluasi Teknis Pengujian Melalui Uji Profisiensi/Uji Banding/Uji Kolaborasi/Kolaborasi Metode Analisis, Uji Profisiensi/Uji Banding/Uji Kolaborasi dilakukan untuk memantau kompetensi atau mutu tenaga penguji dan laboratorium penguji serta mengembangkan teknis pengujian**

dalam menerapkan sistem mutu sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017 dengan melihat unjuk kerja pengujian laboratorium di Balai Besar POM di Jakarta. Hasil yang diharapkan dari uji profisiensi adalah peningkatan kinerja laboratorium dan citra pengujian laboratorium Balai Besar BPOM di Jakarta

j. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Di BBPOM di Jakarta

Salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta yaitu Operasi Penindakan terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan peredaran produk obat dan makanan sehingga masyarakat tidak terpapar/mengonsumsi obat dan makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan.

1. Operasi Intelijen kegiatan Intelijen yang menggunakan sumber daya Intelijen, yang disusun dan diorganisir secara khusus terkait dugaan tindak pidana yang lebih kompleks dan telah memiliki informasi awal yang cukup guna dihadapkan pada penanganan target operasi dalam waktu/daerah tertentu.

2. Gelar Kasus dan Pelaporan

Kegiatan gelar kasus merupakan kegiatan membedah kasus dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan mengundang pejabat/pakar/ahli yang berkompeten di bidangnya untuk memberikan masukan/saran terhadap tindak lanjut dugaan kasus tindak pidana sedangkan pelaporan dilakukan setelah operasi intelijen dilakukan. Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP Merupakan kegiatan untuk mempersiapkan operasi penindakan yang meliputi persiapan teknis penindakan, sarana, dan prasarana penindakan serta koordinasi dengan ICJS terkait seperti Korwas PPNS Polri,dll.

3. Operasi Penindakan

Merupakan serangkaian kegiatan untuk memeriksa, menggeledah, melakukan olah TKP, meminta keterangan, mengamankan, dan menyita barang yang digunakan dalam tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dengan target yang telah ditentukan dan menggunakan sumber daya yang telah ditetapkan.

4. Pemberkasan

Pemberkasan merupakan tahapan setelah hasil operasi penindakan ditindaklanjuti dengan pro Justitia yang terdiri atas tahapan sebagai berikut: (1) Penyelesaian Berkas Perkara; (2) Gelar Perkara; (3) Penyerahan Tahap I s.d perkara sampai pada Tahap II.

5. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)

urgensi kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan adalah untuk menindaklanjuti laporan adanya dugaan tindak pidana obat dan makanan yang harus ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Jakarta.

k. Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman

Kegiatan intervensi keamanan PJAS, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Salah satu keterlibatan Badan POM dalam gerakan nasional ini adalah melalui proyek prioritas nasional Konsumsi Pangan Sehat, dengan kegiatan Intervensi Keamanan PJAS.

1. Koordinasi lintas sektor

Pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi PJAS, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

2. Intervensi keamanan PJAS

Kegiatan Strategis yang dilakukan **(1) Sosialisasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah**. Salah satu elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, orangtua siswa, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan

program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah; **(2) Bimtek Keamanan Pangan Sekolah**; **(3) Pengadaan Dan Pemberian Paket Edukasi Keamanan PJAS**, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian materi cetak maupun digital berupa permainan/games edukasi keamanan pangan, materi Keamanan Pangan dalam bentuk audio visual dan media cetak keamanan pangan; **(4) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah**, kegiatan ini untuk memantau kiprah Kader Keamanan Pangan Sekolah; **(5) Sertifikasi Sekolah Dengan PJAS Aman**, Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah untuk mendorong pihak sekolah memenuhi persyaratan keamanan pangan sebelum dilanjutkan kepada tahap berikutnya (Level 2), serta melakukan evaluasi mandiri (self assessment) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman; **(6) KIE Program PJAS Melalui Media Cetak/Elektronik**, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman bagi kader, komunitas sekolah dan masyarakat luas juga dilakukan melalui KIE media cetak/eletronik dan seperti pembuatan baliho keamanan pangan dan SMS blasting terkait keamanan pangan; **(7) Saka POM**, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) sebagai wadah bagi anggota gerakan Pramuka yang memiliki kepedulian terhadap pengawasan Obat dan Makanan.

1. Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting.

1. Perkuatan kapasitas desa

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah (1) Koordinasi dan Advokasi Terpadu Program Nasional Kelembagaan Desa, PJAS, dan Pasar Aman, Pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi PJAS, menggali

ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

2. Pemberdayaan komunitas desa

Kegiatan Strategis yang dilakukan **(1) Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa**, Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan; **(2) Gap Asesment/Pengambilan Data/Survey Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman**, kegiatan survei pre intervensi dilakukan terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku kader dan komunitas desa mengenai keamanan pangan, Hasil survei ini dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, survei post intervensi dilaksanakan setelah berakhirnya intervensi keamanan pangan bagi kader dan komunitas desa; **(3) Bimtek Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa (Komunitas PKK, PKL, Sekolah, Dan Pelaku Usaha PIRT dan Ritel**, pemberdayaan komunitas desa diharapkan masyarakat yaitu ibu rumah tangga dapat menyiapkan dan mengolah pangan sesuai dengan prinsip keamanan pangan, anak-anak mampu memilih dan membeli pangan jajanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyedia pangan (ritel, PKL, IRTTP dll) dapat menyediakan pangan yang aman untuk dikonsumsi; **(4) Fasilitasi Keamanan Pangan bagi Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa**, kegiatan fasilitasi keamanan pangan perlu dilakukan bagi komunitas desa dan usaha pangan agar desa menjadi mandiri dan mampu mencegah serta menangani permasalahan keamanan pangan yang ada di lingkungannya; **(5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa Dengan Operasional Mobkel**, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keberhasilan program dan kondisi penerapan keamanan pangan di desa.

3. Pengawasan keamanan pangan desa

Kegiatan strategis yang dilakukan adalah Pengawasan

GKPD/Kelurahan yang Sudah Diintervensi dan Lomba Desa Pangan Aman, untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa PAMAN.

4. Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya Kegiatan Strategis yang dilakukan adalah kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Gkpd, PJAS, dan Pasar Aman untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program.

m. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kegiatan intervensi keamanan PJAS, Desa Pangan Aman Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat.

1. Perkuatan lintas sektor

Kegiatan strategis yang dilakukan Forum Advokasi Pemerintah daerah dan Lintas Sektor, pertemuan dilakukan untuk mensosialisasikan tahapan program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, menggali ketersediaan program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan, menggalang komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan keamanan pangan secara berkesinambungan, merancang kegiatan yang dapat disinergikan, serta menyusun rekomendasi untuk keberlangsungan program intervensi keamanan pangan.

2. Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya

Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu **(1) survey dalam rangka intervensi pasar pangan aman dari bahan berbahaya**, kegiatan ini bertujuan untuk Identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya; **(2) Bimtek kepada petugas pengelola pasar**, kegiatan ini dilakukan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap

bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya; **(3) Penyuluhan kepada komunitas pasar**, penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.; **(4) Kampanye pasar aman dari bahan berbahaya**, kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya.

3. Pemantauan dan evaluasi
kegiatan monitoring dan evaluasi adalah pengambilan contoh dan pengujian bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya **n. Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans**
4. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans Kegiatan strategis yang dilakukan adalah pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi Farmakovigilans kepada petugas di sarana Kesehatan

n. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar

Kegiatan Fasilitasi dan Penampungan UMKM ditujukan untuk meningkatkan standar produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Menengah dan Kecil di wilayah Jakarta. Program ini dibuat untuk mendukung upaya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan ekonomi menengah di Masyarakat Indonesia.

1. Advokasi dan Pendampingan UMKM
Usaha Mikro, Menengah dan Kecil merupakan pondasi yang mendukung ekonomi makro masyarakat yang saat ini menjadi salah satu fokus Program Pembangunan Ekonomi Kemasyarakatan. Dalam menghadapi era persaingan global dan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional menjadi semakin krusial. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi kendala dalam memenuhi standar keamanan dan mutu produk, serta dalam memperluas akses pasar. Fenomena ini terlihat dari rendahnya jumlah UMKM yang berhasil

meningkatkan status sertifikasi dari PIRT ke MD BPOM. Menjawab tantangan tersebut, Balai Besar POM di Jakarta menginisiasi proyek perubahan "PINTU MAPALUS KAWANUA, UMKM NAIK KELAS, dengan mengusung filosofi spesifik lokal gotong royong khas Minahasa yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Melalui inovasi platform digital terintegrasi dan pendekatan literasi komprehensif, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk memberdayakan UMKM agar mampu menghasilkan produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi serta dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah Khusus Jakarta.

o. Sampel Makanan yang Diperiksa

1. Pengujian laboratorium sampel makanan

Pengujian laboratorium merupakan salah satu jaminan bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman untuk dikonsumsi. Pengujian sampel merupakan tahapan lebih lanjut dari proses sampling produk beredar di masyarakat dalam rangka melaksanakan pengawasan post-market, dalam hal ini pada produk makanan. Dalam rangka mendukung proses pengujian sampel produk makanan tahapan awal yang dilakukan adalah melakukan kajian dan perencanaan sampling bersama dengan fungsi Pemeriksaan.

2. Pengadaan sampel makanan

Pelaksanaan pengadaan sampel dilakukan sesuai rencana pelaksanaan sampel, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progress capaiannya. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan prioritas sampel yang telah ditetapkan dan mewakili tiap daerah yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

p. Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar

1. Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan Pelaksanaan pengadaan sampel dilakukan sesuai rencana pelaksanaan sampel, dan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau progress capaiannya. Pengambilan

sampel dilakukan sesuai dengan prioritas sampel yang telah ditetapkan dan mewakili tiap daerah yang menjadi wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

2. Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan Pelaksanaan sampling mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Badan POM yang dirancang dan dievaluasi setiap tahunnya. Pelaksanaan sampling produk obat, Obat Bahan Alam dan suplemen Kesehatan dilakukan dengan pembelian sampel di tingkat retail maupun tingkat rantai distribusi yang paling dekat dengan konsumen.

q. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa

1. Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya. Cara Produksi yang Baik merupakan salah satu jaminan bahwa produk yang beredar di masyarakat terjamin keamanannya, oleh karena itu diperlukan audit post market ke sarana produksi untuk melihat konsistensi produsen dalam melakukan melaksanakan kegiatan produksi. Balai Besar POM di Jakarta dalam melaksanakan pemeriksaan sarana produksi mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Badan POM dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk masing – masing komoditi. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dilakukan terhadap seluruh produsen MD dan produsen obat tradisional yang terdaftar di BPOM serta industry rumah tangga lainnya.

r. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa

1. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung RPJMN terkait dengan upaya penurunan angka stunting di Indonesia. Bentuk kegiatan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi di wilayah kerja BBPOM di Jakarta yang merupakan produk makanan yang wajib difortifikasi vitamin, serta sampling produk pangan fortifikasi. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan dengan melihat kepatuhan sarana terkait dengan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta ketentuan terkait dengan penambahan vitamin/fortifikasi. Selanjutnya produk yang diproduksi dilakukan sampling dan

dilakukan pengujian di laboratorium untuk melihat kadar fortifikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan CPPOB dan ketentuan terkait fortifikasi diharapkan dapat mendukung program pemerintah terkait penurunan angka stunting di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan perencanaan berdasarkan analisa risiko, atau sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan POM Pusat pada tahun 2025.

s. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa

Masih ditemukannya Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat beredar dipasaran, disamping itu dampak dari globalisasi perdagangan bebas dan kemajuan teknologi, penjualan lewat online semakin marak mengakibatkan produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat banyak beredar dimasyarakat dan mudah untuk mendapatkannya. Di pihak lain, kesadaran pelaku usaha masih kurang memahami dan kurang mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga dikhawatirkan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat belum dapat dijamin keamanan mutu dan khasiatnya.

1. Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya
Kegiatan strategis yang dilakukan adalah **(1) Pemeriksaan sarana distribusi produk Obat dan Makanan**, Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi produk omka bertujuan untuk memonitor kesesuaian sarana dalam mengelola sediaan farmasi dan makanan, serta memastikan pengelola sediaan farmasi dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Pengelolaan sediaan farmasi dan makanan sesuai ketentuan oleh sarana distribusi memberikan jaminan produk yang didistribusikan memenuhi syarat dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat; **(2) Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian**, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian berdasarkan analisis resiko tiap daerah. Pemeriksaan mencakup aspek yang termasuk dalam cara distribusi obat yang baik. Hasil pemeriksaan sarana ditetapkan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut berupa: peringatan, peringatan keras, rekomendasi penutupan; **(3) Pengawasan Periklanan**, Pengawasan ini dilakukan dengan melakukan

penilaian terhadap iklan di media cetak dan media elektronik. Pengawasan periklanan dilakukan sepanjang tahun. Pihak yang terlibat dalam pengawasan iklan adalah media cetak dan elektronik. Pelaksananya dilakukan di Daerah Khusus Jakarta; **(4) Aksi Penertiban Kosmetik Ilegal dan TMS, Kegiatan Aksi.**

Penertiban Kosmetik legal dan Tidak Memenuhi Syarat merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun secara serentak di seluruh Indonesia. melakukan inspeksi ke sarana pasar tradisional, pasar modern dan sarana distribusi kosmetik lainnya sesuai analisis risiko untuk menertibkan peredaran kosmetika khususnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, kedaluwarsa maupun yang ilegal. Produk kosmetik yang ditemukan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta terhadap pelaku usaha diberikan sanksi administratif hingga pelimpahan kasus kepada fungsi penindakan; **(5) Tindak Lanjut Pengawasan, Recall, Pengaduan dan Pemusnahan Produk Obat dan Makanan TMS,** Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan, Recall, Pengaduan, dan Pemusnahan Produk Obat dan Makanan TMS merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap sarana yang didasari adanya rekomendasi dari Badan POM pusat untuk melakukan pembersihan pasar dari produk tertentu karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil uji laboratorium, dinyatakan TMS oleh Negara Lain/*Post Market Alert System* (PMAS), pengaduan masyarakat, produk ditarik dari peredaran (*recall*) termasuk pembatalan nomor izin edar sehingga produk dilarang untuk diedarkan; **(6) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan,** kegiatan ini Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya besar keagamaan, Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan untuk memastikan produk pangan aman dan bermutu di peredaran. Kegiatan ini melibatkan juga lintas sektor terkait di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta. Kegiatan pengawasan ini berfokus pada produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), yaitu tanpa izin edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa dan rusak. BBPOM Jakarta menargetkan pengawasan pada sarana peredaran yang memiliki rekam jejak kurang baik, distributor, ritel modern dan tradisional; **(7) Monitoring Pengawasan Obat dan Makanan,** kegiatan yang dilakukan berupa Monitoring pengawasan obat dan makanan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke lintas sektor

untuk monitoring pelaksanaan rekomendasi atas pengawasan obat dan makanan yang telah diberikan sebelumnya. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana Kegiatan strategis yang dilakukan yaitu (1) Koordinasi , Advokasi, Dan Monitoring Evaluasi, Kegiatan ini dilakukan untuk mengakomodir kegiatan koordinasi serta advokasi terkait isu strategis pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan, dengan BPOM dan/atau antar UPT BPOM, **(2) Kegiatan Terpadu** dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi; **(3) Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dak Non Fisik POM**, DAK Nonfisik BOK POM merupakan bagian dalam memenuhi kebutuhan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Kegiatan Monev ini dilakukan untuk mengakomodir bentuk konsultasi / koordinasi ke Badan POM dan/atau antar BB/BPOM terkait strategi agar penyaluran DAK ini berjalan efektif, efisien dan capaian realisasinya akan maksimal; **(4) Pengendalian Anti-Microbial Resistensi (AMR)** Melalui Peningkatan serta Penerbitan Peredaran Antibiotik, merupakan pengawasan di sarana distribusi dan pelayanan obat serta di sarana lainnya yang mengelola antibiotik termasuk pada sarana pelayanan Kesehatan hewan yang melibatkan lintas sektor terkait (Join Inspection); **(5) Pengayaan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan**, Kegiatan Pengayaan Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bertujuan untuk penguatan dalam Monitoring Efek Samping Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dan membahas strategi penanganan efek samping obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan serta peningkatan kepatuhan pelaporan oleh pelaku usaha; **(6) Perkuatan Regionalisasi Laboratorium Dalam Rangka Sampling dan Pengujian**, Kegiatan sampling dan pengujian merupakan salah satu kegiatan pokok dan strategis untuk melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan melakukan verifikasi terhadap komitmen pelaku usaha dalam menjaga konsistensi keamanan dan mutu produk yang diproduksi dan diedarkan. Saat ini laboratorium Balai Besar POM di Jakarta menghadapi tantangan utama terkait hasil pengujian yang cepat dan valid. Untuk itu, laboratorium Balai Besar POM di Jakarta harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan pengujian Obat dan Makanan yang unggul,

inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global.

t. Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pengawasan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP). Kegiatan strategis dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian. Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta juga mengacu pada system Regionalisasi Laboratorium sebagai Region yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih unggul sebagai Laboratorium Regional yang melakukan pengujian spesifik.

1. Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium

Kegiatan analisis/pengujian yang dilakukan di laboratorium BPOM tidak terlepas kebutuhan terhadap alat untuk pengujian baik alat penunjang maupun alat utama. Laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan sebagai balai spesifik untuk pengujian beberapa parameter spesifik, sehingga diperlukan pemenuhan/peremajaan alat laboratorium seperti : KCKT detektor UV – PDA, Water Purifier, Semiautomatic Kjeldahl and Non-Kjeldahl Solution, Autoklaf, Inkubator, Multivortex, Stabilizer, Polarimeter, Alat Disolusi, GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), KCKT dengan detektor UV-FLR ELSD, Detector Conductivity untuk IC pengujian Br, Fl, Nitrat, Nitrit, Sianida, Column Heater Acquity Arc Ch-30A.

Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta

a. Layanan BMN

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Satuan Kerja wilayah atau UAPPB-W mempunyai tugas membantu melakukan Penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah, yang membawahi satkernya sendiri serta satker lain untuk melakukan pengelolaan BMN sehingga menghasilkan Laporan BMN dan Laporan Keuangan tingkat Wilayah yang akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Output pengelolaan BMN yang salah satunya adalah Laporan BMN yang dihasilkan oleh Satker Wilayah akan turut serta mempengaruhi opini dari auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

1. Penatausahaan BMN

Kegiatan Strategis yang dilakukan Konsolidasi Wilayah Satuan Kerja, dengan Balai Besar POM di Jakarta ditetapkan sebagai satker koordinator untuk wilayah satuan kerja maka perlu dilaksanakan konsolidasi wilayah satuan kerja. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu satker koordinator untuk wilayah satuan kerja Daerah Khusus Jakarta. Kegiatan tersebut berguna untuk penyamaan persepsi sekaligus konsolidasi data terkait Laporan Keuangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta dengan mengundang UPT yang merupakan Satker Koordinator untuk Satker Wilayah Pelaporan Keuangan

b. Layanan Perkantoran

1. Gaji dan Tunjangan

Sebanyak 121 pegawai terdiri dari 16 pegawai laki-laki (13,11%) dan 106 pegawai perempuan (86,88%). Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai Balai Besar POM di Jakarta memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 17%, diikuti Profesi Apoteker sebanyak 39%, S1 sebanyak 32%, non sarjana sebanyak 6% untuk S2 sejumlah 6%. jumlah tersebut dari tahun ke tahun terus berkembang seiring dengan adanya fungsi dan tugas bagi pegawai berdasarkan golongan dan jabatan pegawai tersebut di atas perlu dialokasikan dana untuk pembayaran gaji rutin setiap bulannya.

2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Kegiatan Strategis yang dilakukan sebagai dukungan manajemen melalui **(1) Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Kantor**, Untuk operasional sehari-hari kantor Balai Besar POM di Jakarta memiliki peralatan perkantoran seperti tabung pemadam kebakaran, komputer, CCTV, UPS, alat studio komunikasi, pompa air, AC, dan printer dimana sering digunakan sehari untuk menunjang kegiatan operasional kantors sehingga perlu dilakukan pemeliharaan; **(2) Pemeliharaan Gedung Kantor**, menjadi cermin keindahan dan kebersihan lingkungan kantor sehinggamembuat nyaman pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari; **(3) Pemeliharaan Website**, **(4) Langganan Daya dan Jasa**, sebagai penunjang gedung dan bangunan kantor dan operasional laboratorium; **(5) Perawatan Kendaraan**, perbaikan kendaraan sehingga dapat menunjang kelancaran kegiatan baik berupa koordinasi dengan pemangku kepentingan serta pengawasan obat dan makanan; **(6) Operasional Perkantoran**, Dalam kegiatan perkantoran terdapat pengelolaan anggaran. Agar terlaksananya pengelolaan anggaran yang efisien, dan akuntabilitas maka diperlukan Tim Pengelolaan anggaran; **(7) Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**, Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala genset sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, **(8) Administrasi Kegiatan Perkantoran**, Sebagai penunjang kegiatan perkantoran, ketersediaan barang keperluan sehari-hari perkantoran, ATK, bahan habis pakai, kebutuhan pencetakan dan lainnya menjadi tuntutan dalam

menjamin pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan sepanjang tahun anggaran dapat terpenuhi dengan baik dan mencukupi yang selanjutnya berimbas pada pencapaian kinerja unit kerja. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional pelayanan publik sehingga dapat berjalan dengan prima; **(9) Pengadaan Jasa** jasa outsourcing sebagai pendukung operasional perkantoran; **(10) Sewa Rumah Dinas**, Sewa rumah dinas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas rumah dinas yang layak bagi Kepala Balai Besar POM yang bertugas di Jakarta; **(11) Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan**, Dalam melaksanakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta petugas pengujian menghadapi resiko pekerjaan laboratorium yang berhubungan dengan bahan- bahan pereaksi maupun kimia dan media yang diperlukan dalam pengujian laboratorium sehingga besar kemungkinan mendapat bahaya dari bahan-bahan berbahaya terhadap kesehatan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Jakarta untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BBPOM di Jakarta dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi BBPOM di Jakarta, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BBPOM di Jakarta, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BBPOM di Jakarta diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Jakarta 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.75	91	92.25	93.50	94.75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	88	88,5	89	89,5	90
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	95	96.25	97	98
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan	95.25	96.38	97.50	98.63	99.50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.8	95.6	96.4	97.2	98
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16.67	33.33	50	66.67	83.33
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	64	68	71	75	79
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82	84	86	88	90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,06	87,93	88,80	89,67	90,54
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	15	20	25	27	29
		Jumlah desa pangan aman	5	7	7	8	8
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	2
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.90	35.48	54.76	74.52	95.24
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70	72	74	76	78
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	dibidang Obat dan Makanan						
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,5	93,8	94,2	94,5	95
		Nilai AKIP UPT BPOM	83,52	83,75	84,05	84,25	84,52
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	3,1	3,2	3,3	3,4

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Jakarta 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

KEGIATAN	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	25.372,864	30.573,739	35.713,226	41.573,239	48.552,212
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19.634,537	21.911,160	24.102,276	26.512,504	27.163,754
TOTAL	45.007,401	52.484,899	59.815,502	68.085,743	75.715,966

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Jakarta 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

SUMBER DANA	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	42.962,965	50.440,463	57.771,066	66.041,307	73.671,530
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.044,436	2.044,436	2.044,436	2.044,436	2.044,436
TOTAL	45.007,401	52.484,899	59.815,502	68.085,743	75.715,966

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BBPOM di Jakarta dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai.

Pada akhir 2025- 2029, BBPOM di Jakarta diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Renstra Renstra BBPOM di Jakarta 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan.

Renstra BBPOM di Jakarta Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BPOM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI JAKARTA TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Jakarta								85.348.183,684	86.201.665,5	87.063.682,2	87.934.319,0	88.813.662,2	BBPOM di Jakarta	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								65.713.646,684	66.370.783,151	67.034.490,982	67.704.835,892	68.381.884,251		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Daerah Khusus Jakarta	89,75	91	92,25	93,5	94,75						
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30						
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	93	94	95	96						
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		88	88,5	89	89,5	90						
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93,5	95	96,25	97	98						
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		95,25	96,38	97,5	98,63	99,5						
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95							

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		94,8	95,6	96,4	97,2	98						
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		85	86	87	88	89						
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		82	84	86	88	90						
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		16,67	33,33	50	66,67	83,33						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			90	95	99	104	109						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			721	757	795	835	876						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			1.649	1.731	1.818	1.909	2.004						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			183	192	202	212	222						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			830	872	915	961	1.009						
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			0	204	0	0	0						
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			0	0	0	0	0						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	1	0	0	0						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	1	0	0	0						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	0	0	0	0						
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Daerah Khusus Jakarta											
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		64	68	71	75	79						
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			0	19	0	0	0						
3	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Daerah Khusus Jakarta											
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		70	72	74	76	78						
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			0	0	0	0	0						
4	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Daerah Khusus Jakarta											
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			0	0	0	0	0						
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Daerah Khusus Jakarta											
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		16,9	35,48	54,76	74,52	95,24						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			0	77	0	0	0						
6	Meningkatnya efektivitas KIE		Daerah Khusus Jakarta											
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		87,06	87,93	88,8	89,67	90,54						
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		15	20	25	27	29						
	3	Jumlah desa pangan aman		5	7	7	8	8						
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	2						
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			0	10860	0	0	0						
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			0	9	0	0	0						
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			0	15	0	0	0						
	RO 4: Desa Pangan Aman			0	5	0	0	0						
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			0	1	0	0	0						
7	Layanan Publik UPT yang prima		Daerah Khusus Jakarta											
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			0	522	0	0	0						
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Daerah Khusus Jakarta											
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		93,5	93,8	94,2	94,5	95						

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		83,52	83,75	84,05	84,25	84,52						
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		3,05	3,1	3,2	3,3	3,4						
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			0	1	0	0	0						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			0	0	0	0	0						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			0	0	0	0	0						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									19.634.537,000	19.830.882,370	20.029.191,194	20.229.483,106	20.431.777,937	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			0	1	0	0	0						
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			0	1	0	0	0						